



LAPORAN PENELITIAN

**FAKULTAS
ILMU
ADMINISTRASI**

ANALISIS KINERJA DAN INOVASI PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH



**Oleh:
Drs. Amirul Mustofa, M.Si**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
2015**

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

Judul Penelitian	: Analisis Layanan Kreatif dan Inovatif di Kantor Samsat Provinsi Jawa Timur
Ketua Tim Peneliti	:
a. Nama Lengkap	: Drs. Amirul Mustofa, M.Si
b. NIDN	: 0718016601
c. Jabatan Fungsional	: Lektor/III/C
d. Program Studi	: Administrasi Publik
e. Nomor HP	: 081230594747
f. Alamat Surel (e-mail)	: amirulmust66@gmail.com
Anggota Peneliti (1)	:
a. Nama Lengkap	:
b. NIDN	:
c. Perguruan Tinggi	:
Anggota Peneliti (2)	:
a. Nama Lengkap	:
b. NIDN	:
c. Perguruan Tinggi	:
Lama Penelitian Keseluruhan	: 4 Bulan
Biaya Penelitian Keseluruhan	: Rp. 15.000.000,00
Biaya Mandiri	: Rp. 5.000.000,00
Biaya yang Diusulkan	: Rp. 10.000.000,00
Biaya Tahun Berjalan	: - Diusulkan ke Instansi Rp. 0,00 - Dana internal PT Rp. 10.000.000,00 - Dana institusi lain Rp. 0,00 - <i>Inkind</i> sebutkan -

Mengetahui,
Dekan Fakultas

(Drs. Basuki Nugroho, M.Si)
NIP. 195709021986031001

Surabaya, 1 November 2015
Ketua Peneliti


(Dr. Drs. Amirul Mustofa, M.Si)
NPP. 91.01.1.085

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Dr. Soetomo

(Dr. Sri Utami Ady, SE, MM)
NPP. 94.1.01.170

KATA PENGANTAR

Peningkatan kinerja organisasi di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu komponen integral dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sehubungan dengan itu Sumberdaya Aparatur Pemerintah yang mengemban tugas pokok dan fungsi di Dinas ini, wajib memiliki tiga kecapakan atau kompetensi sesuai dengan tingkat jabatannya yakni: *technical competence*, *managerial competence*, dan *behavior competence*. Dengan tiga kompetensi ini diharapkan bahwa SKPD ini mampu menterjemahkan RPJMD, menyusun dan mengimplementasikan Rentras Dinas dan kepentingan masyarakat ke dalam arah kebijakan, sasaran, program dan kegiatan SKPD.

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas ini sesuai dengan peraturan perundangan perlu dilakukan evaluasi terhadap program kerja dan capaian kinerja, dalam upaya peningkatan kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan. Karena itu kajian ini penelitian ini bertujuan untuk: i) mengkaji kinerja Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan tupoksinya, ii) mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang mengemuka dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja Dinas, dan iii) memformulasikan arah kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas. Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan informasi penting untuk perbaikan kinerja dinas pada periode berikutnya.

Laporan penelitian ini, yang disusun berdasarkan data riil di Dinas PU dan Cipta Karya dan wawancara dari key informan. Demikian atas perhatiannya kami capkan terima kasih.

Peneliti

ttd

Drs. Amirul Mustofa, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	li
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	Vii
DAFTAR GRAFIK	Viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Ruang Lingkup	4
1.5 Hasil / Output	6
1.6 Alur Kerangka Konsep	6
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN KINERJA KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	
2.1 Pendekatan Kelembagaan	9
2.2 Model Pengembangan Kelembagaan dan Kinerja Organisasi	10
BAB III METODE KAJIAN	
3.1 Pendekatan Kajian	15
3.2 Lokasi Kajian	15
3.3 Kebutuhan Data	15
3.4 Analisis Data	16

BAB IV	GAMBARAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO DAN DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
4.1	Kondisi Geografis	18
4.2	Kondisi Demografis	19
4.3	Kondisi Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pembangunan	28
4.4	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo	36
4.5	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo	40
BAB V	INOVASI KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO	
5.1	Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	48
5.1.1.	Kinerja Kelembagaan	48
5.1.1.1	Tugas, Pokok, dan Fungsi Dinas	49
5.1.1.2	Sasaran Strategis Kegiatan dan Indikator Capaian serta Alokasi Anggaran	58
5.1.1.3	Dukungan Sumberdaya Aparatur Dinas	61
5.1.2.	Kinerja Layanan	64
5.1.2.1	Layanan Perijinan Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	65
5.1.2.2	Layanan Non Perijinan: Klarifikasi Konstruksi Bangunan Berlantai 3 (tiga) atau Lebih	73
5.1.2.3	Layanan Non Perijinan: Klarifikasi Konstruksi Bangunan Menara Telekomunikasi	78
5.1.2.4	Layanan Non Perijinan: Klarifikasi Konstruksi Bangunan Menyelenggarakan Reklame	83
5.1.3.	Kinerja Program dan Anggaran	94
5.2	Permasalahan yang Dihadapi dalam Peningkatan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	106

5.3	Inovasi: Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Dalam Meningkatkan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo 2015 - 2019	109
BAB VI PENUTUP		
6.1	Kesimpulan	116
6.2	Rekomendasi	119
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel

4.1	Lokasi Administrasi Kabupaten Sidoarjo	18
4.2	Pertumbuhan Penduduk Berdasar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Dari Tahun 1990 hingga 2012	21
4.3	Jumlah Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan Setiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo	22
4.4	Jumlah Penduduk Berdasar Mata Pencaharian di Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo	23
4.5	Jumlah Sekolah di Kabupaten Siodarjo	25
4.6	Kondisi Sarana Gedung Sekolah Untuk Setiap Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Sidoarjo	25
4.7	Kondisi Fasilitas Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo	26
4.8	Kondisi Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit di Kabupaten Sidoarjo	27
4.9	Anggaran dan Realisasi Program Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012	33
4.10	Perkembangan Kondisi Anggaran Daerah di Kabupaten Sidoarjo	35
4.11	Indikator Pembangunan dan SKPD Dalam Tupoksi Optimalisasi Infrastruktur Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo	39
4.12	Personalia Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	43
4.13	Nama dan Status Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	45
5.1	Rumusan Sasaran strategis, Indikator kinerja, serta Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaen Sidoarjo Tahun 2013	58
5.2	Dukungan Sumberdaya Aparatur Dinas di Masing-	61

	masing BidangDinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013	
5.3.	Capaian Kinerja Layanan Perijinan IUJK di Kabupaten Sidoarjo	72
5.4.	Data Klarifikasi Konstruksi Reklame Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Januari 2014 s/d Juli 2014)	90
5.5	Perkembangan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010- 2012	94
5.6	Perbandingan Kinerja Anggaran Tahun 2012 dengan 2013Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sidoarjo	99
5.7	Program dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013	100
5.8	Capaian Kinerja Program dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013	103
5.9	Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Dalam Peningkatan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo 2015 - 2019	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.1	Alur Kerangka Konseptual Kajian Peningkatan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	8
2.1	Pengembangan Model Kelembagaan Birokrasi	11
2.2	Pengembangan SDM Pada Organisasi Pemerintah	12
2.3	Optimalisasi Kelembagaan dan Peningkatan Mutu Pelayanan	13
2.4	Model Kemitraan Atas Pelayanan Publik	14
4.1	Peta Wilayah Admnistrasi Kabupaten Sidoarjo	18
4.2.	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Berdasar Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 60 Tahun 2012)	43
5.1	Mekanisme Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	68
5.2	Skema Mekanisme Penerbitan Berita Acara Klarifikasi Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	69
5.3	Mekanisme Permohonan Perpanjangan Klarifikasi Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	70

DAFTAR GRAFIK

Grafik

4.1	Luas Wilayah (Km ²) Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo	19
4.2	Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kabupaten Sidoarjo	20
4.3	Jumlah Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo	22
4.4	Jumlah Penduduk Berdasar Mata Pencaharian di Kabupaten Sidoarjo	23
4.5	Kondisi Infrastruktur Jalan Beraspal di Kabupaten Sidoarjo	28
4.6	Kondisi Genangan (Ha) Berdasar Area di Kabupaten Sidoarjo	30
4.7	Kondisi Bangunan Ber-IMB di Kabupaten Sidoarjo	31
4.8	Jumlah Sarana Air Bersih di Kabupaten Sidoarjo	31
4.9	Perkembangan Panjang Jalan Lingkungan di Kabupaten Sidoarjo	32
4.10	Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Sidoarjo	35
4.11	Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo	36
4.12	Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	47
5.1	Persentase Sasaran strategis, Indikator kinerja, serta Alokasi anggaran Tiap Program Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013	60
5.2	Tingkat Pendidikan Sumberdaya Aparatur Dinas yang Berstatus PNS Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	62

5.3	Tingkat Pendidikan Sumberdaya Aparatur Dinas yang Berstatus Pegawai Kontrak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	63
5.4	Tingkat Pendidikan Sumberdaya Aparatur Dinas yang Berstatus Pegawai Honorer Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	63
5.5	Restribusi Perijinan IUJK dari Tahun 2007-2010 Kabupaten Sidoarjo	71
5.6	Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Perijinan IUJK di Kabupaten Sidoarjo	72
5.7	Jumlah Bangunan Yang Telah Diklarifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Januari – Desember 2013)	77
5.8	Frekuensi Bangunan Yang Telah di Cek Lapangan atau Diklarifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Januari – Desember 2013)	78
5.9	Jumlah Titik Tower Telekomunikasi yang Diklarifikasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Januari – Desember 2013)	80
5.10	Frekuensi Pengawasan Titik Tower Telekomunikasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Januari – Desember 2013)	81
5.11	Jenis Rekomendasi Yang Dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Januari – Desember 2013)	81
5.12	Data Klarifikasi Konstruksi Reklame Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo (Januari 2014 s/d Juli 2014)	89
5.13	Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2012 dan 2013 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	96
5.14	Persentase Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2012 dan 2013 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	98

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), diperlukan sebuah rekayasa, perubahan dan inovasi (*change and innovation*) secara terus menerus dan berkelanjutan. Peningkatan kinerja organisasi dimulai dari peningkatan seorang individu, sebagai anggota dari organisasi dalam penguasaan keahlian (*competence*) yang mencakup: i) kompetensi teknis (*technical competence*) yaitu penguasaan seorang individu terhadap bidang keilmuan tertentu seperti bidang teknologi, bidang administrasi, bidang teknis lainnya; ii) Kompetensi manajerial (*managerial competence*), yang berarti kemampuan individu terkait dengan manajemen kebijakan, manajemen kepemimpinan dan manajemen pengelolaan sumberdaya dalam mendukung tujuan organisasi; iii) Kompetensi perilaku (*behavior competence*), yang berarti kemampuan individu terkait dengan penguasaan terhadap etika, penguasaan emosi, motivasi dan kebiasaan individu dalam mendukung budaya organisasi.

Penguasaan individu terhadap ketiga kompetensi tersebut manakala diimplementasikan ke dalam organisasi akan menjadi kinerja (*performace*) individu. Sementara itu kinerja individu ketika diimplementasikan ke dalam kelompok (seksi atau bagian) akan menunjukkan performa dari kelompok tersebut, serta manakala kinerja kelompok diakumulasikan akan melahirkan kinerja organisasi. Dengan demikian kinerja organisasi adalah sebuah pencapaian hasil atau *degree of accomplishment* dari sebuah organisasi (Rue and byars, 1981). Hal ini berarti bahwa, kinerja suatu organisasi sebuah upaya

organisasi untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Saat ini, peningkatan kinerja organisasi pada seluruh SKPD di Indonesia, tak terkecuali pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo, menjadi keharusan. Sehubungan dengan itu, penyusunan perencanaan kinerja dan komponen terkait dengan kinerja arus “direncanakan secara benar” atau jangan sampai “merencanakan sesuatu yang salah” bahkan “salah dalam membuat perencanaan kinerja”. Paling tidak dalam merencanakan kinerja organisasi di Dinas PU Cipta Karya wajib memperhatikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, dan yang ditetapkan dalam RPJP dan RPJM Kabupaten Sidoarjo, serta rencana strategis Dinas PU Cipta Karya yang telah ditetapkan.

Beberapa komponen yang perlu diperhatikan di dalam meningkatkan kinerja Dinas PU Cipta Karya adalah: i) program kerja dapat diimplementasikan dengan baik yang didukung oleh Sumberdaya Aparatur Pemerintah yang memiliki kompetensi, dan sarana-prasarana yang memadai, serta sumberdaya keuangan yang cukup; ii) pelayanan yang berkualitas, yang mengedepankan pelayanan yang berorientasi pada produktivitas, tanggung jawab, akuntabilitas dan responsivitas; iii) pola manajemen dan kepemimpinan yang visioner atau senantiasa memperhatikan dan memecahkan persoalan dengan baik dan memperhitungkan dampaknya di masa depan dan keberlanjutannya. Ketiga komponen tersebut manakala diorganisir dan dikelola secara sinergis maka dapat dipastikan kinerja organisasi akan baik.

Bagi SKPD yang berorientasi pada sistem, penilaian kinerja SKPD tak terkecuali di DPU Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo wajib dievaluasi secara periodik, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja organisasi penyelenggara pelayanan publik. Hingga kajian ini dilaksanakan penilaian belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga hasilnya masih partial. Sehubungan dengan itu agar dapat

didapatkan informasi yang lengkap terhadap sejumlah komponen kinerja yang sudah baik dan yang belum baik diperlukan kajian dengan alat ukur tertentu.

Alat ukur kinerja bagi organisasi publik, dirasa memang sulit ditetapkan. Namun demikian, ketika dikembalikan pada pertanyaan “mengapa organisasi tersebut hadir di masyarakat untuk menjalankan misi layanan publik?” maka ukuran kinerja lembaga publik agak transparan, kendati terkadang bermakna ganda atau multi tafsir dikarenakan dipenuhi dengan syarat kepentingan. Sehubungan dengan itu dalam kajian ini peneliti lebih memfokuskan kajian kinerja Dinas PU Cipta Karya pada 3 aspek, yakni: aspek program kerja, aspek kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, dan aspek manajemen. Dengan mengkaji kinerja melalui tiga aspek tersebut, maka kinerja organisasi akan dapat memenuhi kepentingan pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait khususnya sektor privat.

1.2. Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang masalah tersebut menunjukkan bahwa tuntutan publik atas pelayanan pemerintah daerah dalam bentuk public service dapat diwujudkan dengan peningkatan kinerja setiap SKPD sebagai instrument penyelenggara pelayanan publik. Kapasitas kelembagaan akan menentukan arah kinerja birokrasi dalam menjalankan setiap tugas, pokok dan fungsi sebagai kewenangan yang telah diatur dalam regulasi pemerintah daerah. Maka dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah akan dilakukan kajian dengan judul “Kajian Peningkatan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Sidoarjo”, dengan mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Sidoarjo?

2. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Sidoarjo?
3. Bagaimana Inovasi dalam peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Sidoarjo?

1.3. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan “Kajian Peningkatan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Sidoarjo”, adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tingkat kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan apa yang menjadi Tugas, Pokok dan Fungsi serta kewenangan dan tanggungjawab selaku SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang mengemuka dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
3. Memformulasikan Inovasi dalam peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan agar ada batasan dalam penelitian peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk memberikan fokus kajian yang lebih mendalam serta mampu memberikan rekomendasi tindak lanjut lebih implementatif dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja. Ruang lingkup wilayah studi adalah SKPD di pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sebagai objek kajian. Ruang lingkup materi yang akan

dibahas dalam kajian peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

1. Menjelaskan secara deskriptif capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan studi dokumentasi sejumlah dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015, RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015, LKPJ Bupati Sidoarjo dan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, sejumlah dokumen regulasi pemerintah Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perumahan Keuda Atas Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, serta dokumen statistik lainnya yang memuat data dan informasi hasil pembangunan selama ini).
2. Menjelaskan tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah diatur sebagai tugas, pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Dengan melakukan identifikasi sejumlah persoalan, hambatan dan tantangan sebagai isu strategis (diperoleh dari hasil penelitian atau survei lapangan, melakukan wawancara kepada stakeholder di lingkungan pemerintah daerah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo).
3. Melakukan rumusan arah kebijakan, program dan kegiatan sebagai strategi peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Dengan melakukan analisa capaian kinerja, rumusan isu strategis dan kebijakan ke depan dalam upaya peningkatan kinerja dalam bentuk rekomendasi program serta kegiatan yang implementatif.

1.5. Hasil/Output

Hasil/output yang diharapkan dari kajian peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo adalah dokumen laporan kinerja pemerintah daerah.

1. Data dan informasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
2. Data dan informasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
3. Rumusan arah kebijakan, program dan kegiatan ke depan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.

1.6. Alur Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan rangkaian dan alur pikir yang digunakan dalam melakukan kajian peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Beberapa konsep-konsep yang digunakan akan menggambarkan alur pikir konseptualisasi, antara lain:

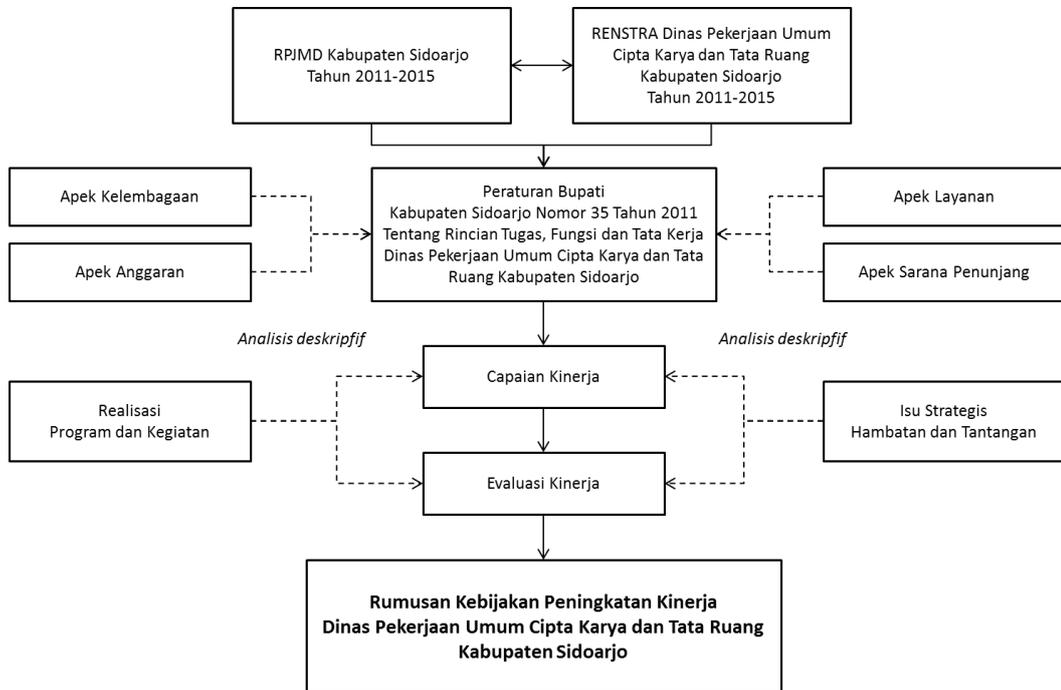
1. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Sidoarjo adalah SKPD di pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasar Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perumahan Keuda Atas Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Dijelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang pelaksanaan pekerjaan umum Cipta Karya dan Tata Ruang.
2. Kinerja merupakan hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

sebagai bentuk implementasi tugas, pokok dan fungsi yang telah diatur dalam regulasi pemerintah daerah. Kinerja yang dimaksud adalah program dan kegiatan yang telah terealisasi saat ini. Capaian kinerja akan dijelaskan dengan mempertimbangkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan di bidang pelaksanaan pekerjaan umum Cipta Karya dan Tata Ruang.

3. Capaian kinerja yang dimaksud adalah dengan melihat beberapa aspek realisasi program dan kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Terdapat 4 (empat) aspek yang akan dijelaskan yaitu: (1). Aspek kelembagaan (sumber daya manusia, pengelolaan organisasi); (2). Aspek anggaran; (3). Aspek layanan; (4). Aspek sarana dan prasarana penunjang lainnya.
4. Kebijakan merupakan sebuah keputusan pemerintah daerah sebagai bentuk strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015, RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015. Kebijakan dirumuskan dari sebuah proses analisa isu-isu strategis, arah strategi serta indikator yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Kebijakan akan berorientasi ke depan dalam bentuk rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

Konsep-konsep tersebut digambarkan dalam alur pikir dalam pelaksanaan kajian peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

**Gambar 1.1. Alur Kerangka Konseptual
Kajian Peningkatan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo**



Sumber: Hasil Analisa

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN KINERJA KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Pendekatan Kelembagaan

Kelembagaan birokrasi dapat dikembangkan dalam 2 (dua) pendekatan yaitu *system learning organization model* dan *new public service management*. Birokrasi sebagai kelembagaan instrumental akan selalu mengadopsi diri seiring perkembangan manajemen pemerintahan daerah yang dikembangkan. Saat ini, sistem pemerintahan demokratis mendorong birokrasi ke arah perbaikan kelembagaan yang menjalankan fungsi sebagai *public service*. *System learning organization model* merupakan sebuah proses pembelajaran upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.

Marquardt & Reynolds (1994 dan 1996) memeberikan definisi tentang proses pembelajaran organisasi dalam kelembagaan birokrasi yaitu "*as a process by which individual gain new knowledge and insights to change their behavior and actions*" suatu proses ketika individu memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru untuk mengubah sikap dan tindakan. Sedangkan pendapat dari Grindle (1997) menyatakan bahwa bahwa perkuatan kapasitas institusi seharusnya mengarah pada 3 (tiga) aspek, yaitu: (1). Pengembangan sumberdaya manusia; (2). Penguatan organisasi; dan (3). Reformasi kelembagaan. Sehingga *system learning organization model* merupakan proses pembelajaran organisasi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang akan mendorong perbaikan organisasi dan kelembagaan birokrasi. Proses belajar sebuah organisasi berhubungan dengan sikap, dorongan, partisipasi, pemahaman, wawasan dari orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi dalam

lingkungan yang sering berubah-ubah. Efektivitas proses pembelajaran dalam organisasi ini akan mempertinggi kemampuan untuk bertindak atau bekerja orang-orang didalam organisasi.

2.2. Model Pengembangan Kelembagaan dan Kinerja Organisasi

Kelembagaan birokrasi juga harus dapat bersaing dengan mengembangkan model kualitas kualitas kinerja, dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui inisiatif *reengineering*, *downsizing*, *streamlining*, dan *rightsizing*. Birokrasi berkembang dengan berbagai tuntutan perbaikan kinerja sebagai birokrasi publik. *New public management* memberikan tahapan perkembangan organisasi birokrasi publik dalam 4 (empat) fase, yaitu:

1. Model *The Efficiency Drive*, model ini menekankan pada nilai- efisiensi sebagai tujuan utama.
2. Model *Down Sizing and Decentralisation*, model ini menggeser penekanan nilai efisiensi dalam organisasi pada sentuhan inovasi dengan humanisme, manajemen hirarkhis ke manajemen kontrak , gaya kepemimpinan dilakukan dengan *management by influence*.
3. Model *In Search of Excellence*. Model ini lebih menekankan pada pentingnya kultur organisasi dan perubahan yang terus menerus sekitar kultur organisasi.
4. Model *Public Service Orientation*. Model ini mengutamakan kualitas pelayanan. Pelayanan yang berkualitas diasumsikan hanya dapat dilakukan dengan mengenali visi dan misi birokrasi.

Gambar 2.1. Pengembangan Model Kelembagaan Birokrasi

(Diadopsi dan dikembangkan dari Marquardt: 1996)

Tujuan manajemen SDM adalah untuk meraih keunggulan dengan melakukan alokasi strategis pegawai yang berkualifikasi dengan mengintegrasikan keputusan-keputusan mengenai manusia dengan keputusan-keputusan yang terkait dengan hasil yang akan dicapai organisasi. Menurut Hendry dan Pettigrew (1986: 56) menjeaskan bahwa manajemen strategis sumber daya manusia memiliki 4 (empat) makna, yaitu: pertama, memanfaatkan perencanaan. Kedua, pendekatan yang koheren dalam perancangan dan sistem manajemen personalia yang didasarkan pada kebijakan kepegawaian dan strategi kepegawaian yang biasanya juga didasari satu filosofi tertentu. Ketiga, menyelaraskan kegiatan SDM dengan kebijakan. Keempat, memandang pegawai sebagai sumber daya strategis untuk meraih keunggulan kompetitif.

Gambar 2.2. Pengembangan SDM Pada Organisasi Pemerintah



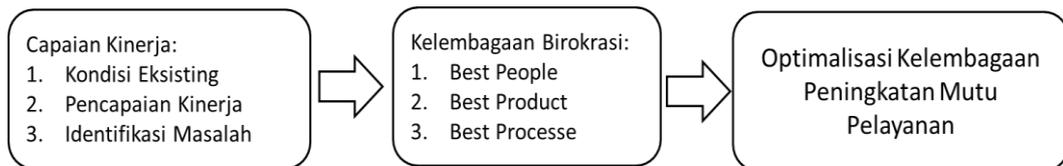
U.S. Office of Personnel Management (1999:1)

Konsep peningkatan kelembagaan yang dimaksud dalam kajian ini adalah melakukan upaya optimalisasi potensi kelembagaan yang ada guna mencapai standart kinerja layanan birokrasi prima. Konsep ini dihasilkan dari dua pendekatan teoritik yaitu *Good Corporate Governance (GCG)* dan *Public Private Partnership (P3)*. GCG dijelaskan dengan melihat keunggulan dan potensi SDM, produk yang dihasilkan sebagai *output* dan *outcome* kinerja aparatur pemerintah, serta proses dalam mengelola SDM dan produk tersebut dalam sebuah sistem birokrasi efektif dan efisien. P3 dijelaskan dengan melihat pengembangan pola kerjasama atau networking yang dilakukan oleh pemerintah dengan sektor *public* (masyarakat maupun swasta) dalam mendorong kinerja pemerintah di bidang pembangunan peningkatan kapasitas SDM.

Indikator pencapaian GCG adalah BP3 (*Best People, Best Product, Best Process*) dan kapasitas kelembagaan (*Visionery leadership, SDM, Struktur, Infrastruktur, Anggaran, Budaya, Strategi, Desain program, Teknologi dan Networking*).

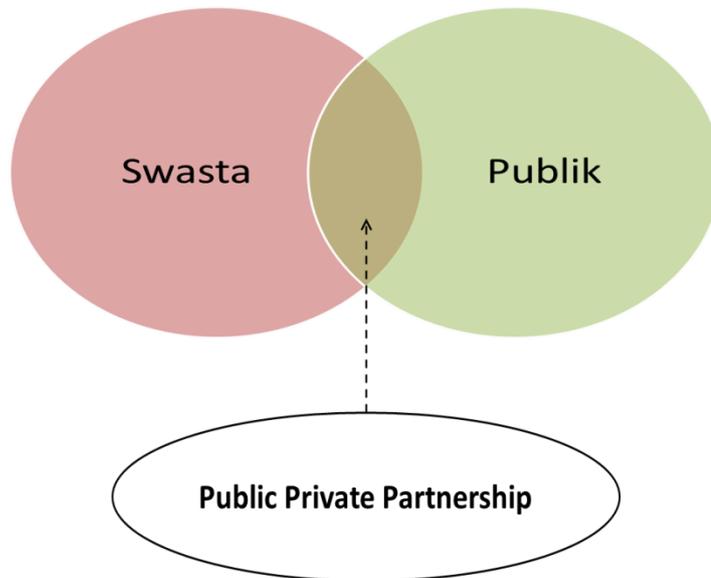
Indikator dari P3 adalah produk yang dihasilkan dari kinerja birokrasi harus mampu tersampaikan dengan baik kepada publik sebagai konsumen. Inovasi produk dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan pasar, sehingga minat terhadap produk tetap dapat dipertahankan. P3 juga tidak menutup kemungkinan adanya model kolaborasi antar dua pihak atau lebih dalam melaksanakan sebuah program pembangunan (pelatihan peningkatan kapasitas SDM, keterampilan *softskill* dan *hardskill* hingga *shering* anggaran).

Gambar 2.3. Optimalisasi Kelembagaan dan Peningkatan Mutu Pelayanan



Pelayanan publik didefinisikan sebagai setiap aktivitas pelayanan yang dilakukan pemerintah, individu, organisasi, dan yang lainnya (the others) dalam rangka merespon tuntutan individu, kelompok, organisasi, dan yang lainnya (the others) yang bersinggungan dengan kepentingan keseluruhan populasi penduduk. Publik dapat dimaknai sebagai sekelompok orang, baik sebagian maupun keseluruhan populasi penduduk, yang karena faktor geografis, demografis, sosial, ekonomi, dan politik memiliki preferensi yang sama dan/atau berbeda terhadap barang dan jasa publik. Penyelenggara pelayanan publik bisa berbentuk institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melakukan kegiatan pelayanan publik, atau badan hukum lainnya yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kemudian berkembang dalam konsep kemitraan publik-swasta (*public private partnership*) dalam pengelolaan pelayanan publik.

Gambar 2.4. Model Kemitraan Atas Pelayanan Publik



BAB 3 METODE KAJIAN

3.1. Pendekatan Kajian

Kajian dilakukan dengan pendekatan deskriptif yang menekankan pada penjelasan dan menggambarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Kinerja dideskripsikan dengan menjelaskan 4 (empat) aspek, yaitu: (1). Aspek kelembagaan (sumber daya manusia, pengelolaan organisasi); (2). Aspek anggaran; (3).Aspek layanan; (4).Aspek sarana dan prasarana penunjang lainnya.

3.2. Lokasi Kajian

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo dengan mengambil objek kajian adalah peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sebagai SKPD pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang pelaksanaan pekerjaan umum Cipta Karya dan Tata Ruang.

3.3. Kebutuhan Data

Kebutuhan data dalam melakukan kajian peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo terdiri dari data sekunder dan data primer.

Data sekunder merupakan data dalam bentuk dokumen yang bersumber dari instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo atau lainnya. Dokumen dapat berupa data statistik, data dan informasi perencanaan pembangunan, hasil kinerja pelaksanaan pembangunan, regulasi dan kebijakan pemerintah. Data

sekunder dikumpulkan dengan cara kolektif data di instansi pemerintah dengan dibantu *check list* kebutuhan data. Data sekunder yang dimaksud antara lain:

1. Data dan informasi dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015.
2. Data dan informasi dalam RENSTRADinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015.
3. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Sidoarjo
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIP) Kabupaten Sidoarjo.
5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIP) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
6. Data dan informasi dalam Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2013.
7. Regulasi dan peraturan pemerintah dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perumahan Keuda Atas Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.

Data primer merupakan data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui metode penelitian atau survei lapangan. Data primer akan diperkaya dengan melakukan wawancara mendalam indepth interview kepada stakeholder di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Dalam memperoleh data primer maka petugas pengumpul data akan dibekali dengan catatan lapangan serta pedoman wawancara terstruktur.

3.4. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka akan dilakukan tahapan klasifikasi data, reduksi data hingga penarikan kesimpulan data. Data kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat penjelasan serta dapat didukung dengan bentuk tampilan data berupa table, grafik dan gambar. Data kemudian dilakukan analisa dekriptif akan menggambarkan 3 (tiga) materi, yaitu: (1). Capaian kinerja Dinas Pekerjaan

Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo; (2). Hambatan dan tantangan dalam peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo; dan (3). Rumusan kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang lebih implementatif.

BAB 4

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO DAN DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

4.1. Kondisi Geografis

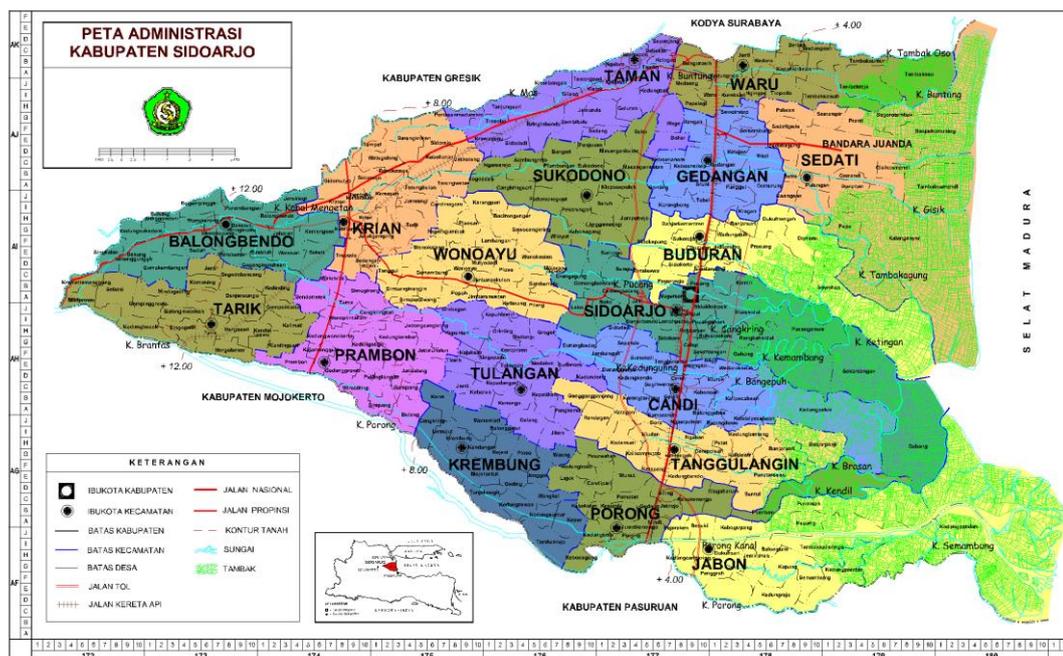
Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo mencapai 714,243 Km² yang secara administrasi meliputi 18 kecamatan, 322 desa dan 31 kelurahan.

Tabel 4.1. Lokasi Administrasi Kabupaten Sidoarjo

Lokasi Wilayah Kabupaten Sidoarjo		
Letak Geografis	BT	: 112,15° - 112,9°
	LS	: 7,3° - 7,5°
Batas Wilayah	Utara	: Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
	Selatan	: Kabupaten Pasuruan
	Timur	: Selat Madura
	Barat	: Kabupaten Mojokerto

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.

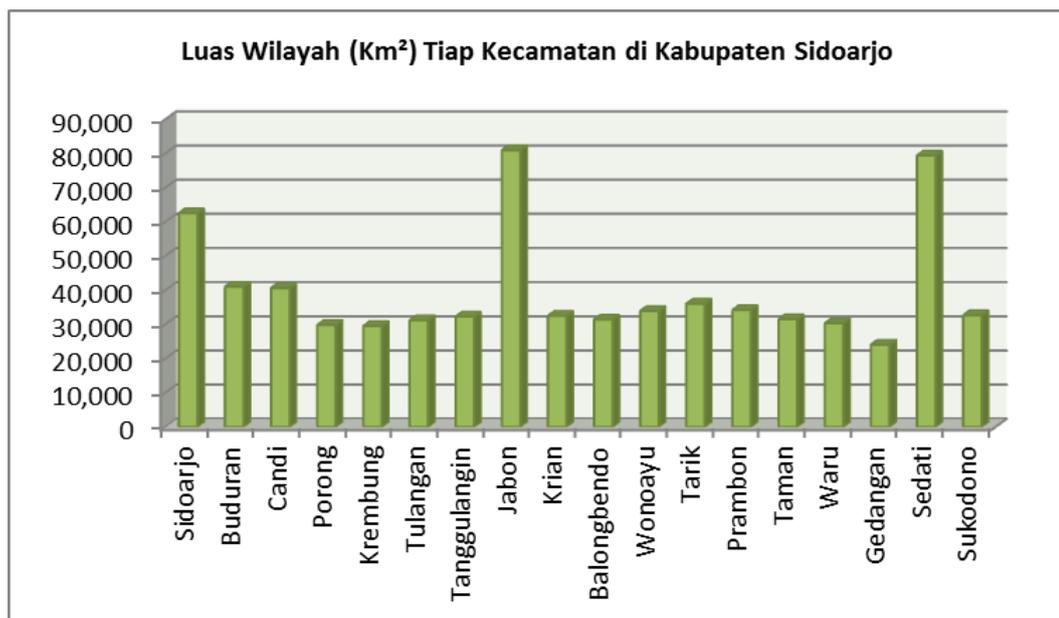
Gambar 4.1. Peta Wilayah Admnistrasi Kabupaten Sidoarjo



Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.

Dari total luas wilayah Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa wilayah kecamatan memiliki wilayah paling luas, seperti Kecamatan Sidoarjo dengan luas wilayah mencapai 62,560 Km², Kecamatan Jabon dengan luas mencapai 80,998 Km² dan Kecamatan Sedati dengan luas wilayah mencapai 79,430 Km². sedangkan untuk wilayah kecamatan paling kecil adalah Kecamatan Gedangan dengan luas wilayah mencapai 24,058 Km².

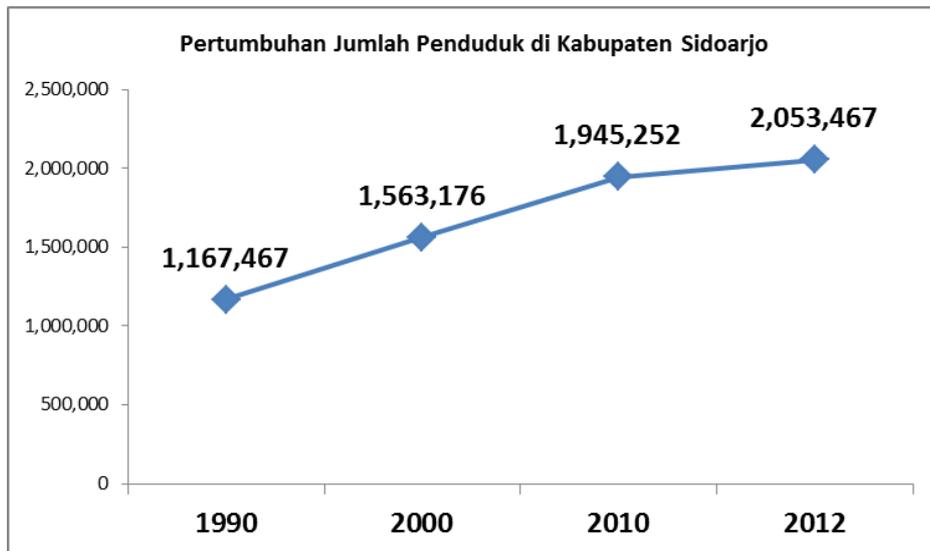
Grafik 4.1. Luas Wilayah (Km²) Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo



Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.

4.2. Kondisi Demografis

Hingga tahun ini jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo mencapai 2.053.467 jiwa dan jumlah rumah tangga mencapai 615.781 KK. Kabupaten Sidoarjo mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dalam 10 tahun terakhir. Peningkatan jumlah penduduk dapat dilihat dari data jumlah penduduk berdasar Hasil Sensus Penduduk dari tahun 1990 hingga 2010.

Grafik 4.2. Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kabupaten Sidoarjo

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.

Jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2012 mencapai 2.053.467 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki mencapai 1.034.765 jiwa dan penduduk perempuan mencapai 1.018.702, sedangkan sex ratio mencapai 101,58. Kecenderungan peningkatan jumlah penduduk terjadi di hamper semua wilayah kecamatan, meski di beberapa kecamatan memiliki pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi jika dibandingkan wilayah kecamatan lainnya. Faktor pertumbuhan ekonomi menjadi 20actor penting dalam mendorong peningkatan jumlah penduduk di sebuah wilayah.

Beberapa wilayah kecamatan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi menjadi pusat konsentrasi penduduk, sehingga wilayah kecamatan ini cenderung mengalami peningkatan jumlah penduduk lebih cepat dibanding wilayah kecamatan lainnya. Wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat seperti Kecamatan Sidoarjo dengan jumlah penduduk mencapai 206.910 jiwa, Kecamatan Taman dengan jumlah penduduk mencapai 214.356 jiwa, Kecamatan Waru dengan jumlah penduduk mencapai 223.697 jiwa.

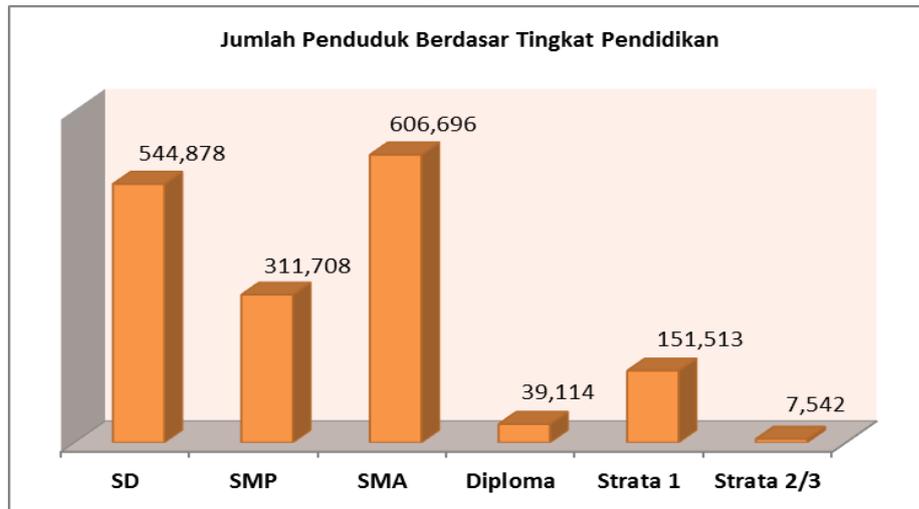
**Tabel 4.2. Pertumbuhan Jumlah Penduduk Berdasar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
Dari Tahun 1990 hingga 2012**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Hasil Sensus Penduduk			Jmlh. Pend.
			1990	2000	2010	2012
1	Sidoarjo	62,560	101,586	146,615	194,051	206,910
2	Buduran	41,025	44,844	65,164	92,334	94,137
3	Candi	40,668	60,794	92,897	145,146	144,465
4	Porong	29,823	58,933	69,337	65,909	89,654
5	Krembung	29,550	45,978	53,039	58,358	69,268
6	Tulangan	31,205	58,327	67,308	87,422	91,721
7	Tanggulangin	32,290	56,597	71,149	84,580	106,313
8	Jabon	80,998	42,471	47,683	49,989	58,562
9	Krian	32,500	73,245	88,572	118,685	122,386
10	Balombangendo	31,400	47,441	57,357	66,865	73,033
11	Wonoayu	33,920	50,530	61,666	72,009	80,420
12	Tarik	36,060	46,472	53,645	60,977	66,694
13	Prambon	34,225	53,212	60,924	68,336	78,085
14	Taman	31,535	122,393	176,704	212,857	214,356
15	Waru	30,320	139,050	210,426	231,298	223,697
16	Gedangan	24,058	73,244	106,630	132,847	123,492
17	Sedati	79,430	45,458	67,630	92,468	96,204
18	Sukodono	32,678	46,892	66,430	111,121	114,070
TOTAL		714,245	1,167,467	1,563,176	1,945,252	2,053,467

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.

Jumlah penduduk yang telah menempuh jenjang pendidikan mencapai 1.691.451 jiwa, artinya sebanyak 362.016 jiwa penduduk tidak pernah menempuh jenjang pendidikan. Jumlah penduduk berdasar tingkat pendidikan masih didominasi dengan tingkat pendidikan SD/Sederajat dengan jumlah mencapai 544.878 jiwa dan penduduk dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat dengan jumlah mencapai 606.696 jiwa.

Grafik 4.3. Jumlah Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan Setiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

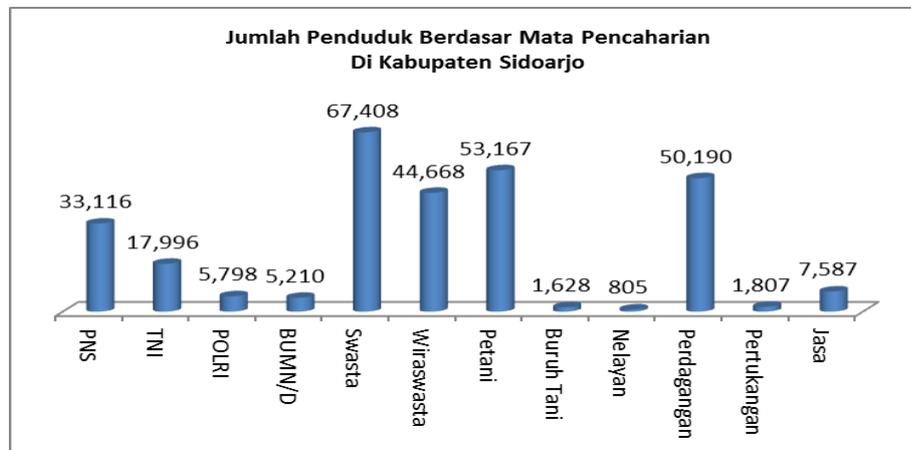
No.	Kecamatan	Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	Diploma	Strata 1	Strata 2/3	
1	Sidoarjo	46,263	26,404	66,188	5,593	26,779	1,340	172,567
2	Buduran	23,432	14,032	29,568	2,014	8,150	372	77,568
3	Candi	39,022	20,873	44,278	2,940	11,743	504	119,360
4	Porong	25,760	16,695	22,285	877	3,320	81	69,018
5	Kremlung	20,203	13,443	18,780	952	2,179	41	55,598
6	Tulangan	28,316	17,226	27,025	1,191	3,588	84	77,430
7	Tanggulangin	28,303	18,895	30,933	1,543	6,054	164	85,892
8	Jabon	22,144	12,152	11,961	560	1,481	39	48,337
9	Krian	36,526	21,458	33,199	1,621	5,486	133	98,423
10	Balombangendo	23,597	14,783	19,545	689	2,436	56	61,106
11	Wonoayu	28,536	14,039	18,927	781	2,875	94	65,252
12	Tarik	22,622	13,283	15,598	579	1,524	38	53,644
13	Prambon	26,061	14,922	19,870	709	2,351	62	63,975
14	Taman	55,045	32,466	71,607	5,755	17,393	898	183,164
15	Waru	47,220	31,118	74,258	6,072	30,026	1,757	190,451
16	Gedangan	27,767	18,349	40,108	2,550	10,151	441	99,366
17	Sedati	24,375	13,576	28,632	2,267	7,123	1,085	77,058
18	Sukodono	29,686	17,994	33,934	2,421	8,854	353	93,242
TOTAL		554,878	331,708	606,696	39,114	151,513	7,542	1,691,451

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.

Jumlah penduduk berdasar mata pencaharian di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa beberapa sektor yang mampu menyerap tenaga kerja antara lain sektor swasta, sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor wiraswasta. Kondisi mata pencaharian penduduk ini sekaligus menggambarkan sektor perekonomian yang menopang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

Dari data tahun 2012, jumlah penduduk yang bekerja di sektor swasta mencapai 67.408 jiwa, sektor pertanian mencapai 53.167 jiwa, sektor perdagangan mencapai 50.190 jiwa dan sektor wiraswasta mencapai 44.668 jiwa.

Grafik 4.4. Jumlah Penduduk Berdasar Mata Pencaharian di Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.

Lebih lengkap mata pencaharian penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasar sebaran wilayah kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Berdasar Mata Pencaharian di Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Berdasar Mata Pencaharian					
		PNS	TNI	POLRI	BUMN/D	Swasta	Wiraswasta
1	Sidoarjo	5,930	1,330	876	944	66,895	4,990
2	Buduran	1,833	852	268	268	32,956	1,616
3	Candi	2,762	2,914	329	319	47,796	3,121
4	Porong	988	327	582	76	30,968	894
5	Krembung	749	239	133	64	25,497	1,355
6	Tulangan	1,143	625	166	169	33,538	1,730
7	Tanggulangin	1,387	587	189	158	40,357	1,909
8	Jabon	490	182	134	80	22,900	973
9	Krian	1,256	1,057	211	117	39,399	2,711
10	Balongsendo	662	357	84	58	25,341	1,248
11	Wonoayu	1,057	346	100	62	28,823	1,643
12	Tarik	498	290	69	41	18,946	1,232
13	Prambon	715	331	130	54	28,121	1,686
14	Taman	3,463	1,951	805	778	68,218	6,208
15	Waru	4,936	1,015	870	1,114	73,003	7,209
16	Gedangan	1,935	2,898	307	357	44,639	2,529
17	Sedati	1,542	1,654	111	317	29,318	1,613
18	Sukodono	1,770	1,041	434	234	40,693	2,019
TOTAL		33,116	17,996	5,798	5,210	697,408	44,686

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.

Lanjutan Tabel 4.4.

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Berdasar Mata Pencaharian					
		Petani	Buruh Tani	Nelayan	Perdagangan	Pertukangan	Jasa
1	Sidoarjo	1,045	21	17	5,824	20	675
2	Buduran	2,143	42	31	1,698	33	195
3	Candi	2,627	31	62	4,116	47	348
4	Porong	2,312	61	3	3,077	120	343
5	Kremlung	4,615	153	2	1,265	61	269
6	Tulangan	4,763	83	1	2,360	107	451
7	Tanggulangin	3,352	79	23	4,063	61	252
8	Jabon	4,636	131	3	2,645	25	132
9	Krian	2,069	51	3	5,203	117	464
10	Balombang	3,095	128	0	1,656	66	327
11	Wonoayu	4,444	172	2	1,722	93	353
12	Tarik	5,426	328	2	1,669	114	291
13	Prambon	4,551	28	2	2,132	74	377
14	Taman	972	188	7	3,964	612	1,573
15	Waru	426	4	22	3,339	87	663
16	Gedangan	1,069	22	6	1,543	74	254
17	Sedati	2,639	46	617	2,518	55	277
18	Sukodono	2,983	60	2	1,396	41	343
TOTAL		53,167	1,628	805	50,190	1,807	7,587

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.

Aspek infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sidoarjo ditunjang dengan keberadaan sarana gedung sekolah dari jenjang pendidikan TK hingga Sekolah Menengah Umum (SMU). Jumlah total sarana gedung sekolah di Kabupaten Sidoarjo mencapai 1.544 gedung sekolah yang terdiri dari sarana gedung sekolah TK sebanyak 724 gedung, untuk jenjang pendidikan SD sebanyak 538 gedung, untuk jenjang pendidikan SMP sebanyak 154 gedung, untuk jenjang pendidikan SMU sebanyak 57 gedung dan untuk jenjang pendidikan SMK sebanyak 71 gedung sekolah. Dari komposisi status pengelolaan sekolah menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Sidoarjo banyak ditunjang dengan keberadaan sekolah dengan status swasta yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan. Faktor ini yang menyebabkan kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sidoarjo cukup memadai dari aspek ketersediaan sarana sekolah. Peran sektor swasta dalam ketersediaan sarana pendidikan cukup signifikan pada jenjang pendidikan SLTP, SMA dan SMK. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SD masih didominasi oleh keberadaan sekolah negeri yang dikelola pemerintah.

Tabel 4.5. Jumlah Sekolah di Kabupaten Sidoarjo

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah Menurut Jenis Sekolah dan Kecamatan									Jumlah
		TK	SD		SLTP		SMU		SMK		
			Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
1	Sidoarjo	81	36	16	6	14	4	7	1	11	176
2	Buduran	32	19	2	3	5	-	2	3	3	69
3	Candi	51	26	3	3	3	-	-	-	1	87
4	Porong	24	24	3	3	8	1	4	-	4	71
5	Krembung	26	26	2	2	3	1	-	-	4	64
6	Tulangan	42	31	2	1	6	-	2	-	4	88
7	Tanggulain	38	21	6	2	5	-	2	-	2	76
8	Jabon	26	23	-	3	3	-	1	1	3	60
9	Krian	36	30	5	3	9	1	6	-	5	95
10	Balombangendo	29	26	1	2	3	-	2	-	2	65
11	Wonoayu	29	30	-	2	2	1	1	-	1	66
12	Tarik	21	30	2	2	3	1	1	-	2	62
13	Prambon	24	27	-	1	5	-	1	-	2	60
14	Taman	78	39	9	3	14	1	5	-	9	158
15	Waru	32	24	4	2	2	-	1	-	3	68
16	Gedangan	31	21	4	2	5	1	3	-	2	69
17	Sedati	95	24	4	4	15	1	4	-	6	153
18	Sukodono	29	17	1	2	3	-	3	-	2	57
TOTAL		724	474	64	46	108	12	45	5	66	1,544

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.

Tabel 4.6. Kondisi Sarana Gedung Sekolah Untuk Setiap Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Sidoarjo

Kondisi	Tahun		
	2010	2011	2012
Baik			
a. SD/MI	71.96	70.56	95.00
b. SMP/MTs	91.02	91.11	94.77
c. SMA/MA/SMK	94.68	95.20	95.24
Rusak Riang/Sedang			
a. SD/MI	16.08	17.61	1.50
b. SMP/MTs	6.63	7.45	2.80
c. SMA/MA/SMK	3.86	3.34	3.50
Rusak Berat			
a. SD/MI	11.96	11.83	3.50
b. SMP/MTs	2.36	1.44	2.46
c. SMA/MA/SMK	1.46	1.46	1.26

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.

Sedangkan kondisi sarana dan prasarana gedung sekolah yang ada masih cukup baik. Meski demikian ada beberapa catatan tentang kondisi sarana gedung sekolah dengan status kerusakan berat untuk 3,50 persen, untuk SLTP rusak besar mencapai 2,46 persen dan untuk SMA/MA/SMK kondisi rusak berat mencapai 1,26 persen. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan khususnya

sarana gedung sekolah terus mendapatkan perbaikan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan kondisi gedung sekolah yang semakin baik.

Kondisi fasilitas kesehatan ditunjang oleh keberadaan Puskesmas di hampir setiap kecamatan yang ada dengan total jumlah 26 puskesmas. Jumlah tenaga medis di Puskesmas mencapai 1.050 personil yang terdiri dari Dokter Umum sebanyak 78 personil, Dokter Gigi sebanyak 34 personil, Tenaga S1 Kesehatan sebanyak 7, Tenaga Bidan Desa sebanyak 353 personil, Tenaga Perawat Kesehatan sebanyak 279 personil, dan tenaga Non-Medis sebanyak 299 personil. Pada tingkat layanan kesehatan di Puskesmas belum tersedia adalah tenaga Dokter Spesialis di hampir setiap puskesmas yang ada.

Tabel 4.7. Kondisi Fasilitas Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo

No.	Kecamatan	Penyebaran Tenaga Kesehatan Pada Puskesmas							Jumlah
		Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	S1 Kesehatan	Bidan Desa	Perawat Kesehatan	Non-Medis	
1	Sidoarjo	0	4	2	0	12	7	14	39
2	Urangagung	0	3	2	0	8	9	7	29
3	Sekardangan	0	4	2	0	3	7	9	25
4	Buduran	0	4	1	0	14	8	13	40
5	Candi	0	3	2	1	22	11	10	49
6	Porong	0	4	2	1	11	18	29	65
7	Kedungsolo	0	1	1	1	10	4	4	21
8	Jabon	0	2	0	0	9	15	10	36
9	Krembung	0	1	1	0	18	11	10	41
10	Tanggulangin	0	2	1	0	19	6	12	40
11	Tulangan	0	2	1	0	14	4	10	31
12	Kepadangan	0	2	1	0	11	7	9	30
13	Taman	0	6	2	1	15	23	17	64
14	Trosobo	0	1	1	0	11	10	7	30
15	Sukodono	0	6	1	0	18	16	14	55
16	Sedati	0	4	1	1	17	10	10	43
17	Waru	0	5	3	1	14	13	10	46
18	Medaeng	0	2	2	0	6	10	8	28
19	Gedangan	0	2	1	0	9	7	9	28
20	Ganting	0	2	1	0	9	4	7	23
21	Krian	0	3	1	0	17	14	19	54
22	Barengkrajan	0	3	1	0	7	7	11	29
23	Tarik	0	3	1	0	19	12	13	48
24	Balombangendo	0	3	1	0	20	12	10	46
25	Wonoayu	0	4	1	1	21	11	11	49
26	Prambon	0	2	1	0	19	23	16	61
TOTAL		0	78	34	7	353	279	299	1,050

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.

Fasilitas kesehatan lainnya adalah keberadaan Rumah Sakit baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Jumlah fasilitas Rumah Sakit di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 13 rumah sakit yang terdiri dari RSUD sebanyak 1 unit, RS Umum sebanyak 10 unit, RSIA sebanyak 1 unit dan RS. Mata sebanyak 1 unit. Ketersediaan fasilitas rumah sakit tersebut memiliki kapasitas 1.452 tempat tidur. Kapasitas tempat tidur paling tinggi disediakan oleh RSUD Sidoarjo dengan kapasitas 579 tempat tidur pasien.

Tabel 4.8. Kondisi Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit di Kabupaten Sidoarjo

No.	Rumah Sakit	Jumlah Kunjungan, Rujukan Rawat dan Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum/Swasta						
		Jenis Rumah Sakit	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Pasien Keluar	Jumlah Pasien Masuk	Jumlah Pasien Keluar Mati (≥48 jam)	Jumlah Hari Rawat	Lama Dirawat
1	RSUD Sidoarjo	Pemerintah	579	32,253	2,100	1,214	117,090	117,735
2	RS. Delta Surya	Umum	124	5,323	79	38	18,980	18,585
3	RS. Anwar Medika	Umum	100	2,762	89	37	12,753	9,991
4	RS. Siti Hajar	Umum	139	3,376	69	29	8,654	9,788
5	RS. Siti Khotijah	Umum	185	6,388	242	95	19,277	21,076
6	Prima Husada	RSIA	25	389	0	0	1,067	1,335
7	Ais Siti Fatimah	Umum	35	1,435	13	0	4,481	2,910
8	RSU. Mawardi	Umum	82	2,841	38	25	26,793	8,931
9	Mitra Keluarga	Umum	25	5,127	88	43	21,936	22,331
10	RSIA Kirana	Umum	25	1,190	0	0	3,195	3,449
11	RSB Buah Delima	Umum	29	690	0	0	1,276	2,555
12	RS Bahayangkara	Umum	75	2,365	28	3	8,412	7,687
13	RSB Pondok Candra	Mata	29	270	0	0	330	330
TOTAL			1,452	64,409	2,746	1,484	244,244	226,703

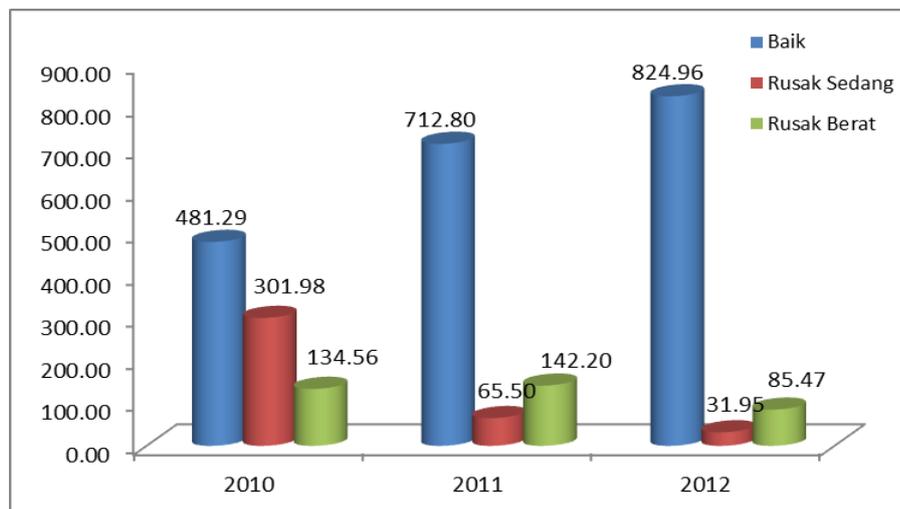
Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013. \

4.3. Kondisi Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pembangunan

Dari pelaksanaan program pembangunan dapat menggambarkan kondisi kinerja pembangunan yang telah tercapai hingga saat ini. Kondisi infrastruktur dan sarana penunjang lainnya merupakan kebutuhan dalam percepatan pembangunan di kawasan Kabupaten Sidoarjo.

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus menyediakan jalan dan jembatan bagi masyarakat. Panjang jalan kabupaten sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan. Dari tahun 2010 panjang jalan yang beraspal di Kabupaten Sidoarjo mencapai 917,83 Km meningkat pada tahun 2012 menjadi 942,38 Km. kondisi jalan juga terus mengalami perbaikan sehingga persentase jalan yang mengalami kerusakan sedang maupun berat semakin berkurang dari tahun ke tahun.

Grafik 4.5. Kondisi Infrastruktur Jalan Beraspal di Kabupaten Sidoarjo

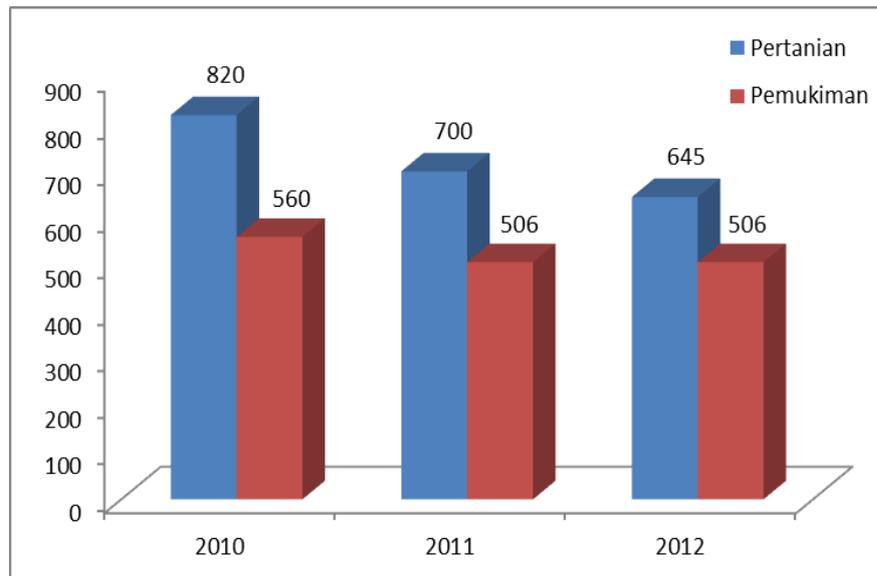


Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, 2012.

Pada tahun 2012 telah dilakukan kegiatan pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah, Pembangunan jalan dan Rehabilitasi / pemeliharaan jalan di beberapa wilayah dengan rincian berikut antara lain: pembangunan Jalan sepanjang 23,425 Km. (Pembangunan jalan ke Tlocor Kecamatan Jabon sepanjang 15,00 Km dan Pembangunan jalan baru kabupaten sepanjang 8,425 Km) dan rehabilitasi / pemeliharaan jalan sepanjang 354,768 Km.

Kebutuhan PJU yang seharusnya dibangun sebanyak 29.000 titik (jumlah ideal titik PJU seluruh kabupaten Sidoarjo).Kebutuhan ini dihitung sesuai dengan panjang poros jalan yang ada yang seharusnya dibangun.Sampai dengan tahun 2011 jumlah PJU yang telah dibangun sebanyak 17.744 titik, sedangkan realisasi PJU yang tersedia di tahun 2012 sebanyak 19.482 titik.

Pada tahun 2012 Luas daerah genangan di Kabupaten Sidoarjo seluas 1.151 Ha, mengalami penurunan seluas 55 Ha (4,56%) apabila dibandingkan dengan daerah genangan tahun 2011 seluas 1.206 Ha. Penurunan dimaksud secara umum terdapat di areal pertanian dan wilayah permukiman.Kejadian genangan pada areal pertanian mengalami penurunan karena adanya operasional pintu air yang tepat, normalisasi saluran afvoer, perbaikan pintu air di afvoer dan ketepatan dalam manajemen pengelolaan air.Sedangkan luas areal genangan pada wilayah permukiman 506 Ha.Dibandingkan dengan tahun 2011, luas genangan tetap, tetapi lama genangan berkurang.Untuk mengatasi genangan khususnya di wilayah permukiman dilakukan dengan upaya terpadu dan terkoordinasi dalam hal mengalirkan air dari drainase permukiman menuju drainase (saluran pembuang) utama, sehingga air yang tergenang dapat mengalir pada saluran yang tersedia, dengan melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sistem pintu air dan boezem.

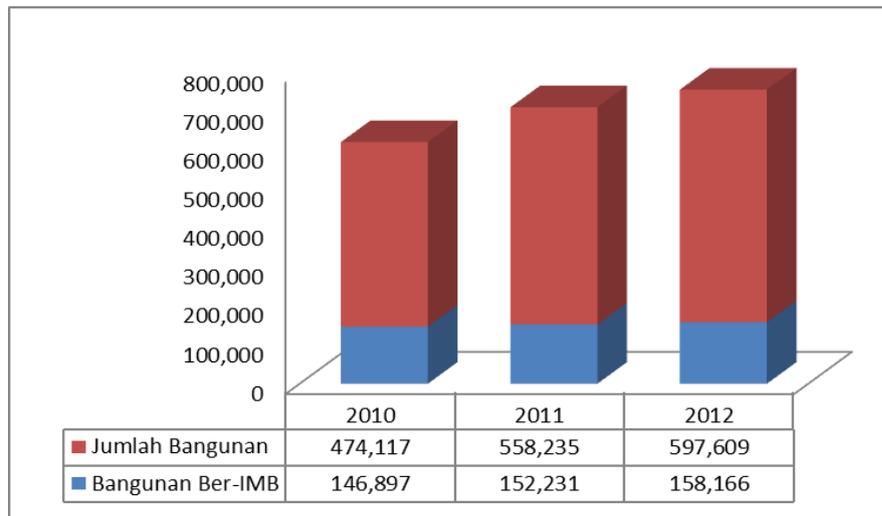
Grafik 4.6. Kondisi Genangan (Ha) Berdasar Area di Kabupaten Sidoarjo

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, 2012.

Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian diukur sampai sejauhmana daerah irigasi teknis yang dapat dipertahankan keberadaannya. Pada tahun 2012 luas areal yang dapat diairi melalui jaringan irigasi seluas 22.688 Ha, yang terdiri dari jaringan Irigasi Mangetan Kanal mencapai 11.977 Ha dan jaringan Irigasi Primer Porong Kanal mencapai 10.711 Ha. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 seluas 22.776 terjadi penurunan seluas 88 hektar. Penurunan luas baku sawah dari tahun ke tahun terjadi karena adanya perubahan tata guna lahan (mutasi baku sawah) dari areal persawahan menjadi kawasan perumahan, industri maupun pergudangan.

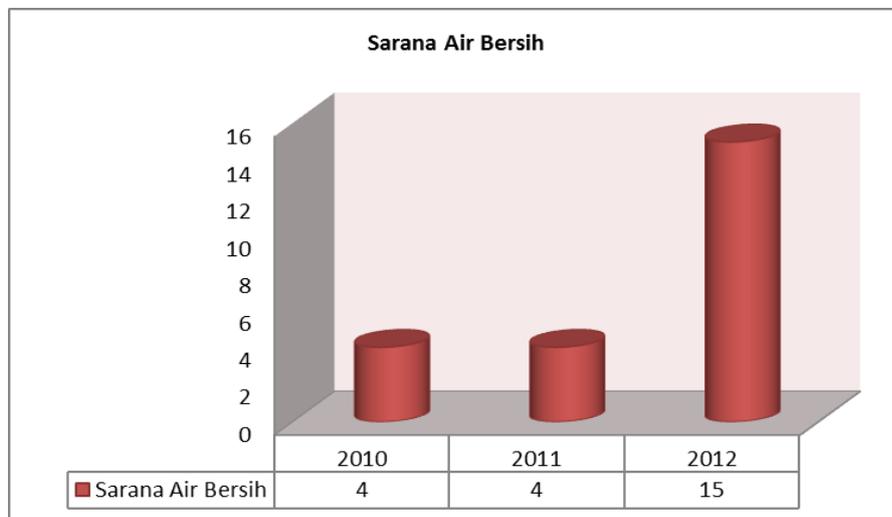
Kondisi bangunan yang ber-IMB di Kabupaten Surabaya menunjukkan perbaikan, artinya semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam kepemilikan bangunan ber-IMB. Pada tahun 2012 jumlah bangunan mencapai 597.609 unit dan yang telah ber-IMB mencapai 158.166 unit.

Grafik 4.7. Kondisi Bangunan Ber-IMB di Kabupaten Sidoarjo



Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, 2012.

Grafik 4.8. Jumlah Sarana Air Bersih di Kabupaten Sidoarjo



Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, 2012.

Dari 576.368 Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo, 105.000 Rumah Tangga telah terlayani oleh PDAM Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan yang tertangani oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang sebanyak 2.666 Rumah Tangga, selebihnya sebanyak 471.368 Rumah Tangga belum terlayani. Dengan semakin banyaknya sarana air bersih yang ada di masyarakat diharapkan masyarakat dapat memeliharanya dan pemenuhan kebutuhan akan air bersih

khususnya dapat lebih luas terjangkau sehingga kesehatan masyarakat dan lingkungan menjadi lebih baik.

Panjang jalan lingkungan yang dibangun pada tahun 2012 mencapai 43.232 meter lari, sehingga sampai dengan tahun 2012 sepanjang 142.252 meter lari. Pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan dan kemampuan anggaran pemerintah. Dengan dibangunnya jalan lingkungan ini diharapkan lingkungan dapat lebih tertata rapi dan masyarakat dapat lebih nyaman menjalankan aktifitas di lingkungannya. Perkembangan jalan lingkungan yang dibangun di tahun 2012 meningkat 6.302 meter.

Grafik 4.9. Perkembangan Panjang Jalan Lingkungan di Kabupaten Sidoarjo



Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, 2012.

Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2012 telah dialokasikan anggaran mencapai Rp. 234.786.679.870,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 201.144.209.141,- atau 85,67 persen.

Tabel 4.9. Anggaran dan Realisasi Program Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012

SKPD	Program	Anggaran	Realisasi	%
Dinas PU Bina Marga	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,354,458,000	1,163,193,375	85.88
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,666,970,000	3,340,113,150	91.09
	Peningkatan Disiplin Aparatur	14,550,000	12,145,000	83.47
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	161,125,000	149,524,200	92.80
	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17,400,000	6,647,000	38.20
	Pembangunan jalan dan jembatan	12,645,307,436	8,613,140,500	68.11
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	24,484,159,803	22,843,037,300	93.30
	Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	608,096,000	569,439,000	93.64
	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	53,484,749,625	48,389,348,000	90.47
	Rehabilitasi/pemeliharaan saluran dan trotoar	6,625,875,000	1,312,922,000	86.93
	Pembangunan Saluran dan trotoar	1,672,175,000	1,312,922,000	78.52
	Pengembangan sistem informasi/database jalan dan jembatan	811,300,000	760,829,000	93.78
Dinas PU Pengairan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,429,977,320	1,244,438,667	87.03
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,009,681,400	1,785,970,070	88.87
	Peningkatan Disiplin Aparatur	175,995,000	169,697,900	96.42
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	303,750,000	258,713,800	85.17
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	40,000,000	32,769,500	81.92
	Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1,872,250,000	1,640,946,000	87.65
	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	20,557,559,978	17,312,734,900	84.22
	Pengendalian Banjir	17,988,250,780	15,314,494,100	85.14
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	Pendidikan Menengah	13,256,330,000	11,432,283,700	86.24
	Peningkatan Pasar	4,471,252,540	4,019,840,100	89.90
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	10,472,542,000	7,983,052,817	76.23
	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu	500,000,000	472,153,800	94.43
	pembangunan infrastruktur perdesaaan	249,100,000	163,297,500	65.55
	Perencanaan tata ruang	784,775,000	725,321,000	92.42
	Pengendalian pemanfaatan ruang	2,197,586,000	2,117,325,000	96.35
	Program pelayanan administrasi	916,616,000	819,075,326	89.36

SKPD	Program	Anggaran	Realisasi	%
	perkantoran			
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	20,041,568,316	18,724,174,201	93.24
	Program peningkatan disiplin aparatur	10,230,000	9,920,000	96.97
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	120,000,000	110,600,000	92.17
	Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan	225,000,000	214,863,050	95.49
	Pengembangan perumahan	6,043,665,430	4,766,975,000	78.88
	Lingkungan sehat perumahan	25,574,384,242	23,352,302,185	91.31
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2012		234,786,679,870	201,144,209,141	85.67

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, 2012.

Realisasi kinerja pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum ini dapat tercapai karena didukung dengan struktur anggaran yang cukup memadai. Artinya jumlah APBD Kabupaten Sidoarjo dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan untuk setiap SKPD yang ada. Pendapatan daerah adalah gambaran kemampuan daerah dalam membiayai seluruh aktivitasnya. Pendapatan daerah terdiri dari PAD, Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan yang dianggarkan untuk tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp. 2.284.511.936.806,-, terealisasi sebesar Rp. 2.317.444.096.384,41 atau naik sebesar 28,89%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 1.647.833.481.145,32,- dan 2011 sebesar Rp.2.005.191.397.714,27 maka rata-rata pendapatan daerah meningkat sebesar 15 persen sampai dengan 20 persen setiap tahunnya. Peningkatan pendapatan daerah yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menghimpun dana bagi pembangunan daerah telah berjalan dengan baik sehingga percepatan pembangunan daerah cepat terwujud.

Kinerja keuangan yang lain adalah kemampuan daerah untuk mendistribusikan dan mengalokasikan dana yang diperoleh dalam bentuk belanja untuk kepentingan publik. Kinerja keuangan yang lain adalah kemampuan daerah untuk mendistribusikan dan mengalokasikan dana yang

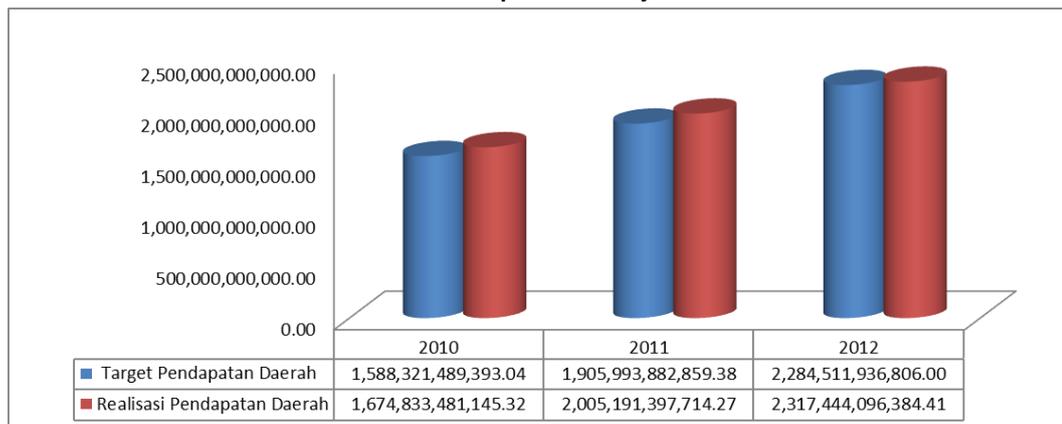
diperoleh dalam bentuk belanja untuk kepentingan publik. Belanja daerah pada tahun 2012 terealisasi sebesar Rp. 2.238.524.285.888,37 atau 87,26% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.565.342.909.483,71. Apabila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya terjadipeningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011 meningkat sebesar 10,93 persen, dari tahun 2011 ke tahun 2012 meningkat sebesar 22,46 persen. Dari tahun ketahun realisasi penyerapan belanja terbesar pada belanja tidak langsung yang rata-rata sebesar 80 persen bahkan pada tahun 2012 sudah mencapai 90 persen, sedangkan untuk penyerapan belanja langsung (belanja Program/Kegiatan yang terukur langsung indikatornya) hanya rata – rata 70 persen.

Tabel 4.10. Perkembangan Kondisi Anggaran Daerah di Kabupaten Sidoarjo

ANGGARAN DAERAH	Target			Persentase		
				Target		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Pendapatan Daerah	1,588,321,489,393.04	1,905,993,882,859.38	2,284,511,936,806.00	105.45	105.16	101.44
Belanja Daerah	1,698,329,944,563.66	2,093,437,864,285.53	2,565,342,909,483.71	93.29	87.32	87.26
ANGGARAN DAERAH	Realisasi			Persentase		
				Realisasi		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Pendapatan Daerah	1,674,833,481,145.32	2,005,191,397,714.27	2,317,444,096,384.41	122.92	121.63	115.62
Belanja Daerah	1,584,364,436,412.19	1,828,757,388,074.71	2,238,524,285,888.37	122.92	110.93	81.66

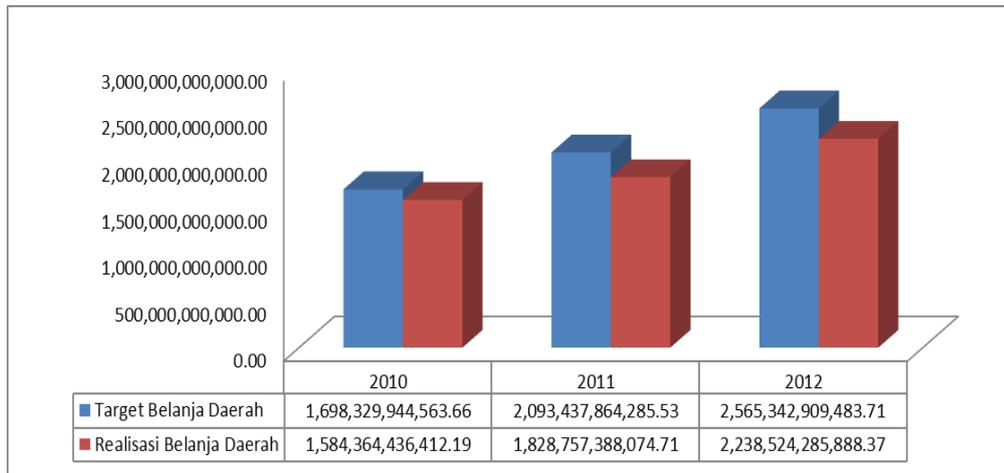
Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, 2012.

Grafik 4.10. Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Sidoarjo



Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, 2012.

Grafik 4.11. Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo



Sumber: LKPI Bupati Kabupaten Sidoarjo, 2012.

4.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2015, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2015. Dalam dokumen RPJM Kabupaten Sidoarjo 2011 – 2015 juga telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Visi: “Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan”

Misi I:						
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global						
Tujuan		Sasaran		Srategi	Kebijakan Umum	
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)	1	Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat.	1	Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat
2	Peningkatan daya saing bidang sumber daya manusia	2	Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat		2	Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat
		3	Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat		3	Peningkatan daya saing sumber daya manusia
		4	Peningkatan produktivitas sumberdaya manusia		4	Peningkatan daya beli masyarakat
					5	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk

Misi II						
Menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, UMKM, Koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat						
Tujuan		Sasaran		Srategi	Kebijakan Umum	
1	Peningkatan potensi dan daya saing daerah	1	Peningkatan daya saing sektor UMKM dan koperasi	Pembangunan ekonomi sinergis dengan potensi daerah secara berkelanjutan meliputi industri, perdagangan, jasa, pertanian berbasis agrobis, meningkatkan daya saing usaha kecil menengah dan koperasi, serta pengembangan sektor pariwisata	1 Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor UMKM dan koperasi, pariwisata, industri perdagangan, jasa dan pertanian pada PDRB melalui peningkatan daya saing	
2	Peningkatan pertumbuhan ekonomi	2	Peningkatan pertumbuhan sektor industri, perdagangan, jasa, dan pertanian berbasis agrobis.			
Misi III:						
Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban						
Tujuan		Sasaran		Srategi	Kebijakan Umum	
1	Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian dan beriman	1	Terwujudnya masyarakat beriman dan berkepribadian	Meningkatkan modal social, kegiatan social dan ketertiban masyarakat	1	Peningkatan modal social pembangunan
		2	Peningkatan Kepribadian Masyarakat		2	Peningkatan ketertiban masyarakat melalui penegakan supremasi hukum secara konsisten dan keberlanjutan
Misi IV:						
Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender						
Tujuan		Sasaran		Srategi	Kebijakan Umum	
1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan	1	Peningkatan peran sertadan inovasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan gender	1	Peningkatan pemerataan pembangunan masyarakat
		2	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai aspek		2	Peningkatan peranan wanita dalam pembangunan
Misi V:						
Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima						

Tujuan		Sasaran		Srategi	Kebijakan Umum	
1	Peningkatan transparansi, profesionalisme dan produktivitas aparatur	1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan sistem yang adil dan merata	Meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui peningkatan sistem pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta profesionalisme aparatur	1	Peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan melalui public service excellence
2	Peningkatan pelayanan publik	2	Pengembangan budaya pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi		2	Peningkatan produktivitas aparatur
					3	Pengembangan budaya pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi
					4	Pengembangan pengelolaan SDM pemerintahan berbasis kompetensi
					5	Pengembangan data dan sistem IT pendukung pelayanan umum
					6	Pengelolaan tata laksana pemerintahan secara efektif
Misi VI:						
Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat						
Tujuan		Sasaran		Srategi	Kebijakan Umum	
1	Peningkatan investasi yang berdaya dukung tinggi	1	Terwujudnya iklim inestasi yang kondusif	Meningkatkan investasi melalui pembangunan infrastruktur daerah dan pengembangan iklim investasi	1	Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah
2	Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah	2	Peningkatan investasi baik PMA maupun PMDN		2	Pengebangan investasi berdaya dukung tinggi
					3	Pengembangan sumber-sumber dana pembangunan
Misi VII:						
Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan						
Tujuan		Sasaran		Srategi	Kebijakan Umum	
1	Peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup	1	Peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup melalui penurunan tingkat pencemaran dan pengrusakan lingkungan	Pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan	1	Peningkatan efektifitas penanganan bencana
		2	Peningkatan keindahan dan kenyamanan kota		2	Optimalisasi pelestarian dan kualitas lingkungan hidup
Misi VIII:						

Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	
1	Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang kondusif dan peningkatan peran serta masyarakat dalam berpolitik	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik dan pengembangan iklim demokrasi yang sehat	1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berpolitik
			2	Peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

Sumber: LAPKIP Bupati Kabupaten Sidoarjo, 2012.

Dalam konteks implementasi dari Misi ke-VI dari pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, maka strategi dan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo adalah meningkatkan investasi melalui pembangunan infrastruktur daerah dan pengembangan iklim investasi. Infrastruktur daerah menjadi penopang pertumbuhan pembangunan daerah. Sasaran "Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah" dilakukan melalui beberapa upaya sebagai berikut: (1). Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum; (2). Meningkatnya prasarana dasar masyarakat; dan (3). Meningkatnya kualitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhansarana dan prasarana transportasi.

Indikator kinerja dan SKPD yang menjadi leading sektor dalam implementasi dari strategi dan arah kebijakan optimalisasi infrastruktur pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11. Indikator Pembangunan dan SKPD Dalam Tupoksi Optimalisasi Infrastruktur Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo

No.	Urusan	Indikator	SKPD	
1	Pekerjaan Umum	1	Kondisi Jalan dan Jembatan	Dinas PU Bina Marga
		2	Ketersediaan PJU bagi masyarakat	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		3	Luas daerah genangan	Dinas PU Pengairan

No.	Urusan	Indikator	SKPD
		4 Luas areal dengan irigasi teknis	Dinas PU Pengairan
2	Perumahan	1 Jumlah sarana air bersih yang dibangun	Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang
		2 Jalan lingkungan yang telah terbangun	Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang
		3 Jumlah kejadian kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Perhubungan	1 Peningkatan Jumlah Uji KIR	Dinas Perhubungan
		2 Jumlah sarana dan prasarana transportasi	Dinas Perhubungan
		3 Perkembangan perpanjangan ijin trayek angkutan pedesaan	Dinas Perhubungan
		4 Terwujudnya Sistem Transportasi yang handal	Dinas Perhubungan
		5 Tingkat Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan

Sumber: LAPKIP Bupati Kabupaten Sidoarjo, 2012.

4.5. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya merupakan salah satu SKPD di jajaran pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasar Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perumahan Keuda Atas Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang adalah:

Unsur pelaksana pemerintah daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo adalah:

Melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pelaksanaan pekerjaan umum Cipta Karya dan Tata Ruang

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
4. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Visi-Misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo adalah:

Visi: Mewujudkan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang “Sehat, Handal, Tertib dan Berkelanjutan “ didukung Good Governance.

Misi:

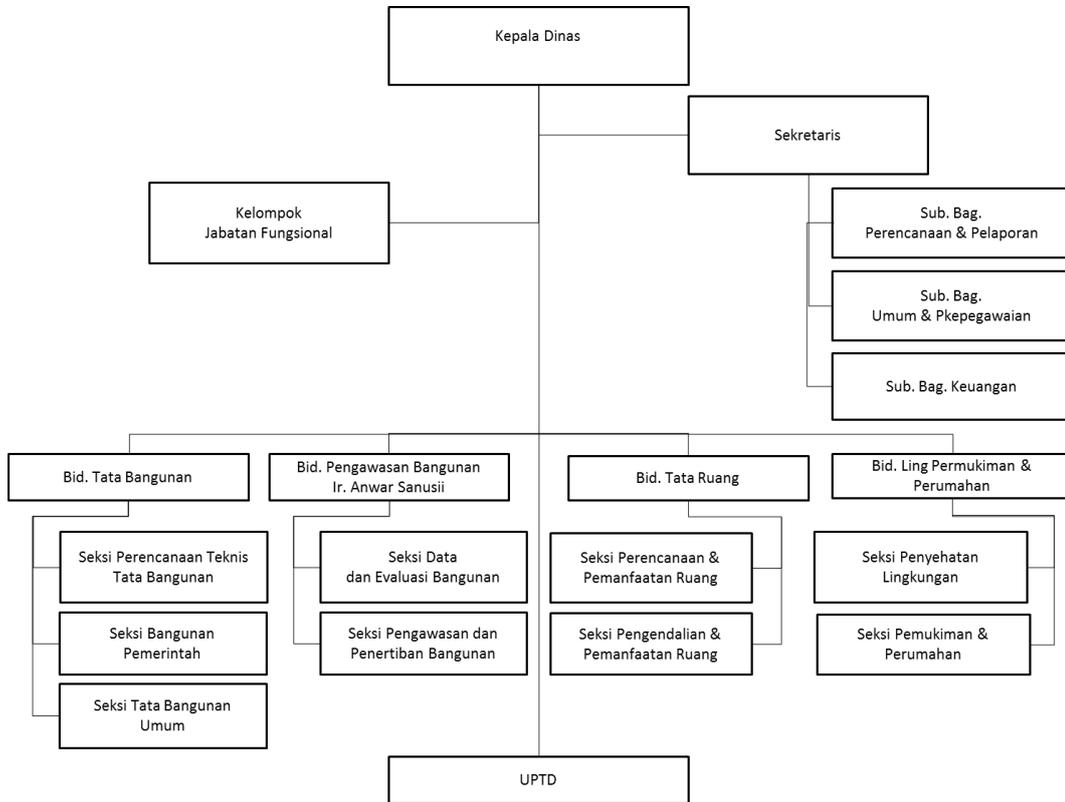
1. Meningkatkan kualitas pembangunan rumah layak huni, sanitasi lingkungan dan infrastruktur perdesaan / perkotaan;
2. Meningkatkan pembinaan, penataan tata bangunan dan lingkungan serta kehandalan bangunan gedung;
3. Mengoptimalkan kinerja pengawasan dan penertiban bangunan serta pembinaan jasa konstruksi;
4. Meningkatkan Efektifitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi tersebut didukung dengan struktur organisasi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Struktur organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretarian, terdiri dari:
 - a. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub. Bagian Keuangan
3. Bidang Tata Bangunan, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Tata Bangunan
 - b. Seksi Tata Bangunan Pemerintahan
 - c. Seksi Tata Bangunan Umum
4. Bidang Pengawasan Bangunan, terdiri dari:

- a. Seksi Data dan Evaluasi Bangunan
- b. Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan
5. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang
 - b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyehatan Lingkungan
 - b. Seksi Permukiman dan Perumahan
7. UPTDinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4.2. Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
(Berdasar Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 60 Tahun 2012)



Sumber: Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dina

Jumlah personil dalam struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sebanyak 62 personil yang terdiri dari 56 personil berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 personil dengan status Pegawai Kontrak. Pada jabatan structural dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.12. Personalia Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

No.	Jabatan	Nama	Pangkat	Gol.	NIP.
1	Kepala Dinas	Ir. Dwidjo Prawito, M.MT.	Pembina Utama Muda	VI c	19651012 199202 1 001

No.	Jabatan	Nama	Pangkat	Gol.	NIP.
2	Sekretaris	Dra. Yayuk Ratnawati	Pembina Tingkat I	VI b	19650302 199002 2 010
	a. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Drs. Eko Budiarto	Penata Tingkat I	III d	19600211 198802 1 003
	b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Lilis Nuryani, SH	Penata Tingkat I	III d	19671217 199302 2 001
	c. Sub. Bagian Keuangan	Rinik Widowati, BcKn.	Penata Tingkat I	III d	19610405 198503 2 009
3	Bidang Tata Bangunan	Ir. Yudhi Kartikawan, MT.	Penata Tingkat I	III d	19680417 199801 1 008
	a. Seksi Perencanaan Teknis Tata Bangunan	Khoiri Endik Wiyanto	Penata	III c	19590107 198403 1 013
	b. Seksi Tata Bangunan Pemerintahan	Samsul Arifin, ST.	Penata	III c	19610526 198710 1 001
	c. Seksi Tata Bangunan Umum	Sudi Waluyo	Penata	III c	19590609 198508 1 001
4	Bidang Pengawasan Bangunan	Ir. Anwar Sanusi	Pembina	VI a	19640917 199312 1 001
	a. Seksi Data dan Evaluasi Bangunan	Nur Chasan, SE.	Penata Muda Tingkat I	III b	19670104 198903 1 006
	b. Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan	Juniyanti Rochyantine, ST	Penata	III c	19740623 199901 2 001
5	Bidang Tata Ruang	Ir. Dian Wahjuningsih, M.Sc.	Pembina Tingkat I	IV b	19580626 198903 2 003
	a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang	Soebandi, ST.	Penata	III c	19591106 198502 1 001
	b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Subandi, S.Sos.	Pembina Tingkat I	III d	19630304 199111 1 001
6	Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan	Ir. Irwan Irzani, MT.	Pembina	IV a	19661223 199208 1 001
	a. Seksi Penyehatan Lingkungan	Tri Widodo S., ST.	Pembina Tingkat I	III d	19670511 199602 1 001
	b. Seksi Permukiman dan Perumahan	Waluyani Retna D., ST.	Penata Tingkat I	III d	19731013 199803 2 006
7	UPTD				
	a. UPTD Rusunawa	Agus Priyanto, SH.	Penata Tingkat I	III d	19631109 198803 1 007
	b. UPTD Buzem dan Rumah Pompa				

Sumber: Profil Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

**Tabel 4.13. Nama dan Status Kepegawaian
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo**

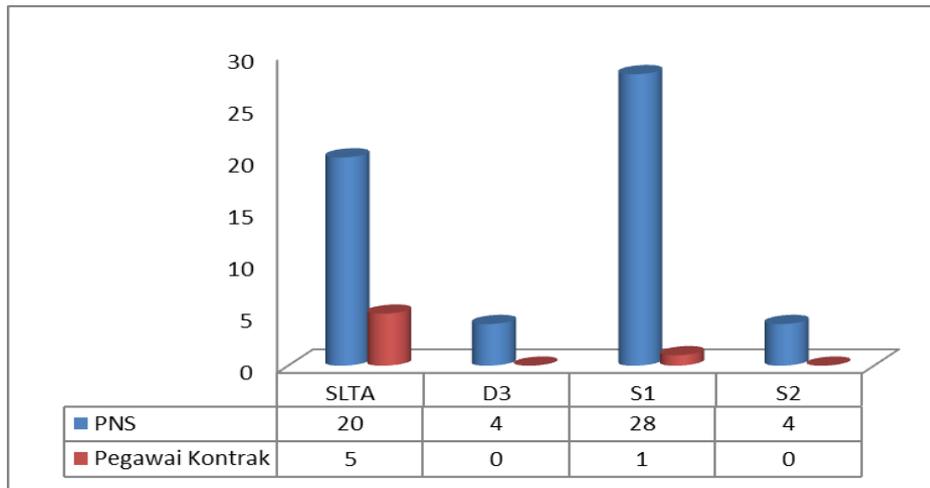
No.	Nama	Keterangan
1	Ir. Dwidjo Prawito,	Kepala Dinas
2	Dra. Yayuk Ratnawati, MA.	Sekretaris
3	Ratna Yoeliani, S.Sos.	Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
4	Lilis Nuryanti, SH.,MA.	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
5	Rinik Widowati, Bc.Kn.	Sub. Bagian Keuangan
6	Rachmawati, S.Sos.	Bendahara Penerima Barang
7	M. Sutoyo, S.Sos.	Bendahara Pengeluaran
8	Lismono	Bendahara Pengusu Barang
9	Heri Dwi Susetyo	Bendahara Gaji
10	Nur Salim, ST.	Pembantu Bendahara Pengeluaran
11	Desi Kusumawardhani, SE.	Pembuat Daftar Gaji
12	Ir. Yudhi Kartikawan, MT.	Kepala Bidang Tata Bangunan
13	Khoiri Endik Wiyanto	Sie. Tata Bangunan Umum
14	Ika Sari Dewi, ST.	Sie. Perencanaan Teknis Tata Bangunan
15	Samsul Arifin, ST.	Sie. Tata Bangunan Pemerintahan
16	Ir. Anwar Sanusi	Kepala Bidang Pengawasan Pembangunan
17	Aris Hidayat, ST., M.Si.	Sie. Pengawasan dan Penertiban Bangunan
18	Nur Chasan, SE.	Sie. Data dan Evaluasi Bangunan
19	Ir. Yanuar Santosa, MT.	Kepala Bidang Tata Ruang
20	Juniyanti Rochyantie, ST.	Sie. Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang
21	Subandi, S.Sos.	Sie. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
22	Ir. Irwan Irzani, MT.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan
23	Soebandi, ST.	Kasi. Permukiman dan Perumahan
24	Tri Widodo S., ST.	Kasi. Penyehatan Lingkungan
25	Agus Fathurrohman, Amd.	Staf Administrasi
26	Sutris	Staf Tata Bangunan
27	Asri Widowati, ST.	Staf Tata Bangunan
28	Yudi Afianto, Amd.	Staf Tata Bangunan
29	M. Bayu Seto K.W., Amd.	Staf Tata Bangunan
30	Eko Purwo Wahyu W.	Staf Tata Bangunan
31	Subchan Andriansyah, ST.	Staf Tata Bangunan
32	Mushammad Lutfi, ST.	Staf Tata Bangunan
33	Irwan Saptoady	Staf Pengawasan Pembangunan
34	Saiful Ary Iswanto	Staf Pengawasan Pembangunan
35	Siti Romlah	Staf Pengawasan Pembangunan
36	Rahmad Hendrawanto	Staf Pengawasan Pembangunan
37	Hariyono	Staf Pengawasan Pembangunan
38	Wahib Achmadi, ST.	Staf Pengawasan Pembangunan
39	Diana Wulansari, ST.	Staf Pengawasan Pembangunan
40	Kamalia Syafwati, ST.,MT.	Staf Tata Ruang
41	Ayom Sukondo	Staf Tata Ruang
42	Nawang Wulan, ST.	Staf Tata Ruang
43	Nanda Novantara M., Amd.	Staf Tata Ruang

No.	Nama	Keterangan
44	M. Sudaryanto	Staf Tata Ruang
45	Slamet Sugiono	Staf Tata Ruang
46	Slamet Budiarto, ST.	Staf Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
47	Agus Gunawan, Amd.	Staf Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
48	Dilar Darmawan, ST.	Staf Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
49	Susilo Indrayati, ST.	Staf Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
50	Hilman Hafidy, ST.	Staf Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
51	Eva Kurnia, ST.	Staf Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
52	Reni Wijastuti	Staf Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
53	Sudarmadji	Staf Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
54	Bayu Hadi Prasetyo	Staf Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
55	Endik Churniawan	Kontrak Sekretariat
56	Nur Huda	Kontrak Tata Bangunan
57	Khotibul Umam	Kontrak Pengawasan Bangunan
58	Rochman	Kontrak Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
59	Gogot Eko S.	Kontrak Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
60	M. Akson	Honorar Sekretariat
61	Budi Hari Santoso	Honorar Sekretariat
62	Adek Zulkarnaen	Honorar Tata Bangunan
63	Sahlan	Honorar Tata Bangunan
64	Moh. Nurzaki	Honorar Tata Bangunan
65	Ismail	Honorar Pengawasan Bangunan
66	Anton Sukoco	Honorar Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan

Sumber: LPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, 2013.

Tingkat pendidikan aparatur pemerintah daerah di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh personil dengan jenjang pendidikan S1 yang mencapai 28 orang sedangkan untuk jenjang pendidikan S2 dimiliki oleh 4 personil.

Grafik 4.12. Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Profil Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

BAB 5

INOVASI KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO

5.1. Inovasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

Kinerja SKPD pemerintah daerah dapat dijelaskan melalui pendekatan capaian kinerja yang dilihat dari kesesuaian antara indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan realisasi program dan kegiatan dalam 1 periode laporan. Untuk menjelaskan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dalam indikator capaian kinerja dalam RENSTRA (Rencana Strategik) dengan capaian kinerja dalam LAPKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Dalam kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek sarana penunjang, aspek layanan dan aspek anggaran. Analisa terhadap aspek-aspek tersebut akan menggambarkan lebih menyeluruh capaian kinerja sekaligus akan menggambarkan tantangan dan hambatan pada setiap aspek untuk dirumuskan dalam kebijakan peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.

5.1.1. Kinerja Kelembagaan

Kinerja kelembagaan dapat dijelaskan melalui tiga aspek, yakni: 1) tugas, pokok dan fungsi dinas, 2) sasaran strategis kegiatan dan indikator capaian serta alokasi anggaran, dan 3) dukungan sumberdaya aparatur dinas.

5.1.1.1. Tugas, Pokok, dan Fungsi Dinas

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, maka rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2011, sebagai berikut:

- 1) Bidang Sekretariat
 - a. Tugas Sekretariat adalah:

Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum kepegawaian dan keuangan.
 - b. Fungsi Sekretariat adalah:
 - a) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis.
 - b) Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
 - c) Pengelolaan administrasi keuangan.
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
 - c. Tugas Sub. Bidang Perencanaan dan Pelaporan adalah:
 - a) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan teknis.
 - b) Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perijinan (*front office*) dan pengaduan masyarakat di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.
 - c) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas.
 - d) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
 - d. Tugas Sub. Bidang Umum dan Kepegawaian adalah:
 - a) Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.
 - b) Melaksanakan pengelolaan barang.

- c) Melaksanakan administrasi kepegawaian.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Tugas Sub. Bidang Keuangan adalah:
 - a) Menyusun rencana kebutuhan anggaran.
 - b) Mengelola administrasi keuangan.
 - c) Menyusun laporan pengelolaan keuangan.
 - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Bidang Tata Bangunan
 - a. Tugas Bidang Tata Bangunan adalah:

Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang tata bangunan
 - b. Fungsi Tata Bangunan adalah:
 - a) Melaksanakan tugas dibidang tata bangunan.
 - b) Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan, teknis tata bangunan, tata bangunan pemerintahan dan tata bangunan umum.
 - c) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang perencanaan teknis Tata Bangunan Pemerintahan dan Tata Bangunan Umum.
 - d) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang perencanaan teknis tata bangunan, tata bangunan pemerintah dan tata bangunan umum.
 - e) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan teknis tata bangunan, tata bangunan pemerintah dan tata bangunan umum.
 - f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
 - c. Tugas Seksi Perencanaan Teknis Tata Bangunan adalah:

- a) Menyiapkan penyusunan program dan perencanaan teknis tata bangunan.
 - b) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan tata bangunan.
 - c) Melaksanakan perencanaan teknis dan bantuan teknis perencanaan bangunan gedung Negara/pemerintah.
 - d) Melaksanakan klarifikasi atas perencanaan gambar dan bestek serta RAB untuk pelaksanaan pembangunan bangunan baru, renovasi, rehabilitasi, dan perawatan bangunan gedung Negara/pemerintah daerah.
 - e) Melaksanakan klarifikasi atas perencanaan bangunan umum.
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Tugas Seksi Tata Bangunan Pemerintah adalah:
- a) Menyiapkan penyusunan program tata bangunan pemerintah.
 - b) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis tata bangunan pemerintah.
 - c) Melaksanakan pendataan/inventarisasi bangunan gedung Negara/pemerintah daerah.
 - d) Melaksanakan pembangunan bangunan baru, renovasi rehabilitasi dan perawatan bangunan pemerintah daerah.
 - e) Melaksanakan pendaftaran, penaksiran dan pemeriksaan terhadap keamanan dan keselamatan bangunan gedung pemerintahan.
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Tugas Seksi Tata Bangunan Umum adalah:
- a) Menyiapkan penyusunan program tata bangunan umum.

- b) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis tata bangunan umum.
 - c) Melaksanakan pemeriksaan keamanan dan keselamatan bangunan.
 - d) Melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan gedung-gedung umum.
 - e) Melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
 - f) Memproses penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan.
 - g) Memproses penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.
 - h) Melaksanakan ketatausahaan bidnag tata bangunan.
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Bidang Pengawasan Bangunan
- a. Tugas Bidang Pengawasan Bangunan adalah:
Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengawasan bangunan.
 - b. Fungsi Bidang Pengawasan Banunan adalah:
 - a) Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang data dan evaluasi bangunan, pengawasan dan penertiban bangunan.
 - b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang data evaluasi bangunan, pengawasan dan penertiban bangunan.
 - c) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang data dan evaluasi bangunan, pengawasan dan penertiban bangunan.
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- c. Tugas Seksi Data dan Evaluasi Bangunan adalah:
 - a) Menyiapkan penyusunan program data dan evaluasi.
 - b) Menyiakan bahan koordinasi dan pelaksanaan pendataan dan evaluasi.
 - c) Mengumpulkan pendataan, analisa dan dokumentasi data bangunan.
 - d) Melaksanakan klarifikasi dan mendokumentasikan data bangunan.
 - e) Melaksnakan pembinaan bahan usaha dan melaksanakan proses perijinan serta koordinasi serifikasi jasa konstruksi.
 - f) Melaksanakan ketatausahaan bidnag pengawasan bangunan.
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuaid engan bidang tugasnya.
- d. Tugas Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan adalah:
 - a) Menyiapkan penyusunan program pengawasan dan penertiban bangunan.
 - b) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan.
 - c) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pendirian bangunan.
 - d) Menyusun kebijaksanaan teknis pengendalian program.
 - e) Memberikan pertimbangan teknis terhadap penerbitan IMB.
 - f) Melaksanakan penelitian dan loporan terhadap pendirian bangunan yang tidak dilengkapi perijinan.
 - g) Melaksanakan pengusutan dan usulan pembongkaran bangunan liar, menampung dan menganalisa sengketa bangunan untuk bahan keputusan yang berwenang.
 - h) Melaksanakan penertiban pelestraian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidng tugasnya.
- 4) Bidang Tata Ruang
- a. Tugas Bidang Tata Ruang adalah:
Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang penataan ruang.
 - b. Fungsi Bidang Tata Bangunan adalah:
 - a) Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang.
 - b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang.
 - c) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang.
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
 - e) Tugas Seksi Perencanaan dan Tata Ruang adalah:
 - f) Menyiapkan penyusunan program perencanaan dan pemanfaatan ruang suatu kawasan.
 - g) Memaduserasikan penyusunan perencanaan dan pemanfaatan ruang suatu kawasan dengan keawasan lainnya.
 - h) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, supervise dalam penyusunan rencana rinci/rencana teknis tata ruang suatu kawasan termasuk legalitasnya.
 - i) Melaksanakan revisi penyusunan rencana rinci/rencana teknis tata ruang suatu kawasan.
 - j) Melaksanakan verifikasi teknis terhadap rencana rinci/rencana teknis tata ruang suatu kawasan.

- k) Melaksanakan verifikasi teknis terhadap rencana tapak/siteplan suatu lokasi/kawasan yang akan dimanfaatkan untuk perumahan, industry, jasa dan perdagangan.
 - l) Melaksanakan pendataan, survey, pemetaan dan investigasi data untuk rencana dan pemanfaatan ruang suatu kawasan.
 - m) Menganalisa data dan mengkaji permasalahan terkait dengan perencanaan dan pemanfaatan ruang serta memberikan alternative pemecahannya.
 - n) Memfasilitasi pembinaan teknis dan peningkatan SDM dalam perencanaan dan pemanfaatan tata ruang.
 - o) Melaksanakan penyusunan sistem informasi manajemen pemanfaatan perencanaan dan pemanfaatan ruang.
 - p) Mensosialisasikan produk rencana rinci/perencanaan teknis tata ruang.
 - q) Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan hasil perencanaan dan pemanfaatan ruang.
 - r) Melaksanakan tugas ketatausahaan bidnag tata ruang.
 - s) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- c. Tugas Seksi pengendalian pemanfaatan Ruang adalah:
- a) Menyiapkan penyusunan program pengendalian pemanfaatan ruang suatu kawasan.
 - b) Melaksanakan penyusunan, kebijakan, rposedur, dan manual pengendalian pemanfaatan ruang.
 - c) Melaksanakan pendataan, survey, pemetaan dan investigasi data untuk pengendalian pemanfaatan ruang suatu kawasan.
 - d) Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - e) Memberikan arahan teknis dalam proses pemberian rekomendasi perijinan tata ruang.

- f) Melaksanakan penyusunan peraturan zonasi untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
 - g) Mensosialisasikan produk kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - h) Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan hasil pengendalian pemanfaatan ruang.
 - i) Memfasilitasi pembinaan teknis dan peningkatan SDM dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
 - j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- 5) Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan
- a. Tugas Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan adalah:
Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyehatan lingkungan permukiman dan perumahan.
 - b. Fungsi Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan adalah:
 - a) Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang penyehatan lingkungan, permukiman dan perumahan.
 - b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang penyehatan lingkungan, permukiman dan perumahan.
 - c) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang penyehatan lingkungan, permukiman dan perumahan.
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
 - e) Tugas Seksi Penyehatan Lingkungan adalah:
 - f) Menyiapkan penyusunan program dan koordinasi terhadap penyehatan lingkungan.

- g) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyehatan lingkungan.
 - h) Menyusun sistem informasi pelayanan penyehatan lingkungan.
 - i) Menyusun standart dan mengawasi pelayanan kesehatan lingkungan.
 - j) Menata dan mengelola usaha-usaha penyehatan lingkungan.
 - k) Melaksanakan penyehatan lingkungan beserta sarana dan prasarana yang meliputi air bersih, sanitasi/limbah domestic, persampahan, dan drainase lingkungan.
 - l) Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan penyehatan lingkungan.
 - m) Melaksanakan ketatausahaan bidang penyehatan lingkungan, permukiman dan perumahan.
 - n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Tugas Seksi Permukiman dan Perumahan adalah:
- a) Menyiapkan penyusunan program terhadap permukiman dan perumahan.
 - b) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis permukiman dan perumahan.
 - c) Menyusun sistem informasi pelayanan permukiman dan perumahan.
 - d) Menyusun rencana program pembangunan permukiman dan perumahan (RP4D, RSH, Rusunawa, Menara/Tower, pencegahan kawasan kumuh, permukiman nelayan).
 - e) Menyusun standard an mengawasi pembangunan permukiman dan perumahan.
 - f) Menata dan mengelola usaha-usaha perbaikan kualitas permukiman dan perumahan diantaranya dengan

menyelenggarakan pembangunan Kasiba/Lisiba dan jalan lingkungan.

- g) Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan permukiman dan perumahan.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5.1.1.2. Sasaran Strategis Kegiatan dan Indikator Capaian serta Alokasi Anggaran

Terkait dengan urian tugas, pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, mana dinas ini berkewajiban untuk merumuskan program kerja dengan sasaran strategis, indikator kinerja, serta alokasi anggaran. Sasaran strategis, indikator kinerja, serta alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.1. Rumusan Sasaran strategis, Indikator kinerja, serta Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	
			Jumlah	%
1	Meningkatkan tertib administrasi perkantoran	Prosentase laporan yang diselesaikan	1,162,824,750	0.71
2	Ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat	Prosentase sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi syarat	26,528,477,200	16.14
3	Peningkatan ketertiban aparatur	Tersedianya pakaian dinas	11,055,000	0.01
4	Terpenuhinya sumber daya aparatur yang kompeten	Terlaksananya pelatihan aparatur	200,000,000	0.12
5	Tersusunnya laporan kinerja baik secara arsip maupun secara informasi	Tersusunnya laporan keuangan capaian kinerja dan keuangan secara akurat	274,450,000	0.17
6	Penyediaan sarana dan prasarana wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Terlaksananya rehabilitasi gedung sekolah	33,531,792,450	20.40
7	Penyediaan sarana dan prasarana untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan	Terangunnya gedung sekolah	13,445,173,407	8.18
8	Penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan kesehatan	Terbangunnya gedung puskesmas atau puskesmas pembantu	11,398,233,600	6.93

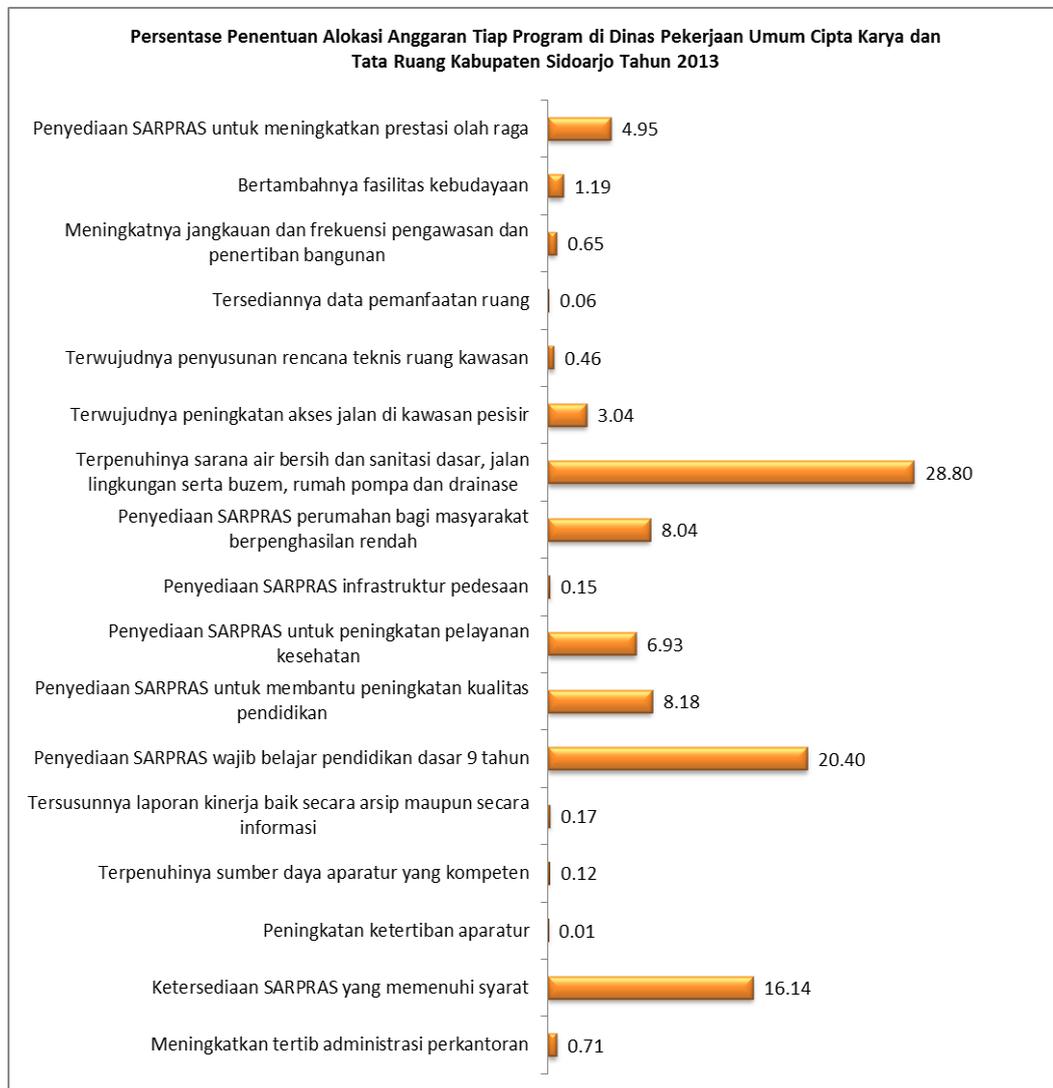
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	
			Jumlah	%
9	Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan	Terbangunnya penataan lingkungan permukiman penduduk pedesaan	251,888,750	0.15
10	Penyediaan sarana dan prasarana perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Terbangunnya sarana dan prasarana rusunawa	13,215,417,322	8.04
11	Daerah-daerah yang rawan air bersih, masyarakat miskin di pedesaan mauun di perkotaan yang tidak terdistribusi air PDAM	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi dasar, jalan lingkungan serta buzem, rumah pompa dan drainase	47,348,366,833	28.80
	Penyediaan akses yang memadai dan tertata serta membangun jalan dengan membuka keterisolasian suatu daerah			
	Pengendalian banjir di daerah rawan banjir khususnya perumahan dan permukiman			
12	Terwujudnya peningkatan akses jalan di kawasan pesisir	Terbangunnya jalan lingkungan di kawasan pesisir	5,000,000,000	3.04
13	Terwujudnya penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Tersusunnya rencana teknis ruang kawasan serta tertatannya ruang kawasan	756,800,000	0.46
14	Tersediannya data pemanfaatan ruang	Tertatannya pemanfaatan ruang	100,000,000	0.06
15	Meningkatnya jangkauan dan frekuensi pengawasan dan penertiban bangunan	Terlaksananya kegiatan operasional	1,060,800,000	0.65
16	Bertambahnya fasilitas kebudayaan	Terwujudnya pembangunan gedung serba guna	1,960,700,000	1.19
17	Penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan prestasi olah raga	Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga dengan terbangunnya rehabilitasi gedung olahraga	8,133,383,800	4.95
TOTAL			164,379,363,112	100.00

Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2013.

Pada tahun 2013, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang telah menetapkan 17 program sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta kewenangan yang telah diatur dalam peraturan. Total alokasi anggaran dalam satu tahun program mencapai Rp. 164.379.363.112,-. Persentase terbesar anggaran dialokasikan untuk 3 (tiga) program, yaitu: (1). Ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat dengan alokasi mencapai 16,14 persen; (2). Penyediaan sarana dan prasarana wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan alokasi mencapai 20,40 persen; dan (3). Terwujudnya sarana air bersih dan

sanitasi dasar, jalan lingkungan serta buzem, rumah pompa dan drainase dengan alokasi mencapai 28,80 persen.

Grafik 5.1. Persentase Sasaran strategis, Indikator kinerja, serta Alokasi anggaran Tiap Program Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013



Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2013.

Dari struktur anggaran tersebut analisis spesifik yang dapat diberikan adalah bahwa prioritas program tahun 2013 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, dialokasikan untuk pemenuhan Sarana dan Prasarana di Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan serta pemenuhan Sarana dan Prasarana di Bidang

Tata Bangunan. Namun demikian kinerja program, masih perlu ditingkatkan karena masih banyak wilayah yang genangan air hujan masih lama dan banjir, misalnya di wilayah porong sebelah lapindo, wilayah perkotaan, dan wilayah sawotratap.

5.1.1.3. Dukungan Sumberdaya Aparatur Dinas

Pada sasaran strategis, indikator kinerja, serta alokasi anggaran program sebagaimana tersebut di atas, program peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dinas belum menjadi prioritas. Hal terbukti bahwa terdapat 3 (tiga) program yang terkait tata kelola aparatur pemerintah, persentasenya sangat minim dibanding dengan program lainnya. Data menunjukkan bahwa: (1). Peningkatan ketertiban aparatur dengan alokasi mencapai 0,01 persen; (2). Terpenuhinya sumber daya aparatur yang kompeten dengan alokasi mencapai 0,12 persen; dan (3). Tersusunnya laporan kinerja secara arsip maupun informasi dengan alokasi mencapai 0,17 persen.

Pelaksanaan program dalam penetapan kinerja tahun 2013 didukung oleh ketersediaan sumberdaya aparatur sebanyak 67 orang terdiri dari sebanyak 55 orang dengan status PNS, sebanyak 5 orang dengan status pegawai kontrak dan sebanyak 7 orang dengan status pegawai honorer.

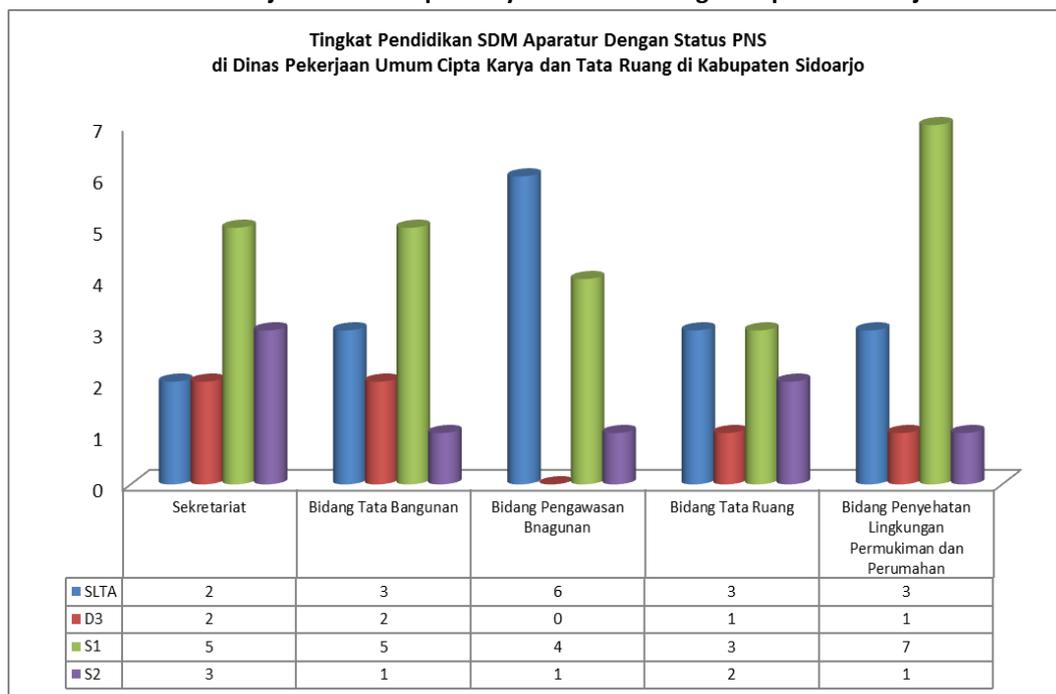
Tabel 5.2. Dukungan Sumberdaya Aparatur Dinas di Masing-masing Bidang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

No.	Jumlah Pegawai	PENDIDIKAN						TOTAL Pegawai
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	0	0	2	2	5	3	12
2	Bidang Tata Bangunan	0	0	3	2	5	1	11
3	Bidang Pengawasan Bnagunan	0	0	6	0	4	1	11
4	Bidang Tata Ruang	0	0	3	1	3	2	9
5	Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan	0	0	3	1	7	1	12
Jumlah		0	0	17	6	24	8	55
No.	Jumlah Pegawai	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	TOTAL Pegawai
1	Kontrak Sekretariat	0	0	1	0	0	0	1
2	Kontrak Bidang Tata Bangunan	0	0	1	0	0	0	1

No.	Jumlah Pegawai	PENDIDIKAN						TOTAL Pegawai
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
3	Kontrak Bidang Pengawasan Bnagunan	0	0	1	0	0	0	1
4	Kontrak Bidang Tata Ruang	0	0	0	0	0	0	0
5	Kontrak Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan	0	0	2	0	0	0	2
Jumlah		0	0	5	0	0	0	5
No.	Jumlah Pegawai	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	TOTAL Pegawai
1	Honorer Sekretariat	0	0	2	0	0	0	2
2	Honorer Bidang Tata Bangunan	0	0	3	0	0	0	3
3	Honorer Bidang Pengawasan Bnagunan	0	0	1	0	0	0	1
4	Honorer Bidang Tata Ruang	0	0	0	0	0	0	0
5	Honorer Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan	0	0	1	0	0	0	1
Jumlah		0	0	7	0	0	0	7
TOTAL SUMBERDAYA APARATUR DINAS								67

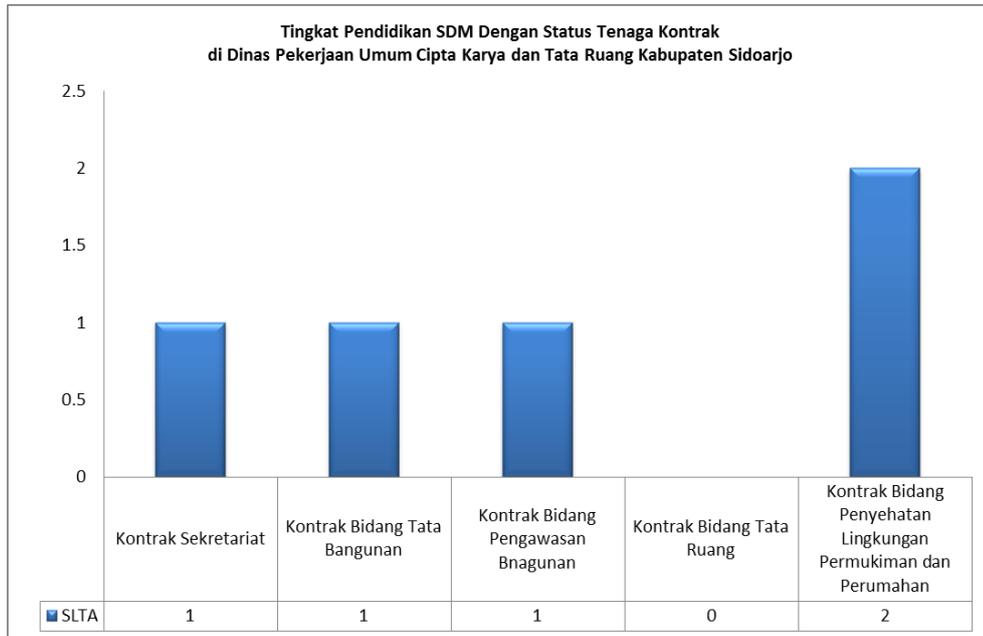
Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2013.

Grafik 5.2. Tingkat Pendidikan Sumberdaya Aparatur Dinas yang Berstatus PNS Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo



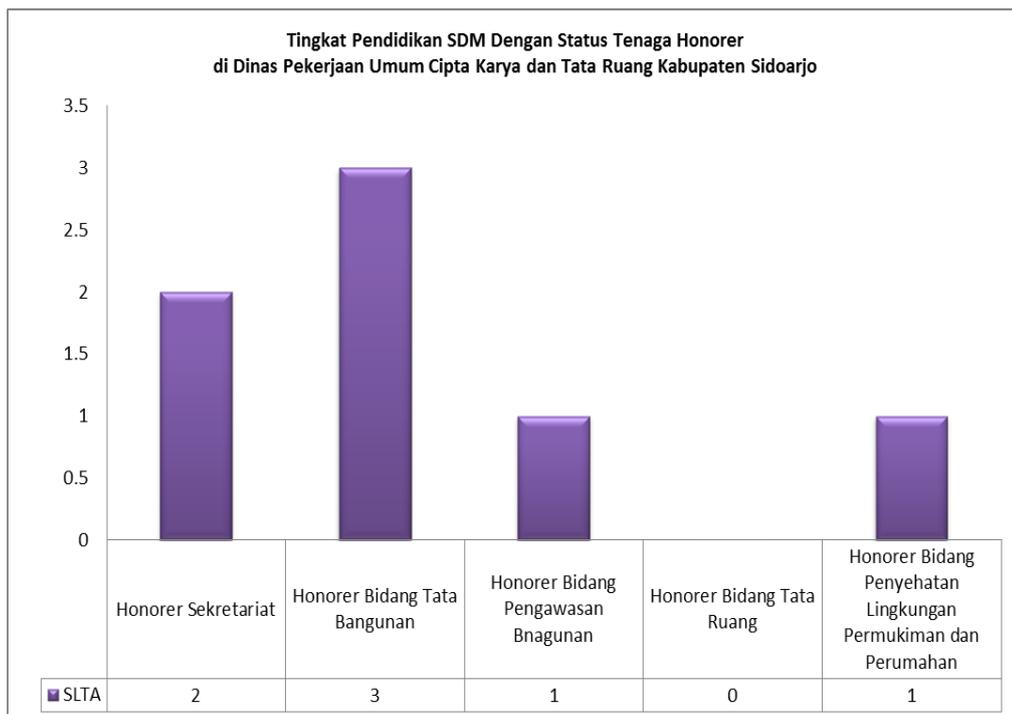
Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2013.

Grafik 5.3. Tingkat Pendidikan Sumberdaya Aparatur Dinasyang Berstatus Pegawai Kontrak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo



Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2013.

Grafik 5.4. Tingkat Pendidikan Sumberdaya Aparatur Dinasyang Berstatus Pegawai Honorer Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo



Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2013.

Kualitas Sumberdaya Aparatur Dinas dapat dijelaskan dengan tingkat pendidikan. Dari keseluruhan sumberdaya aparatur dinas, yakni 67 orang, pendidikannya didiskripsikan sebagai berikut: Sumberdaya Aparatur Dinas dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 27 orang dan Sumberdaya Aparatur Dinas dengan tingkat pendidikan SLTA dengan jumlah mencapai 29 orang terdiri dari 17 orang PNS dan 12 orang Non-PNS.

Menurut analisis kami bahwa sumberdaya aparatur dinas, masih perlu untuk ditingkatkan kualitasnya. Tidak ada pilihan lagi bahwa untuk meningkatkan kinerja PU Cipta Kaya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, harus didukung oleh Sumberdaya aparatur Dinas yang memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang diembankan kepadanya. Karena sumberdaya aparatur dinas merupakan salah satu sumberdaya (*resources*) yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan(Grindle: 1980). Begitu juga Edward III (1980, 53) menegaskan bahwa *probably the most essential resources in implementing policy is staff*.

Kendatipun program kerja dinas telah dirumuskan secara jelas dan ditransformasikan dengan tepat, manakala sumberdaya aparatur dinas masih kurang mendukung kompetensinya, maka pelaksanaan program tidak akan mencapai performa yang efektif. Karenanya sumberdaya dinas, *it is not enough for there to be an equate number of implementers to carry out a policy. Implementers must possess the skill necessary for the job at hand* (Edward III, 1980: 61). (tidak hanya mengandalkan banyaknya sumberdaya aparatur dinas, tetapi sumberdaya aparatur dinas harus memiliki ketrampilan yang memadai dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, tanggung jawabnya).

5.1.2. Kinerja Layanan

Kinerja layanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sidoarjo dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu layanan dalam bentuk perijinan dan layanan dalam bentuk non-perijinan.

1. Layanan perijinan terdiri dari:
 - a. Layanan Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
2. Layanan non-perijinan terdiri dari:
 - a. Klarifikasi konstruksi bangunan yang berlantai 3 (tiga) atau lebih;
 - b. Klarifikasi konstruksi bangunan Menara Telekomunikasi;
 - c. Klarifikasi konstruksi bangunan Reklame

Berikut akan dijelaskan secara singkat pelaksanaan dari berbagai layanan perijinan dan non perijinan yang menjadi tugas, pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sidoarjo, sekaligus menggambarkan capaian kinerja bidang layanan perijinan dan non-perijinan:

5.1.2.1. Layanan Perijinan Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Ketentuan yang mengatur tentang IUJK berdasar adalah Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, pasal 6. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap badan usaha atau perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK yang diterbitkan oleh Bupati. Mekanisme permohonan ijin dilakukan secara tertulis yang diatur dalam ketentuan peraturan bupati. Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan masa berlaku IUJK. Setiap pemberian layanan IUJK pemerintah daerah berhak melakukan pungutan berupa retribusi yang dibedakan dalam dua kategori, yaitu: (1). Retribusi untuk usaha jasa perencanaan dan/atau pengawasan pekerjaan konstruksi sebesar Rp. 150.000,-; dan (2). Usaja jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebesar Rp. 250.000,-. Retribusi atas IUJK menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah. Sedangkan bagi badan usaha atau perseorangan yang tidak memiliki IUJK akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-

Di Kabupaten Sidoarjo, mekanisme dan prosedur IUJK menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dengan tugas,

pokok dan fungsi pada Bidang Pengawasan Bangunan. Berikut adalah penjelasan jenis, persyaratan dan mekanisme dalam perijinan IUJK.

1. Jenis usaha jasa konstruksi, meliputi:
 - a. Konsultasi Perencanaan Konstruksi
 - b. Konsultasi Pengawasan Konstruksi
 - c. Pelaksana Konstruksi
2. Bidang usaha jasa konstruksi, meliputi:
 - a. Arsitektur
 - b. Sipil
 - c. Tata Lingkungan
 - d. Mekanikal
 - e. Elektrikal
3. Masa Berlaku IUJK, adalah:

Masa berlaku IUJK di Kabupaten Sidoarjo adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang serta berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
4. Daftar persyaratan IUJK, adalah:
 - a. Rekaman sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Perusahaan.
 - b. Rekaman Akte Pendirian atau Akte Perubahan Terakhir (bagi CV dilengkapi dengan tanda terdaftar di Pengadilan Negeri, bagi PT dilampiri Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM).
 - c. Rekaman NPWP.
 - d. Rekaman KTP dan Ijasah bagi penanggungjawab Badan Usaha atau Direktur.
 - e. Rekaman KTP dan Ijasah bagi Pengurus Badan Usaha (Komisioner untuk CV atau Komisaris untuk PT).
 - f. Rekaman KTP dan Ijasah bagi Tenaga Non-Teknik.
 - g. Rekaman KTP dan Ijasah bagi Tenaga Teknik Tugas penuh Badan Usaha dengan minimal jumlah tenaga 1 orang sesuai bidang usaha.

- h. Surat pernyataan bukan PNS/TNI bagi penanggungjawab Badan Usaha atau Direktur (Berkas Surat Pernyataan ada di CD Permohonan IUJK).
- i. Surat keterangan domisili Badan Usaha dari Desa/Kelurahan.
- j. Denah lokasi Badan Usaha (dilengkapi juga dengan denah ruang kantor).
- k. Rekaman IMB sesuai Domisili Kantor (bagi Badan Usaha yang berkantor di perumahan dilengkapi dengan Surat Pengesahan Daftar Pnaghuni).
- l. Surat IUJK Badan Usaha Pusat (bagi Badan Usaha dengan status Cabang).
- m. Surat pernyataan akan memprioritaskan Tenaga Kerja setempat dan Badan Usaha.
- n. Data Badan Usaha lain (dalam bentuk foto kantor: tampak depan dengan kelihatan Papan Nama, Ruang-ruang dalam Kantor).

5. Waktu Layanan

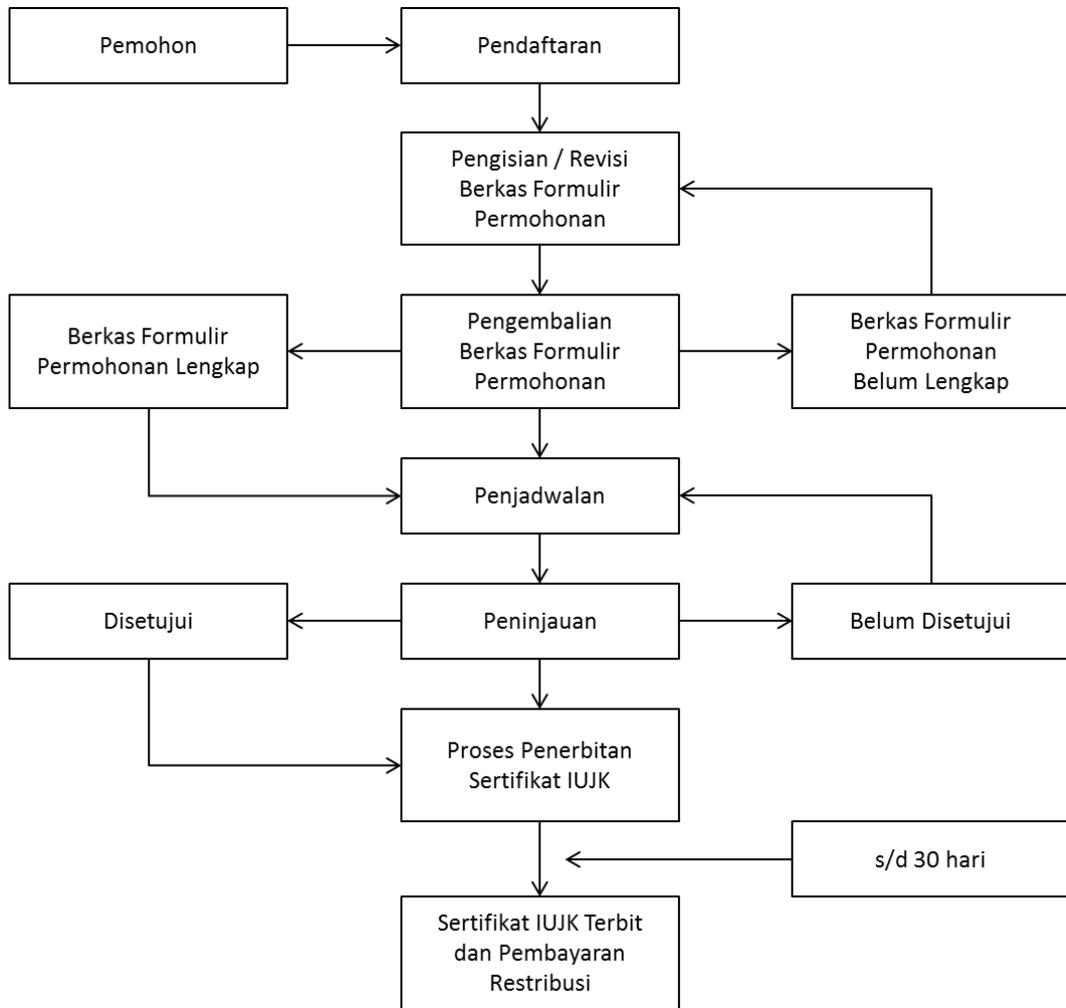
Dari standar layanan mekanisme permohonan perijinan IUJK, klasifikasi konstruksi dan permohonan perpanjangan IUJK dapat dilakukan dalam 30 (tiga puluh hari) hari kerja. Dari tahap permohonan hingga penerbitan Berita Acara dan Srttifikat IUJK.

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan layanan di bidang perijinan IUJK menetapkan 3 (tiga) mekanisme standar prosedur layanan. Antara lain:

1. Mekanisme Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi
2. Mekanisme Penerbitan Berita Acara Klarifikasi Konstruksi
3. Mekanisme Permohonan Perpanjangan Klarifikasi Konstruksi.

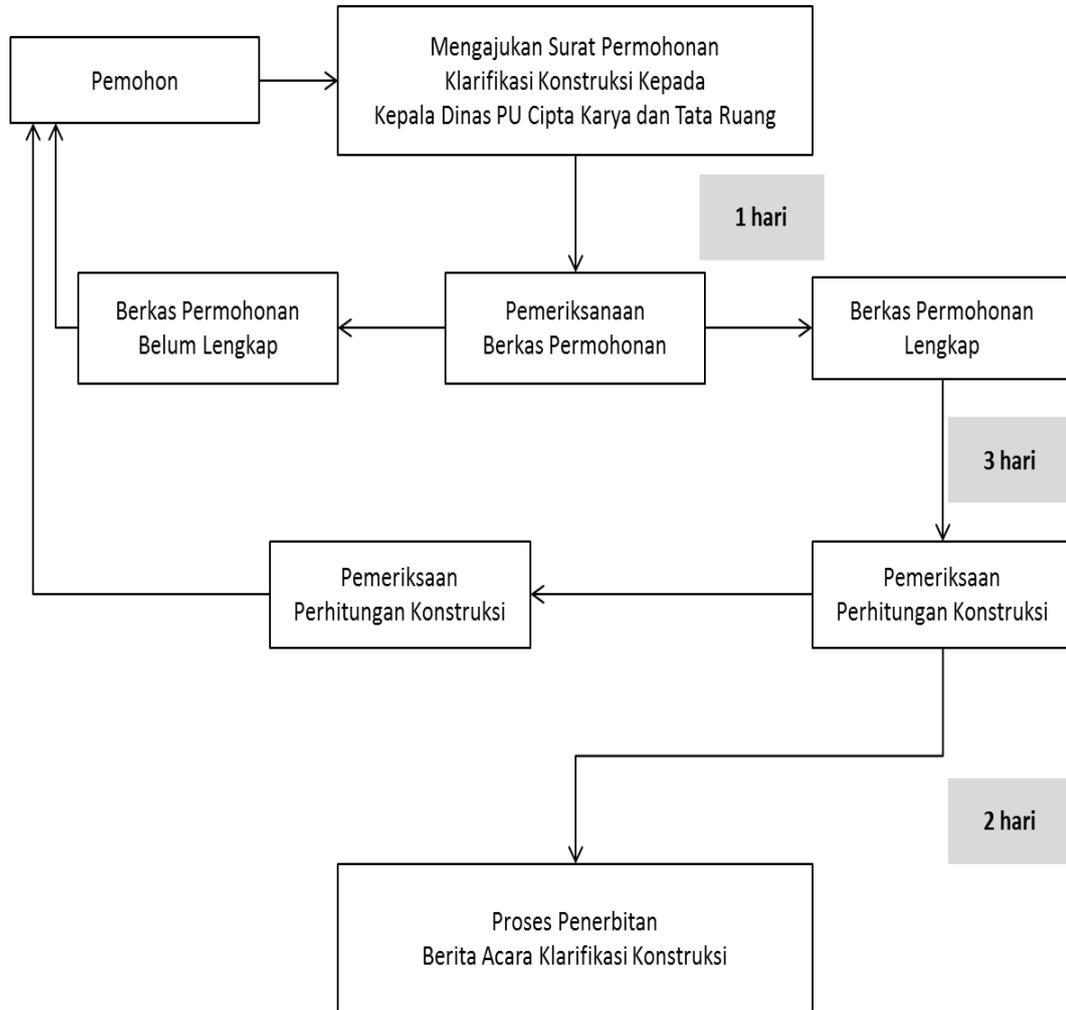
Berikut digambarkan alur mekanisme setiap layanan yang dijadikan standar layanan perijinan IUJK di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.

**Gambar 5.1. Mekanisme Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo**



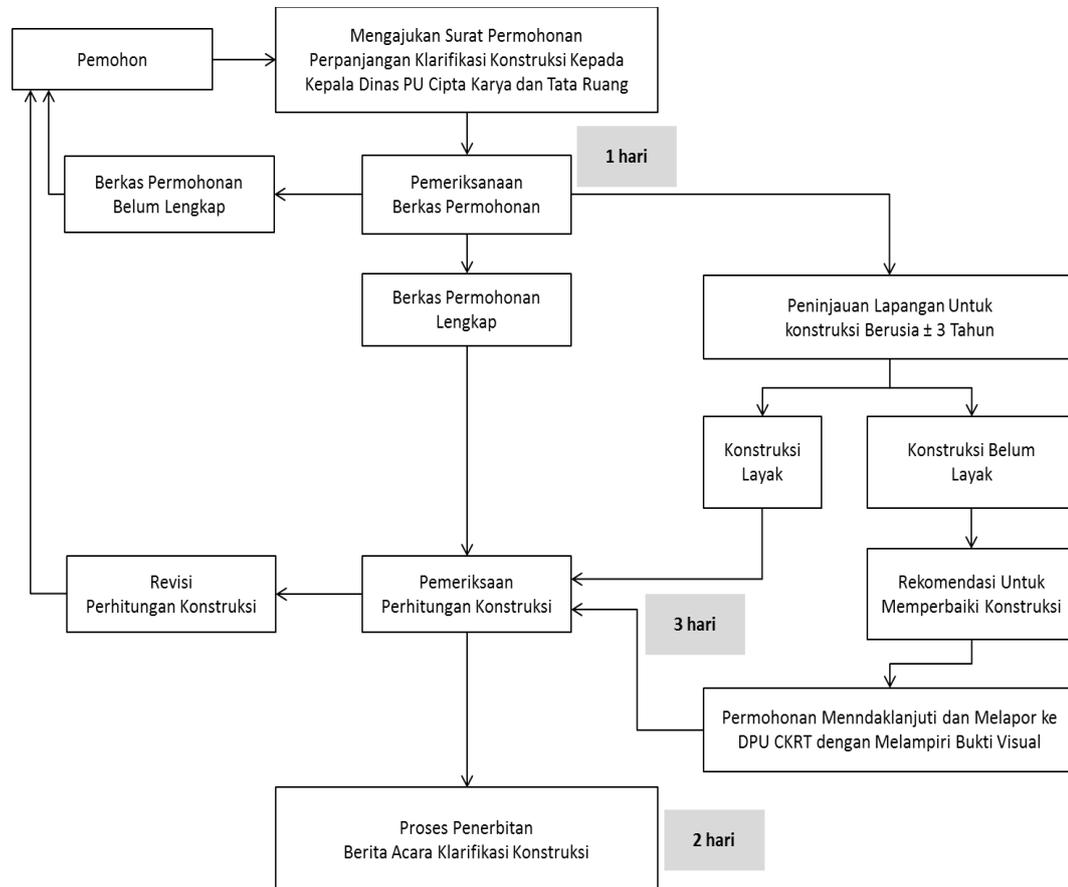
Sumber: Profil Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

Gambar 5.2. Skema Mekanisme Penerbitan Berita Acara Klarifikasi Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Profil Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

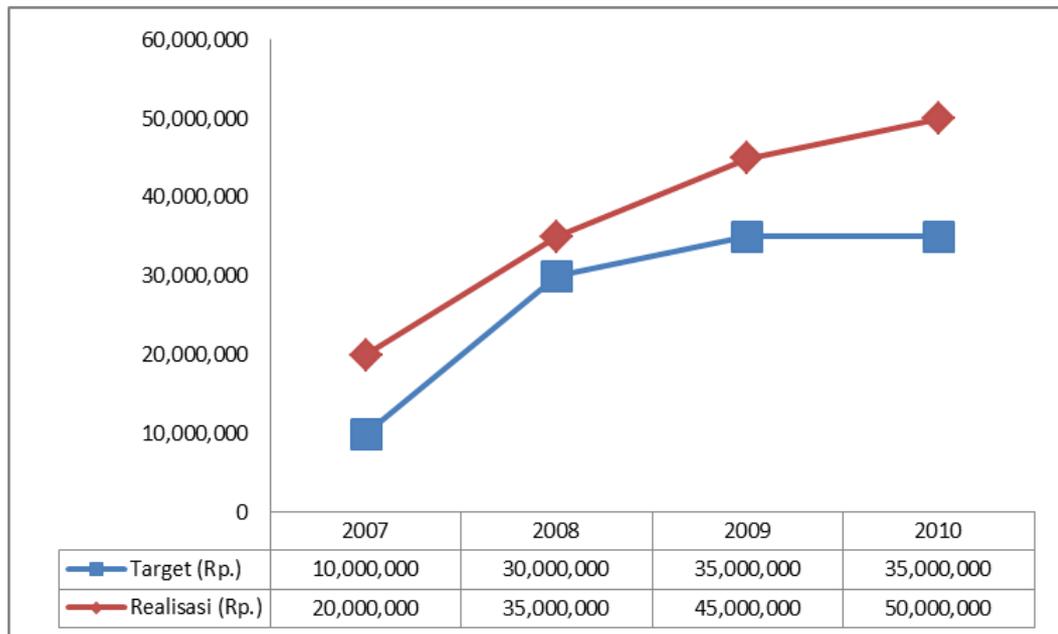
Gambar 5.3. Mekanisme Permohonan Perpanjangan Klarifikasi Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Profil Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

Restribusi penerbitan perijinan IUJK yang dilakukan selama 5 (lima) tahun oleh Kabupaten Sidoarjo menunjukkan peningkatan. Bahkan realisasi IUJK selalu melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi maka penarikan restribusi Tahun 2011 tidak diberlakukan. Sekedar mengilustrasikan hasil dari penarikan restribusi IUJK dari tahun 2007 hingga tahun 2010 di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Grafik 5.5. Restribusi Perijinan IUJK dari Tahun 2007-2010 Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Profil Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

Peningkatan jumlah restribusi perijinan IUJK sebagai pendapatan daerah yang masuk ke dalam Kas daerah Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2007 hingga 2010 menunjukkan peningkatan. Salah satu faktornya adalah iklim usaha yang kondusif sehingga tumbuhnya usaha-usaha di bidang konstruksi yang semakin meningkat. Peningkatan pembangunan infrastruktur mendorong pertumbuhan jasa konstruksi semakin meningkat. Tentu dampak bagi pertumbuhan pembangunan ekonomi cukup signifikan. Restribusi sebagai bagian dari sumber pendapatan daerah dapat diotimalkan guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber pajak dan restribusi di daerah.

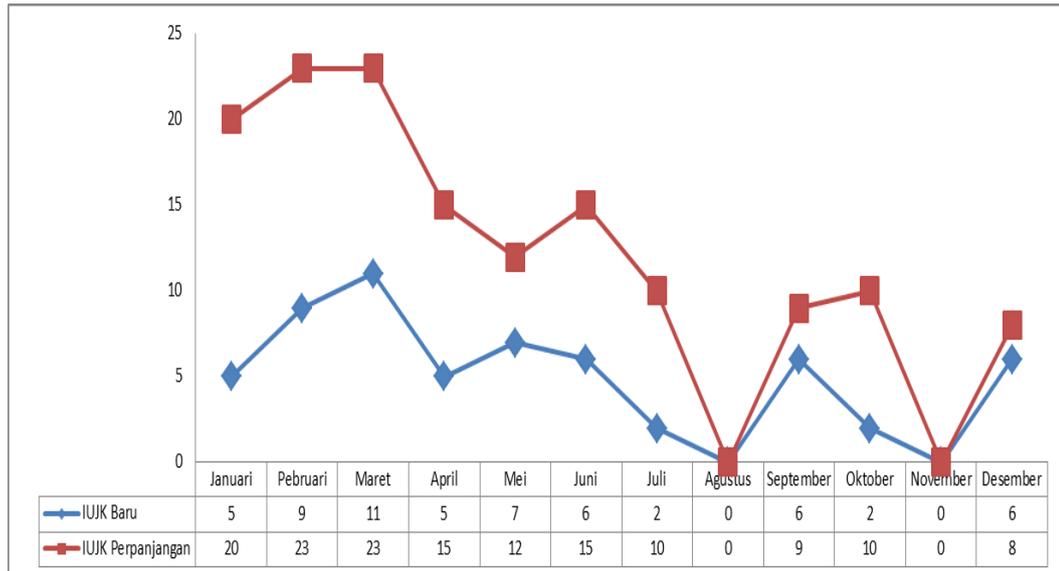
Capaian kinerja di bidang perijinan dan perpanjangan IUJK pada tahun 2013 juga menunjukkan peningkatan. Dari data capaian kinerja layanan IUJK diperoleh penjelasan bahwa untuk permohonan perijinan IUJK baru mencapai 59 ijin dan untuk permohonan perpanjangan IUJK mencapai 145 ijin, sehingga pada tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo telah memberikan layanan kepada 204 perijinan IUJK.

Tabel 5.3. Capaian Kinerja Layanan Perijinan IUJK di Kabupaten Sidoarjo

No.	Periode 2013	Bulan	Status		Jumlah
			Baru	Perpanjangan	
1	TRIWULAN I	Januari	5	20	25
		Pebruari	9	23	32
		Maret	11	23	34
2	TRIWULAN II	April	5	15	20
		Mei	7	12	19
		Juni	6	15	21
3	TRIWULAN III	Juli	2	10	12
		Agustus	0	0	0
		September	6	9	15
4	TRIWULAN IV	Oktober	2	10	12
		November	0	0	0
		Desember	6	8	14
TOTAL			59	145	204

Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2013.

Grafik 5.6. Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Perijinan IUJK di Kabupaten Sidoarjo



Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2013.

Jumlah Badan Usaha atau Perseorangan yang melakukan proses perpanjangan perijinan IUJK lebih banyak jika dibanding dengan permohonan perijinan IUJK bagi Badan Usaha atau Persorangan yang baru berdiri. Pada periode Triwulan I dan II menjadi puncak dari pengajuan permohonan atas

layanan perijinan IUJK di Kabupaten Sidoarjo. Jika mengacu pada ketentuan redistribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi maka dapat dihitung jumlah redistribusi yang diperoleh dari layanan IUJK kurang lebih Rp. 30.600.000,- hingga Rp. 51.000.000,-. Tentu ini harus memperhatikan jenis usaha kontrsuksi yang dilakukan Badan Usaha sesuai ketentuan.

Yang menjadi catatan bagi peneliti dalam kaitannya dengan layanan pengurusan IUJK di DPU Cipta Karya dan Tata Ruang, adalah sampai penelitian ini dilaksanakan, dinas ini belum memiliki SPM dan SOP pengurusan IUJK. Dengan demikian peneliti tidak bisa mengukur kinerja layanan secara riil, karena ukuran layanan belum dimilikinya.

5.1.2.2. Layanan Non Perijinan: Klarifikasi Konstruksi Bangunan Berlantai 3 (tiga) atau Lebih

Regulasi yang mengatur tentang IMB adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Tugas, pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sidoarjo terkait IMB yang dimaksud adalah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Yaitu tugas, pokok dan fungsi dalam kewenangan Bidang Pengawasan Bangunan yang lebih spesifik sebagai kewenangan Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan dengan tugas adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pendirian bangunan.
- b. Memberikan pertimbangan teknis terhadap penerbitan IMB.
- c. Melaksanakan penelitian dan laporan terhadap pendirian bangunan yang tidak dilengkapi perijinan.

- d. Melaksanakan pengusutan dan usulan pembongkaran bangunan liar, menampung dan menganalisa sengketa bangunan untuk bahan keputusan yang berwenang.

Kewenangan ini diatur juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang dimaksud sebagai kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Yaitu:

- a. Ketentuan pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Bupati dapat melimpahkan pemberian izin mendirikan bangunan kepada Pejabat yang menangani urusan di bidang pelayanan perizinan atau pejabat yang ditunjuk.
- b. Ketentuan pasal 20 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan surat persetujuan pembongkaran bangunan tidak memiliki IMB kepada Instansi yang berwenang secara teknis.
- c. Ketentuan pasal 23 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, antara lain:

1. Prinsip-prinsip dasar layanan IMB, meliputi:
 - a. Prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif;
 - b. Pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu;
 - c. Keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha;
 - d. Aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan serta kenyamanan.
2. Syarat permohonan perijinan IMB, meliputi:
 - a. Persyaratan dokumen administrasi, antara lain:

- ✚ tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
 - ✚ data pemohon;
 - ✚ foto copy Surat Keputusan Persetujuan Pemanfaatan Ruang/ Izin lokasi serta ketentuan yang ada didalamnya;
 - ✚ foto copy IMB lama (IMB Perluasan/ Renovasi);
 - ✚ foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 - ✚ surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa.
- b. Persyaratan dokumen teknis, antara lain:
- ✚ gambar rencana/ arsitektur bangunan;
 - ✚ gambar sistem struktur;
 - ✚ gambar sistem utilitas;
 - ✚ perhitungan struktur dan/ atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan lebih dari 2 (dua) lantai;
 - ✚ perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal;
 - ✚ data penyedia jasa perencanaan, bagi bangunan yang terkena kewajiban.
3. Waktu layanan perijinan IMB ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
4. Sanksi dalam perijinan IMB, meliputi:
- Pemerintah daerah berdasar persetujuan Bupati dapat melakukan pembongkaran bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
 - b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungannya;
 - c. tidak memiliki IMB.

Tujuan diberlakukannya IMB dalam konteks tata ruang dijelaskan pada pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, antara lain:

- a. pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunandari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
- c. mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya;
- d. syarat penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan.

Dalam rangka pengurusan IMB bagi semua masyarakat hukum, maka bangunan yang berlantai 3 (tiga) atau lebih,perhitungan konstruksinya wajib diklarifikasi oleh SKPD yang membidangi bangunan, sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 30 Tahun 2012, pasal 5 ayat (3).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, salah satu tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sidoarjo adalah mengklarifikasi bangunan berlantai 3 (tiga) atau lebih. Tugas, pokok dan fungsi serta kewenangan ini sebagai implementasi praktis dari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan Bangunan yang lebih spesifik sebagai kewenangan Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan.

Berdasar data laporan klarifikasi bangunan yang dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan, pada bulan Januari hingga Desembertahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat 23 jenis bangunan yang telah dilakukan klarifikasi. Sedangkan untuk frekuensi klarifikasi bangunan dilakukan sebanyak 56 kali melalui pengecekan di lapangan. Dari jenis bangunan yang dilakukan pengecekan di lapangan menunjukkan paling banyak pada rumah

tinggal, yakni sebanyak 12 bangunan berikutnya jenis bangunan berupa kantor dan ruko telah dilakukan pengecekan lapangan untuk 7 bangunan.

Dari tingkat frekuensi klarifikasi pengawasan yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selama periode Januari-Desember 2013 pada bulan-bulan tertentu menjadi puncak aktivitas pengawasan bangunan. Pada Triwulan II tepatnya bulan Mei merupakan frekuensi pengawasan bangunan dilakukan 11 titik pengawasan bangunan. Kemudian pada Triwulan III pada bulan Agustus dilakukan pengawasan di 10 titik bangunan.

Klarifikasi bangunan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Bangunan Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan dalam rangka pengurusan perijinan IMB dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 5.7. Jumlah Bangunan Yang Telah Diklarifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Januari – Desember 2013)

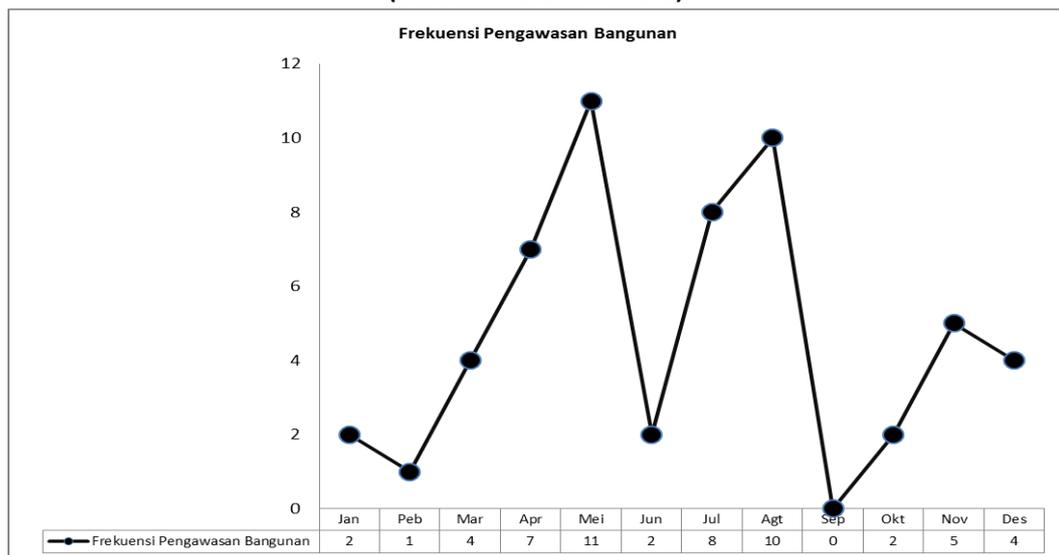


Sumber: *Capaian Kinerja Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, 2013.*

Berdasarkan data tersebut pada grafik di atas dan berikut menunjukkan bahwa terdapat keseriusan kinerja Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan

dalam rangka penertiban bangunan dan mendukung proses pengurusan perijinan IMB. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa dari 23 jenis bangunan yang wajib dilakukan klarifikasi, maka frekuensi untuk melakukan klarifikasi bangunan dilakukan sebanyak 56 kali.

Grafik 5.8. Frekuensi Bangunan Yang Telah di Cek Lapangan atau Diklarifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Januari – Desember 2013)



Sumber: Capaian Kinerja Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, 2013.

5.1.2.3. Layanan Non Perijinan: Klarifikasi Konstruksi Bangunan Menara Telekomunikasi

Perijinan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi diatur pada ketentuan pasal 24 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2012 Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dan secara teknis di atur pada Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 30 Tahun 2012. Terkait dengan perijinan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dapat didiskripsikan sebagai berikut:

1. Jenis perijinan untuk menara telekomunikasi, meliputi:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Izin Pengendalian

2. Persyaratan Perijinan IMB untuk Menara Telekomunikasi, meliputi:
 - a. Memenuhi syarat ketentuan bangunan dalam Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.
 - b. Berita acara sosialisasi kepada warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi yang dimungkinkan terkena dampak bagi pembangunan menara telekomunikasi
 - c. Klarifikasi kesesuaian dengan titik cell planning dan spesifikasinya (bentuk, ketinggian dan luasan menara);
 - d. Klarifikasi konstruksi menara telekomunikasi;
 - e. Klarifikasi konstruksi bangunan gedung apabila pendirian menara telekomunikasi di atas gedung;
 - f. Surat pernyataan penggunaan menara bersama atau perjanjian kerjasama penggunaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama;
 - g. Bukti asuransi perlindungan masyarakat dan harta benda di sekitar menara.
 - h. Untuk memperoleh izin pengendalian menara telekomunikasi wajib dilengkapi Izin Gangguan.
3. Masa Berlaku Perijinan untuk Menara Telekomunikasi, meliputi:
 - a. Masa berlaku izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah selama bangunan masih berdiri.
 - b. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Pemegang Izin Pengendalian wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dihitung sejak tanggal diterbitkannya izin/ daftar ulang sebelumnya.

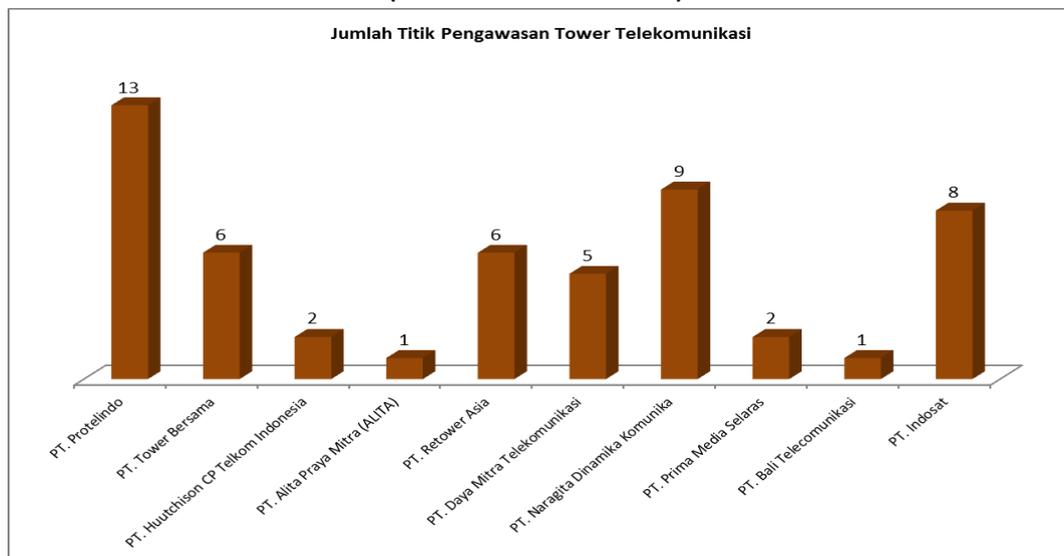
Klarifikasi konstruksi bangunan menara telekomunikasi yang menjadi tugas, pokok dan fungsi serta kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sidoarjo, meliputi tiga aspek, yakni: 1). klarifikasi kesesuaian dengan titik cell planning dan spesifikasinya

(bentuk, ketinggian dan luasan menara); 2). klarifikasi konstruksi menara telekomunikasi; dan 3) klarifikasi konstruksi bangunan gedung apabila pendirian menara telekomunikasi di atas gedung. Tahapan klarifikasi bangunan menara telekomunikasi meliputi:

1. Melakukan cek lapangan antara bentuk struktur menara telekomunikasi pada gambar dengan kondisi lapangan.
2. Melakukan cek lapangan antara bentuk dena menara telekomunikasi pada gambar dengan kondisi lapangan.
3. Atas temuan tersebut dapat dikeluarkan rekomendasi, antara lain: Lanjut pada perijinan selanjutnya, Disesuaikan antara gambar dengan kondisi lapangan, Revisi, serta Keterangan Bangunan Berdiri 100% atau Tower Belum Terbangun.

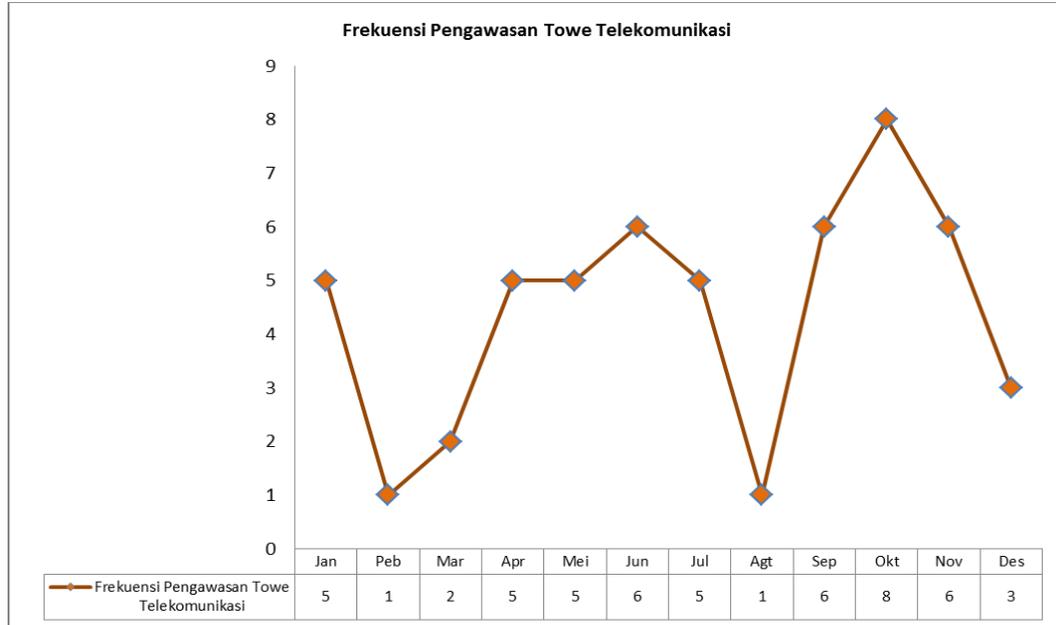
Data tentang klarifikasi konstruksi bangunan menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo periode Januari sampai dengan Desember 2013 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 5.9. Jumlah Titik Tower Telekomunikasi yang Diklarifikasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Januari – Desember 2013)



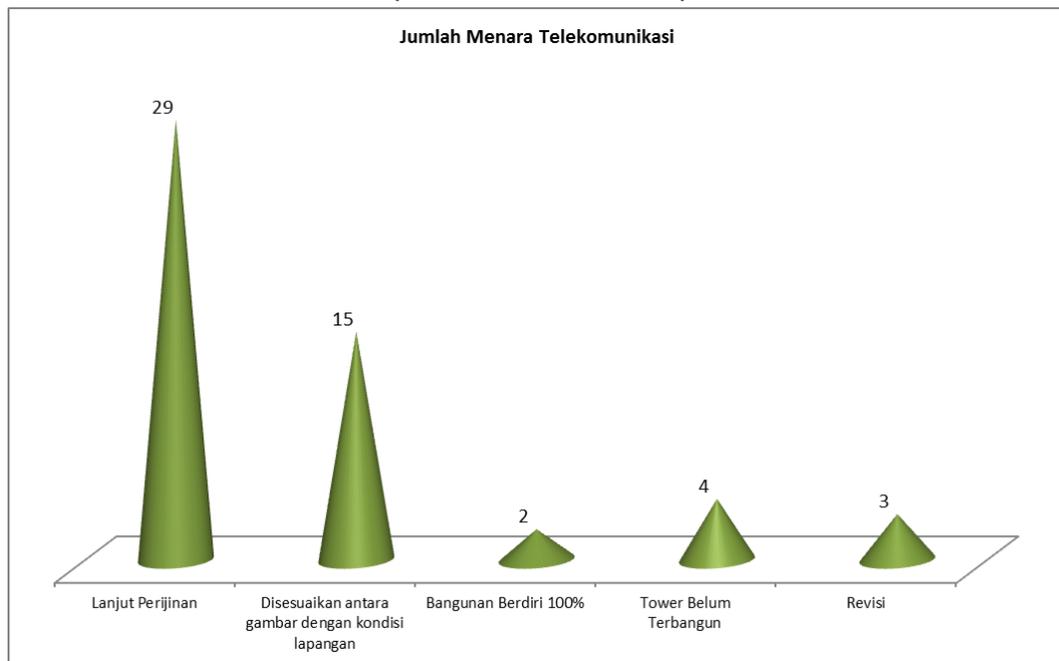
Sumber: Capaian Kinerja Pengawasan Tower Telekomunikasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, 2013.

Grafik 5.10. Frekuensi Pengawasan Titik Tower Telekomunikasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Januari – Desember 2013)



Sumber: Capaian Kinerja Pengawasan Tower Telekomunikasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, 2013.

Grafik 5.11. Jenis Rekomendasi Yang Dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Januari – Desember 2013)



Sumber: Capaian Kinerja Pengawasan Tower Telekomunikasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, 2013.

Dari data laporan pengawasan Tower Telekomunikasi yang telah diklarifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo pada periode bulan Januari-Desember 2013 menunjukkan bahwa:

1. Jumlah titik pengawasan yang telah dilakukan selama periode Januari-Desember 2013 sebanyak 53 titik menara telekomunikasi.
2. Jumlah perusahaan yang melakukan proses permohonan klarifikasi dan cek lapangan untuk perijinan menara telekomunikasi dilakukan oleh 10 perusahaan telekomunikasi.
3. Perusahaan telekomunikasi yang telah dilakukan pengawasan menara telekomunikasi pada periode Januari-Desember 2013, antara lain:
 - a. PT. Protelindo
 - b. PT. Tower Bersama
 - c. PT. Huutchison CP Telkom Indonesia
 - d. PT. Alita Praya Mitra (ALITA)
 - e. PT. Retower Asia
 - f. PT. Daya Mitra Telekomunikasi
 - g. PT. Naragita Dinamika Komunika
 - h. PT. Prima Media Selaras
 - i. PT. Bali Telecomunikasi
 - j. PT. Indosat
4. Dari total 53 titik menara telekomunikasi yang telah dilakukan pengawasan dan cek lapangan dikeluarkan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi lanjut pada perijinan selanjutnya diberikan kepada 29 titik menara telekomunikasi
 - b. Rekomendasi disesuaikan antara gambar dengan kondisi lapangan diberikan kepada 15 titik menara telekomunikasi
 - c. Rekomendasi revisi diberikan kepada 3 titik menara telekomunikasi

- d. Dan keterangan menara telekomunikasi telah dibangun 100% diberikan kepada 2 titik menara telekomunikasi dan keterangan bahwa tower belum terbangun diberikan kepada 4 titik menara telekomunikasi.

5.1.2.4. Layanan Non Perijinan: Klarifikasi Konstruksi Bangunan Menyelenggarakan Reklame

Ketentuan tentang pemasangan reklame di Kabupaten Sidoarjo, diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Reklame. Penyelenggara reklame yang dimaksud dalam perda ini adalah pemilik reklame baik orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri. Dalam penyelenggaraan reklame bisa dilaksanakan oleh perusahaan jasa periklanan/biro reklame sebagai badan yang bergerak dibidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Beberapa pengertian reklame dan hal – hal terkait dengan reklame di Kabupaten Sidoarjo menurut ketentuan Perda Kabupaten Sidoarjo 7 tahun 2007, pasal 1 adalah:

1. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang atau jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. (ayat 13)
2. Beberapa Jenis Reklame meliputi:
 - a. Reklame papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinye termasuk seng atau bahan lain yang sejenis

- dipasang atau digantungkan pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
- b. Reklame Megatron/Videotron/Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambardan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
 - c. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
 - d. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
 - e. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
 - f. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
 - g. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenisnya.
 - h. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
 - i. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun

bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.

- j. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
 - k. Baliho adalah reklame yang berbentuk gambar di atas kain, kertas dan sejenisnya yang berbentuk rangka terbuat dari kayu dan sejenisnya yang berukuran minimal 2 x 4 meter.
3. Pola penyebaran perletakan reklame adalah konfigurasi perletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan dalam penyelenggaraan reklame.
 4. Perletakan reklame adalah tempat titik reklame ditempatkan atau diletakkan.
 5. Titik reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
 6. Nilai strategis titik reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas perletakan titik reklame pada kelas jalan/zona, ketinggian dan luas bidang reklame.

Perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo menurut Ketentuan Perda nomor 7 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara reklame terlebih dahulu wajib mendapat izin tertulis dari Bupati serta wajib mendapat surat izin pemakaian tanah dari pemilik lahan/tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- (3) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame :
 - a. Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi pemerintah/penyuluhan;

- b. Melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan ;
 - c. Semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, yayasan sosial dengan ukuran luas tidak melebihi 625 cm² ;
 - d. Semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempatitanaah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luas bidang tidakmelebihi 625 cm² ;
 - e. Di Pekan Raya atau tempat keramaian sejenisnya denga ketentuan luas reklame dan waktupenyelenggaraan reklame ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
 - f. Diselenggarakan oleh perwakilan Diplomat Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB sertabadan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi International.
- (4) Izin tertulis dari Bupati adalah izin pemanfaatan ruang manfaat jalan (Rumaja) dan ruang milikjalan (Rumija) yang ditetapkan oleh Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa.
- (5) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur denganPeraturan Bupati.

Pasal 10

Izin dapat diberikan kepada penyelenggara reklame apabila :

- a. Melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) ;
- b. Membayar pajak reklame ;
- c. Membayar sewa titik lokasi, khusus untuk penyelenggaraan reklame di dalam sarana danprasarana wilayah ; dan
- d. Membayar biaya jaminan bongkar sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pajak reklameuntuk 1 (satu) tahun penyelenggaraan reklame.

- e. Pembangunan/penempatan reklame wajib memenuhi ketentuan tinggi ruang bebas bagi jalanarteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.

Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dapat diberikan dalam bentuk izin reklame tetap danizin reklame terbatas.
- (2) Izin reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk penyelenggaraanreklame dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Izin reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk penyelenggaraanreklame yang masa berlakunya paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 12

- (1) Pemasangan reklame insidentil dapat diberlakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemasangan reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan (3), dihitung sejak tanggalditerbitkannya izin penyelenggaraan reklame.
- (2) Izin reklame tetap dimohonkan kembali setiap tahunnya sampai dengan batas waktu sewa titikreklame.

Pasal 14

Persyaratan dan tata cara memperoleh izin reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

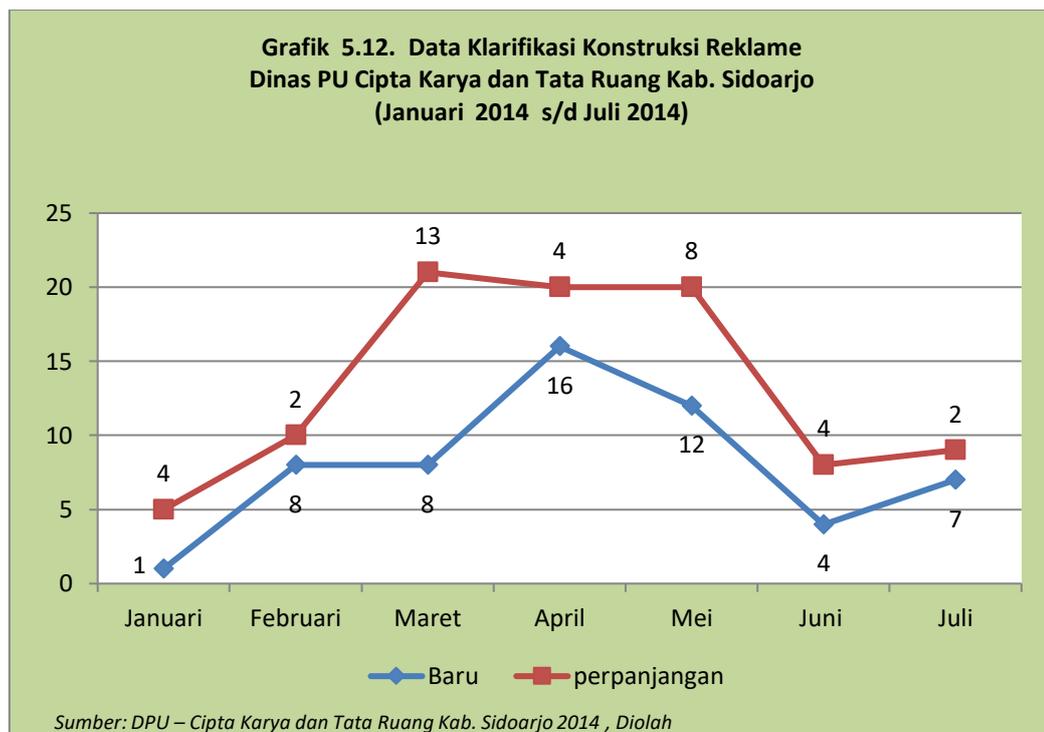
Terkait dengan persyaratan penyelenggaraan reklame sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka penyelenggaraan reklame harus sesuai dengan ketentuan pada pasal 23 perda 7 Tahun 2007. Sehubungan dengan itu Bupati

Sidoarjo melalui SKPD yang diberi kewenangan berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap penyelenggaraan reklame agar memenuhi persyaratan administrative dan memenuhi aspek tata ruang, estetikawilayah dan kelayakan konstruksi. Sehubungan dengan itu pengawasan dan pengendalian reklame dalam rangka penertiban reklame. Penertiban reklame ditujukan pada setiap penyelenggaraan reklame apabila :

- a. Tanpa izin ;
- b. Telah berakhir masa izinnnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku ;
- c. Tanpa peneng / tanda pelunasan pajak ;
- d. Terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan ;
- e. Perletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam gambar TataLetak Bangunan (TLB) ;
- f. Tidak sesuai lagi dengan Rekomendasi konstruksi ;
- g. Tidak terawat dengan baik.
- h. Mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu pengguna jalan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo terkait dengan penyelenggaraan reklame adalah melakukan **klarifikasi konstruksi** bagi penyelenggaraan reklame yang memasang reklame seperti: reklame megatron, videstron, large electronic display, dan papan/billboard dengan ukuran melebihi 96 m² . Sehubungan dengan itu perizinan reklame baru diterbitkan setelah rancang bangun reklame mendapat klarifikasi dan persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Klarifikasi sebagaimana dimaksud meliputi aspek luas lahan, konstruksi, keamanan dan lingkungan sekitar. [Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 11 Tahun 2009 pasal 10 ayat (2)].

Data tentang klarifikasi konstruksi bangunan menyelenggarakan reklame yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo periode Januari sampai dengan Desember 2014 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.



Berdasarkan data pada grafik tersebut di atas, menunjukkan bahwa layanan non-perijinan klarifikasi konstruksi reklame bagi pemasang reklame di Kabupaten Sidoarjo terdapat 93 kegiatan. Dari jumlah tersebut klarifikasi konstruksi reklame baru sebanyak 56 kegiatan dan 37 perpanjangan. Volume kegiatan terbesar berada di bulan Maret, April dan Mei, dimana jumlahnya berkisar 20 kegiatan baik klarifikasi konstruksi reklame perpanjangan maupun baru. (untuk mendapatkan data lebih detail dapat di lihat pada tabel 5.4.

Ditinjau dari kinerja layanan non perijinan dapat dilihat bahwa kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan, rata-rata dikerjakan dalam waktu 12.59 atau 13 hari kerja dalam menyelesaikan satu pekerjaan. Secara rinci penyelesaian

pekerjaan minimal dapat diselesaikan selama 3 hari dan maksimal 50 hari. Dengan demikian rata-rata penyelesaian pekerjaan masih tergolong lambat. Informasi sementara diupayakan bahwa penyelesaian pekerjaan pelayanan non-perijinan klarifikasi konstruksi reklame selama 7 hari kerja dengan catatan dokumen yang diajukan telah lengkap (lengkap sesuai yang dipersyaratkan). Yang menjadi catatan peneliti dalam kaitan untuk mengukur kecepatan pelayanan baik perijinan maupun non-perijinan mestinya ditetapkan melalui SPM dan SOP pelayanan. Sementara hingga penelitian ini dilaksanakan bahwa SPM dan SOP pelayanan perijinan dan non perijinan di DPU Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo belum dimilikinya.

Tabel 5.4. Data Klarifikasi Konstruksi Reklame Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Januari s/d Juli 2014)

Bulan	No	Jenis Bangunan Reklame – Penyelenggara Reklame	Lokasi Bangunan	Status	Waktu Penyelesaian - Permohonan – Penerbitan SK (hari)
Januari	1	Cat Aga Super – CV Elok Manis Advertising	Jl. A Yani (sebelah SPBU Aloha) Sawotratap Gedangan	Perpanjangan	7
	2	Khongguan - CV Elok Manis Advertising	Jl. A Yani (sebelah SPBU Aloha) Sawotratap Gedangan	Perpanjangan	7
	3	Natasha Skin Care – CV Natasha Skin Care	Jl. Jaksa Agung Suprpto 4A Sidokumpul - Sidoarjo	Perpanjangan	25
	4	Juanda Regency – PT. Grahanusa Cahya Raya	Jl. Raya Pabean (depan lokasi perumahan) Desa Pabean Sedati	Perpanjangan	6
	5	Cat Aga Super – CV Elok Manis Advertising	Simpang Empat Jl. Arteri Porong – Juwet Kenongo - Porong	Baru	20
Februari	1	Alfamidi – PT. Midi Utama Indonesia	Jl. Wisma Tropodo Block AB 3-4 – Tropodo Waru	Perpanjangan	18
	2	Salonpas Hisamitsu – PT Hisamitsu Farma Indonesia	Jl Raya Buduran – Banjarkemantren Buduran	Perpanjangan	7
	3	Suzuki – PT. Kharisma Karya Lestari	Jl. Raya Aloha – Sawotratap – Gedangan	Baru	7
	4	Klien – PT Jet Media Promotion	Simpang Empat Jl. Diponegoro – Jl Teuku Umar – Sidokumpul Sidoarjo	Baru	8
	5	MM Resto – PT Mamin Resto	Jl. Raya By Pass Juanda Baru 88 – Sedati Gede – Sedati	Baru	3
	6	Klien–Tinton Arifandi	Jl. Raya Buduran - Buduran	Baru	3
	7	Klien–Mochammad Hasyim Asyari	Simpang Tiga Jl. Raya Keterungan – Keterungan Krian	Baru	6
	8	Klien – Mochammad Hasyim Asyari	Simpang Tiga Jl. Raya Tropodo – Tropodo Krian	Baru	6
	9	Djarum – M. Sholikhin	Jl. Bayangkari - Porong	Baru	6

Bulan	No	Jenis Bangunan Reklame – Penyelenggara Reklame	Lokasi Bangunan	Status	Waktu Penyelesaian - Permohonan – Penerbitan SK (hari)
	10	Perumahan Natura	Jl. Raya Buduran (pintu masuk AI – Ghozini) Buduran	Baru	4
Maret	1	Maspion I – PT Maspion I	Jl. Raya Aloha – Sawotratap - Gedangan	Perpanjangan	8
	2	Klien – CV. Anda Advertising	Jl. Gajah Mada 02 - Sidoarjo	Perpanjangan	16
	3	Alfamidi – PT Midi Utama Indonesia	Pulungan 87 - Sedati	Perpanjangan	6
	4	Alfamidi – PT Midi Utama Indonesia	Taman Pinang Indah BF-4 Sidoarjo	Perpanjangan	6
	5	Jamu Iboe – Hj Sholihah	Jl. Gajah Mada 209 Sidoarjo	Perpanjangan	16
	6	Centra Spring Bed – Citra Yuda Erlangga	Jl. Sisingamanggaraja - Sidoarjo	Perpanjangan	16
	7	Hypermart – PT. Matahari Putra Prima, Tbk.	Jl. Raya jati 01 - Sidoarjo	Perpanjangan	21
	8	Kobexindo – PT. Kobexindo Tractor	Jl Raya Bandara Juanda Km.3 - Sedati	Perpanjangan	25
	9	Klien - PT. Rainbow Asia Poster	Tol Gate Juanda – Waru Sidoarjo	Perpanjangan	39
	10	Citra Garden – CV. Surabaya Dwi Mandiri	Lingkar Barat – Pegerwojo Buduran	Perpanjangan	14
	11	Grace – PT Berkat Anugera Raya	Berbek Industri III/29 - Waru	Perpanjangan	7
	12	Bank Jatim – CV. Sarana Multi	Aloha – Sawotratap Gedangan	Perpanjangan	20
	13	Amarican Springbed - CV. Sarana Multi	Jl. Raya Waru (Aloha) Sawotratap Gedangan	Perpanjangan	20
	14	Klien – PT Adhi Kartika Jaya	Jl. S. Parman - Sawotratap Gedangan	Baru	10
	15	Klien – PT Adhi Kartika Jaya	Jl. Raya Gedangan - Sruni Gedangan	Baru	10
	16	Klien DM Advertising	Simpang Empat Jl. A. Yani no 110 Gedangan	Baru	8
	17	Klien CV. View Focus Advertising	Simpang Tiga Jl. Raya Tulangan – Kenongo Tulangan	Baru	10
	18	Klien CV Mutiara Nusantara Utama	Jl. Pahlawan (Pojoek Gor) Lemah Putro - Sidoarjo	Baru	10
	19	Djarum	Simpang Tiga Jl. Raya Wonocolo (PDAM)	Baru	10
	20	Klien CV. Surabaya Dwi Mandiri	Simpang Tiga Jl. Raya Cemang Kalang	Baru	4
21	Perumahan Sukodono Raya – PT. Gota Mulya	Simpang Tiga Jl. Raya Kletek (Sebelah Pos Polisi) Kletek Taman	Baru	10	
April	1	Klien – CV. Putro Joyo	Simpang Tiga Jl. Raya Krembung Sidoarjo	Baru	8
	2	Djarum – CV Rajawali Citra Buana	Simpang Tiga Jl. Raya Tambak Sawah	Baru	16
	3	Klien - CV. Putro Joyo	Jl. Raya Bayang Kari Porong	Baru	4
	4	Sampoerna - CV. Putro Joyo	Simpang Tiga Jl. Raya Bebekan WonocoloTaman	Baru	3
	5	Mc. Donald - CV. Putro Joyo	Simpang Empat Jl. Raya Pebean Sedati	Baru	12
	6	Indomart – PT Indomaret	Jl. Jenggolo – Gedangan	Baru	6

Bulan	No	Jenis Bangunan Reklame – Penyelenggara Reklame	Lokasi Bangunan	Status	Waktu Penyelesaian - Permohonan – Penerbitan SK (hari)
		Prismatama			
	7	Klien –Hayu Nugrahani	Jl. Raya Jati RT03 / RW01 - Jati	Baru	15
	8	Klien – PT Recma Mitra Tama Advertising	Simpang Empat Jl Raya Dungus – Sukodono	Baru	4
	9	Klien - CV. Putro Joyo	Simpang Tiga Jl Raya Ketegan – Taman	Baru	7
	10	Klabe Farma – PT. Multi Artistika Citra	Raya Kletek no. 137 Taman	Baru	12
	11	Klien – Vicky Marcia Lekatompessy	Jl. Raya Waru (simpang ex Pabrik Soda) Kedung Rejo – Waru	Baru	20
	12	Klien – Hayu Nugrahani	Pasar Wadung Asri – Wadung Asri Waru	Baru	13
	13	Klien – Hayu Nugrahani	Simpang Tiga Jl. Raya Krian (Timur RPH Krian) – Prambon	Baru	13
	14	Klien PT. Mega Akbar Superindo	Jl. Raya Waru (depan PT. Dirgahayu) Kedung Rejo - Waru	Baru	19
	15	Graha Kota Perumahan – CV Surabaya Dwi Mandiri	Jl. Pahlawan (PojoK GOR) Lemah Putro	Baru	7
	16	Produk Seluler – CV Surabaya Dwi Mandiri	Jl. Pahlawan (PojoK Bakso Kota) Lemah Putro	Baru	7
	17	Produk Interbat – PT Interbat	Jl. Mangundripojo No 01 Tebel - Buduran	Perpanjangan	34
	18	Yuki Springbed – Lilis Sumarno	Jl. Imam Bonjol 105 Krian	Perpanjangan	41
	19	Produk BTN – PT Oxycy Jaya Putra	Jl. Jenggolo 55 Pucang	Perpanjangan	33
	20	Klen - PT Oxycy Jaya Putra	Jl. Jenggolo 55 (sebelah utara) Pucang	Perpanjangan	10
Mei	1	Akari – PT. Panggung Elektrik Citra Buana	Jl. Raya Waru 01 (depan PT. PEC) Waru	Perpanjangan	8
	2	Davanti - PT. Panggung Elektrik Citra Buana	Jl. Raya Waru 01 (depan PT. PEC) Waru	Perpanjangan	8
	3	Maxel - PT. Panggung Elektrik Citra Buana	Jl. Raya Waru 01 (depan PT. PEC) Waru	Perpanjangan	8
	4	Panarec – PT. Panggung Elektrik Citra Buana	Jl. Raya Waru 01 (depan PT. PEC) Waru	Perpanjangan	8
	5	ZTE – PT. Panggung Elektrik Citra Buana	Jl. Raya Waru 01 (depan PT. PEC) Waru	Perpanjangan	8
	6	Ferro - PT. Ferro Ceramic Colour Indonesia	Beringin Bendo 35 RT.08 RW.04 Taman	Perpanjangan	7
	7	Izusu - PT. Astra Internasional	Jl. Raya Waru KM 15 Sawotratap Waru	Perpanjangan	10
	8	Produk Semen Gresik – CV Rajawali Citra Buana	Utara Akses Tol Pembatasan Dukuh Menanggal Bungurasih Waru	Perpanjangan	16
	9	Klien – PT . Mega Akbar Superindo	Jl. Raya Aloha - Sawotratap Waru	Baru	7
	10	Semen Gresik – PT. Adi Kartikakaya	Jl. Gajah Mada 215 Bulu Sidokare	Baru	9
	11	Rokok Sampoerna – CV Karya Media	Jl. Taman Kanak – kanak 145 Keboananom	Baru	6
	12	Rokok Sampoerna – CV Karya	Simpang Empat Jl. Raya Dungus	Baru	6

Bulan	No	Jenis Bangunan Reklame – Penyelenggara Reklame	Lokasi Bangunan	Status	Waktu Penyelesaian - Permohonan – Penerbitan SK (hari)
		Media	Sukodono		
	13	Indosat – CV. Elemen	Jl. Raya Sedati – Tropodo Waru	Baru	12
	14	Indosat – CV. Elemen	Jl. Raya Medaeng – Medaeng Waru	Baru	12
	15	Indosat – CV. Elemen	Simpang empat Jl. Pahlawan – Jl Tengku Umar – Sidoarjo	Baru	12
	16	Klien – Willy Suwono	Raya Medaeng (selatan Gang) –Medaeng Waru	Baru	38
	17	Klien – Willy Suwono	Raya Medaeng – Medaeng Waru	Baru	38
	18	Klien – Agus Sumartono	Jl. Abd. Rachman 31a RT.15 RW 06 Pabean Sedati	Baru	4
	19	Bank Permata - Sutomo	Jl. A. Yani 41 Sidokumpul - Sidoarjo	Baru	8
	20	Klien – Joko Suharto	Jl. Sultan Agung (Bakso Solo) Magersari Sidoarjo	Baru	10
Juni	1	Rokok Wismilak – CV Tjipto Putra Mandiri	Jl. Raya Mayjen Sungkono (SPBU) Pucang Sidoarjo	Baru	13
	2	Perum Taman Dhika – CV NSR Advertising	Jl. Raya Aloha – Sawotratap – Gedangan	Baru	20
	3	Gudang Garam – PT Graha Surya Media	Jl. Raya Aloha - Sawotratap – Gedangan	Baru	50
	4	Klien – Lilik Ardito	Jl. Raya by pass Juanda Baru Sedati Gede	Baru	14
	5	Monde Nissin – CV. Elok Manis Advertising	Jl. Raya Waru Kedung Rejo Waru	Perpanjangan	28
	6	Kacang Mayasi – PT Manohara Asri	Jl. By Pass Krian KM 24 – Ponokawan Krian	Perpanjangan	15
	7	Sampoerna – CV. Ontro Promotion	Simpang tiga Jl. Birgjen Katamso 58 Kepuhkiriman Waru	Perpanjangan	14
	8	Hypermart – PT. Matahari Putra Prima	Raya Jati 01 (diatas Gedung Sitos) Jati Sidoarjo	Perpanjangan	10
Juli	1	Rokok Wismilak – CV. B&D Advertising	Jl. Pahlawan (pintu masuk keluar tol Sidoarjo) Jati Sidoarjo	Baru	6
	2	B&D Advertising – CV. B&D Advertising	Simpang tiga Jl. Raya Banjar Kemantren - Buduran	Baru	6
	3	Klien – PT. Teamwork Kreasi	Jl. Pahlawan (pintu masuk keluar tol Sidoarjo) Jati Sidoarjo	Baru	7
	4	Sampoerna All Brands – CV. Garuda Real Image	Jl. Raya Tulangan (depan pasar tulangan) kenongo - Tulangan	Baru	14
	5	Sampoerna All Brands – CV. Garuda Real Image	Jl. Raya Cemengkalang 12 - Sidoarjo	Baru	10
	6	Nirwana Kahuripan – PT Delta Prisma Abadi	Tol Surabaya – Gempol KM 24 – 400 A – Sidokepun Buduran	Baru	7
	7	Kanmuri UD Multiprima – PT. Sentra Tama Mandiri	Jl. Raya Buduran 65 - Buduran	Baru	5
	8	CV. Sumber Teknik - CV. Sumber Teknik	Jl Raya by Pass Krian KM 28 – Sidomojo Krian	Perpanjangan	5
	9	Wadimor Tentu Sarung Kita – PT Sukorejo Indah Textile	Simpang Tiga Jl. Raya Kedungturi – Medaeng Waru	Perpanjangan	10

Sumber: DPU – Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo 2014

5.1.3. Kinerja Program dan Anggaran

Jika melihat perkembangan pendapatan daerah dan realisasi pengeluaran daerah dalam tiga tahun terakhir (2010 – 2012) menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010 target pendapatan mencapai Rp. 1.588.321.489.393,04 dan realisasi pendapatan mencapai Rp. 1.674.833.481.145,32. Sedangkan pada tahun 2012 target pendapatan daerah mencapai Rp. 2.284.511.936.806,00 dengan realisasi pendapatan mencapai Rp. 2.317.444.096.384,41. Untuk target belanja pada tahun 2010 mencapai Rp. 1.698.329.944.563,66 dengan realisasi belanja mencapai Rp. 1.584.364.436.412,19. Sedangkan pada tahun 2012 target belanja mencapai Rp. 2.565.342.909.483,71 dengan realisasi belanja mencapai Rp. 2.238.524.285.888,37. Struktur anggaran daerah ini menunjukkan kemampuan keuangan dan pembiayaan pembangunan yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo. Peningkatan realisasi pendapatan daerah akan mendorong peningkatan realisasi belanja daerah untuk pembangunan.

Tabel 5.5. Perkembangan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2012

APBD Kabupaten Sidoarjo	Tahun		
	2010	2011	2012
Pendapatan Daerah	1,588,321,489,393.04	1,905,993,882,859.38	2,284,511,936,806.00
Realisasi Pendapatan Daerah	1,674,833,481,145.32	2,005,191,397,714.27	2,317,444,096,384.41
Belanja Daerah	1,698,329,944,563.66	2,093,437,864,285.53	2,565,342,909,483.71
Realisasi Belanja Daerah	1,584,364,436,412.19	1,828,757,388,074.71	2,238,524,285,888.37

Sumber: Diolah dari LKPJ Bupati Sidoarjo.

Konsekuensi peningkatan APBD Kabupaten Sidoarjo juga dirasakan pada alokasi anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2012 alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp. 54.662.242.350,- dan meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp. 164.379.363.112, . Peningkatan alokasi anggaran cukup signifikan dan berdampak pada alokasi anggaran setiap bidang dalam bentuk program dan kegiatan sebagai tugas,

pokok dan fungsi sebagai kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.

Pada tahun 2012 alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 11 program yang difokuskan untuk 4 (empat) program, yaitu:

1. Penyediaan sarana dan prasarana wajib belajar dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 6.076.347.000, atau 11,12 persen.
2. Penyediaan sarana dan prasarana perumahan dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 7.087.695.100,- atau 12,97 persen.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur pemerintah dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 15.988.331.000,- atau 29,25 persen.
4. Meningkatnya sarana air bersih dan sanitasi dasar, jalan lingkungan serta buzem, rumah pompa dan drainase dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 22.578.024.250,- atau 41,30 persen.

Sedangkan pada tahun 2013 alokasi anggaran digunakan untuk melaksanakan 17 program yang difokuskan untuk 3 (tiga) program, yaitu:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur pemerintah dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 26.528.477.200,- atau 16,14 persen.
2. Penyediaan sarana dan prasarana wajib belajar dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 33.531.792.450,- atau 20,40 persen.
3. Meningkatnya sarana air bersih dan sanitasi dasar, jalan lingkungan serta buzem, rumah pompa dan drainase dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 47.348.366.833,- atau 28,80 persen.

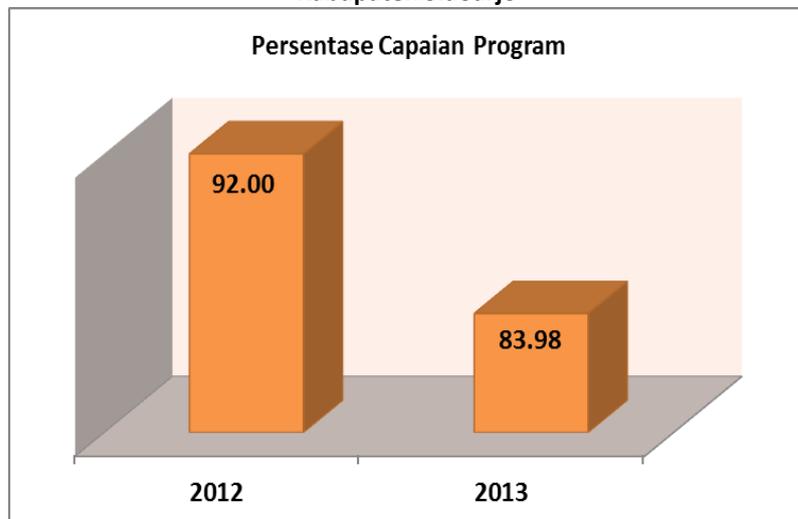
Kinerja anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan dengan perbandingan alokasi anggaran serta membandingkan realisasi anggaran. Kinerja anggaran menunjukkan bahwa:

1. Pada tahun 2012 dengan alokasi anggaran mencapai Rp. Rp. 54.662.242.350,- dapat direalisasikan mencapai Rp. 49.395.990.093,- atau capaian kinerja mencapai 90,37 persen.

2. Pada tahun 2013 dengan alokasi anggaran mencapai Rp. Rp. 164.379.363.112,- dapat direalisasikan mencaapai Rp. 137.546.574.045,- atau capaian kinerja mencapai 83,68 persen.

Meski pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah alokasi anggaran dan peningkatan jumlah program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, tetapi justru **capaian kinerja menunjukkan penurunan** jika dibandingkan kondisi tahun 2012. Berikut ini perbandingan caian kinerja tahun 2012 dan 2013 adalah:

Grafik 5.13. Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2012 dan 2013 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo



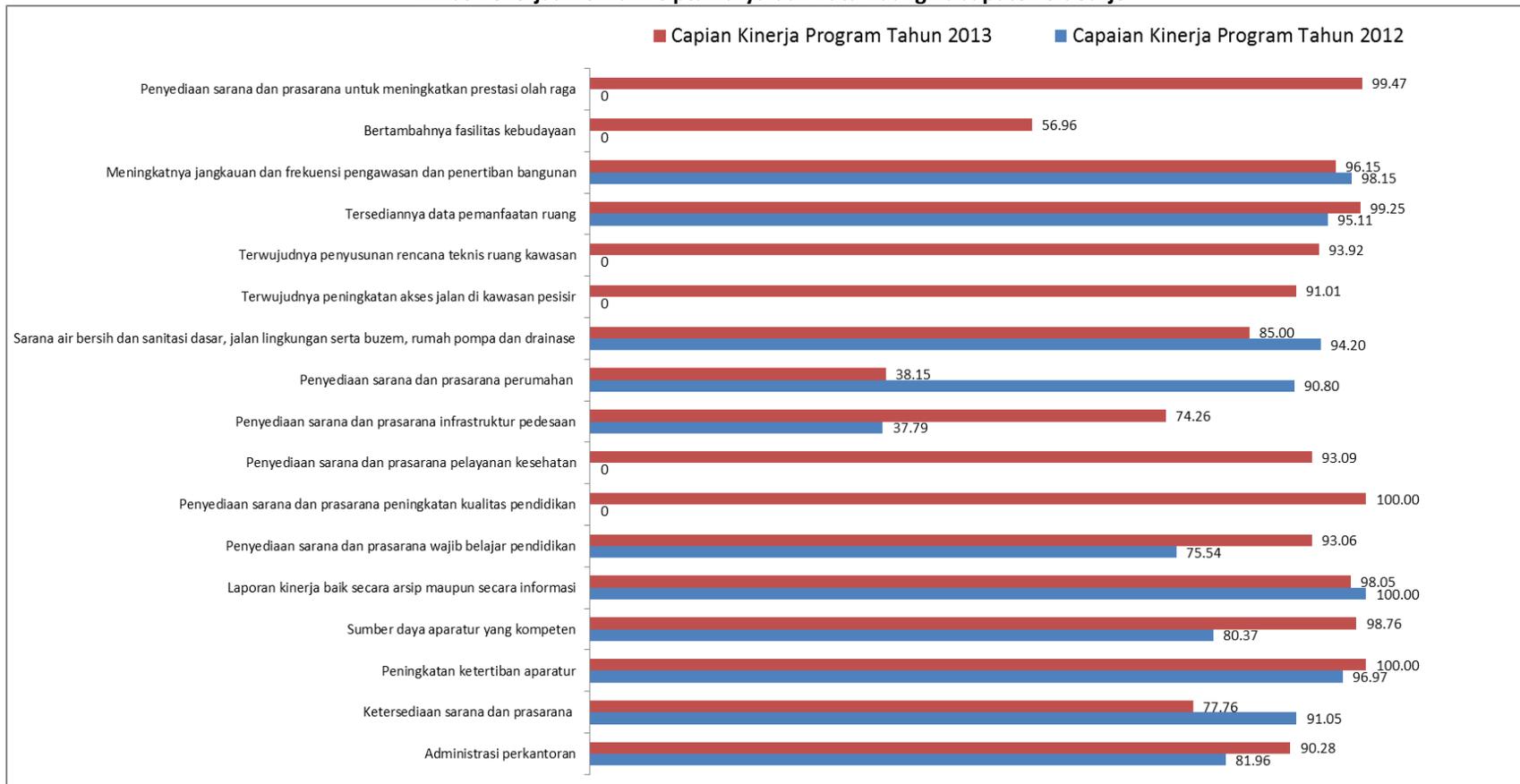
Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

Hasil capaian kinerja tahun 2013 menunjukkan beberapa program perlu mendapatkan perhatian karena persentase capaian kinerja program masih < 90 persen, antara lain:

1. Program ketersediaan sarana dan prasarana dengan capaian kinerja sebesar 77,76 persen.
2. Program penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan dengan capaian kinerja sebesar 74,26 persen.
3. Program penyediaan sarana dan prasarana perumahan dengan capaian kinerja sebesar 38,15 persen.

4. Program sarana air bersih dan sanitasi dasar, jalan lingkungan serta buzeem, rumah pompa dan drainase dengan capaian kinerja sebesar 85,00 persen.
5. Program bertambahnya fasilitas kebudayaan dengan capaian kinerja sebesar 56,96 persen.

**Grafik 5.14. Persentase Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2012 dan 2013
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo**



Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

Tabel 5.6. Perbandingan Kinerja Anggaran Tahun 2012 dengan 2013
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sidoarjo

No.	Sasaran Strategis	Anggaran Tahun 2012				Anggaran Tahun 2013			
		Pagu	%	Realisasi	%	Pagu	%	Realisasi	%
1	Administrasi perkantoran	790,570,000	1.45	647,964,543	81.96	1,162,824,750	0.71	1,049,762,572	90.28
2	Ketersediaan sarana dan prasarana	15,988,331,000	29.25	14,558,060,505	91.05	26,528,477,200	16.14	20,629,600,376	77.76
3	Peningkatan ketertiban aparaturnya	10,230,000	0.02	9,920,000	96.97	11,055,000	0.01	11,055,000	100.00
4	Sumber daya aparaturnya yang kompeten	76,520,000	0.14	61,500,000	80.37	200,000,000	0.12	197,525,000	98.76
5	Laporan kinerja baik secara arsip maupun secara informasi	30,000,000	0.05	30,000,000	100.00	274,450,000	0.17	269,105,000	98.05
6	Penyediaan sarana dan prasarana wajib belajar pendidikan	6,076,347,000	11.12	4,590,274,095	75.54	33,531,792,450	20.40	31,204,801,861	93.06
7	Penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kualitas pendidikan	-	-	-	-	12,510,644,313	8.18	12,510,644,313	100.00
8	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	-	-	-	-	11,398,233,600	6.93	10,610,570,136	93.09
9	Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan	286,600,000	0.52	108,305,000	37.79	251,888,750	0.15	187,047,492	74.26
10	Penyediaan sarana dan prasarana perumahan	7,087,695,100	12.97	6,435,781,110	90.80	13,215,417,322	8.04	5,041,368,117	38.15
11	Meningkatnya sarana air bersih dan sanitasi dasar, jalan lingkungan serta buzem, rumah pompa dan drainase	22,578,024,250	41.30	21,268,166,240	94.20	47,348,366,833	28.80	40,247,309,118	85.00
12	Terwujudnya peningkatan akses jalan di kawasan pesisir	-	-	-	-	5,000,000,000	3.04	4,550,430,000	91.01
13	Terwujudnya penyusunan rencana teknis ruang kawasan	-	-	-	-	756,800,000	0.46	710,755,000	93.92
14	Tersediannya data pemanfaatan ruang	650,000,000	1.19	618,199,600	95.11	100,000,000	0.06	99,250,000	99.25
15	Meningkatnya jangkauan dan frekuensi pengawasan dan penertiban bangunan	1,087,925,000	1.99	1,067,819,000	98.15	1,060,800,000	0.65	1,019,970,700	96.15
16	Bertambahnya fasilitas kebudayaan	-	-	-	-	1,960,700,000	1.19	1,116,735,560	56.96
17	Penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan prestasi olah raga	-	-	-	-	8,133,383,800	4.95	8,090,643,800	99.47
TOTAL		54,662,242,350	100.00	49,395,990,093	90.37	164,379,363,112	100.00	137,546,574,045	83.68

Sumber: Diolah dari LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sidoarjo

Tabel 5.7. Program dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan		Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran	
						Jumlah	%
1	Meningkatkan tertib administrasi perkantoran	Prosentase laporan yang diselesaikan	1	Program pelayanan administrasi perkantoran		1,162,824,750	0.71
			a.	penyediaan jasa surat menyurat	6,000,000		
			b.	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	250,000,000		
			c.	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20,000,000		
			d.	penyediaan jasa administrasi keuangan	312,856,000		
			e.	penyediaan alat tulis kantor	73,288,750		
			f.	penyediaan barang cetak dan penggandaan	29,900,000		
			g.	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18,520,000		
			h.	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17,260,000		
			i.	penyediaan bahan logistik kantor	150,000,000		
			j.	penyediaan makanan dan minuman	5,000,000		
			k.	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	280,000,000		
2	Ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat	Prosentase sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi syarat	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		26,528,477,200	16.14
			a.	pengadaan peralatan gedung kantor	506,160,000		
			b.	pengadaan meubelair	29,750,000		
			c.	pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	1,153,440,000		
			d.	pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas dan operasional	131,310,000		
			e.	pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	53,500,000		
			f.	rehabilitasi sedang atau berat gedung kantor	24,654,317,200		
3	Peningkatan ketertiban aparatur	Tersedianya pakaian dinas	3	Program peningkatan disiplin aparatur		11,055,000	0.01
			a.	pengadaan pakaian dinas	11,055,000		
4	Terpenuhinya sumber daya aparatur yang kompeten	Terlaksananya pelatihan aparatur	4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		200,000,000	0.12
			a.	pendidikan dan pelatihan formal	200,000,000		
5	Tersusunnya laporan kinerja baik secara arsip maupun secara informasi	Tersusunnya laporan keuangan capaian kinerja dan keuangan secara akurat	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		274,450,000	0.17
			a.	penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	274,450,000		
6	Penyediaan sarana dan prasarana wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Terlaksananya rehabilitasi gedung sekolah	6	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun		33,531,792,450	20.40
			a.	rehabilitasi sedang atau berat bangunan sekolah	33,531,792,450		
7	Penyediaan sarana dan prasarana untuk membantu	Teranggunya gedung	7	Program pendidikan menengah		13,445,173,407	8.18

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan		Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran	
						Jumlah	%
	peningkatan kualitas pendidikan	sekolah		a. pembangunan gedung sekolah	13,445,173,407		
8	Penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan kesehatan	Terbangunnya gedung puskesmas atau puskesmas pembantu	8	Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas atau puskesmas pembantu dan jaringannya		11,398,233,600	6.93
				a. rehabilitasi sedang atau berat puskesmas atau puskesmas pembantu	11,398,233,600		
9	Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan	Terbangunnya penataan lingkungan permukiman penduduk pedesaan	9	Program pembangunan insfrastruktur pedesaan		251,888,750	0.15
				a. penataan lingkungan permukiman penduduk pedesaan	251,888,750		
10	Penyediaan sarana dan prasarana perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Terbangunnya sarana dan prasarana rusunawa	10	Program pengembangan perumahan		13,215,417,322	8.04
				a. pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	4,715,822,980		
				b. monitoring, evaluasi dan pelaporan	601,175,000		
				c. penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan rusunawa	912,339,317		
				d. pembangunan sarana dan prasarana rumah sehat sederhana (DAK)	6,986,080,025		
11	Daerah-daerah yang rawan air bersih, masyarakat miskin di pedesaan mauun di perkotaan yang tidak terdistribusi air PDAM Penyediaan akses yang memadai dan tertata serta membangun jalan dengan membuka keterisolasian suatu daerah Pengendalian banjir di daerah rawan banjir khususnya perumahan dan permukiman	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi dasar, jalan lingkungan serta buzem, rumah pompa dan drainase	11	Program lingkungan sehat perumahan		47,348,366,833	28.80
				a. penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	2,383,567,100		
				b. pembangunan jalan lingkungan	26,352,876,639		
				c. pembangunan saluran drainase, plengsengan dan busem lingkungan perumahan	13,446,799,997		
				d. penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK)	5,165,123,097		
12	Terwujudnya peningkatan akses jalan di kawasan pesisir	Terbangunnya jalan lingkungan di kawasan pesisir	12	Program pengembangan kawasan		5,000,000,000	3.04
				a. pembangunan jalan usaha produksi	5,000,000,000		
13	Terwujudnya penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Tersusunnya rencana teknis ruang kawasan serta tertatannya ruang kawasan	13	Program perencanaan tata ruang		756,800,000	0.46
				a. penyusunan rencana teknis ruang kawasan	756,800,000		
14	Tersediannya data pemanfaatan ruang	Tertatanya pemanfaatan ruang	14	Program pemanfaatan ruang		100,000,000	0.06
				a. survei dan pemetaan	100,000,000		
15	Meningkatnya jangkauan dan frekuensi pengawasan dan penertiban bangunan	Terlaksananya kegiatan operasional	15	Program pengendalian pemanfaatan ruang		1,060,800,000	0.65
				a. pengawasan pemanfaatan ruang	1,060,800,000		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan		Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran		
						Jumlah	%	
16	Bertambahnya fasilitas kebudayaan	Terwujudnya pembangunan gedung serba guna	16	Program pengelolaan kekayaan budaya		1,960,700,000	1,960,700,000	1.19
				a. pembangunan gedung serba guna				
17	Penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan prestasi olah raga	Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga dengan terbangunnya rehabilitasi gedung olahraga	17	Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga		8,133,383,800	8,133,383,800	4.95
				a. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga				
TOTAL					164,379,363,112	164,379,363,112	100.00	

Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2013.

Tabel 5.8. Capaian Kinerja Program dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian Program (%)	
				Nilai Pagu	Realisasi		
1	Meningkatkan tertib administrasi perkantoran	Prosentase laporan yang diselesaikan	1	Program pelayanan administrasi perkantoran			
			a.	penyediaan jasa surat menyurat	6,000,000	6,000,000	100.00
			b.	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	250,000,000	202,977,097	81.19
			c.	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20,000,000	13,554,700	67.77
			d.	penyediaan jasa administrasi keuangan	312,856,000	284,633,000	90.98
			e.	penyediaan alat tulis kantor	73,288,750	73,000,000	99.61
			f.	penyediaan barang cetak dan penggandaan	29,900,000	22,495,500	75.24
			g.	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18,520,000	13,872,000	74.90
			h.	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17,260,000	12,945,000	75.00
			i.	penyediaan bahan logistik kantor	150,000,000	150,000,000	100.00
			j.	penyediaan makanan dan minuman	5,000,000	5,000,000	100.00
			k.	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	280,000,000	265,285,275	94.74
			2	Ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat	Prosentase sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi syarat	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a.	pengadaan peralatan gedung kantor	506,160,000				482,470,000	95.32
b.	pengadaan meubelair	29,750,000				28,600,000	96.13
c.	pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	1,153,440,000				1,132,618,600	98.19
d.	pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas dan operasional	131,310,000				131,310,000	100.00
e.	pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	53,500,000				42,511,000	79.46
f.	rehabilitasi sedang atau berat gedung kantor	24,654,317,200				18,812,090,776	76.30
3	Peningkatan ketertiban aparatur	Tersedianya pakaian dinas	3	Program peningkatan disiplin aparatur			
			a.	pengadaan pakaian dinas	11,055,000	11,055,000	100.00
4	Terpenuhinya sumber daya aparatur yang kompeten	Terlaksananya pelatihan aparatur	4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
			a.	pendidikan dan pelatihan formal	200,000,000	197,525,000	98.76
5	Tersusunnya laporan kinerja baik secara arsip maupun secara informasi	Tersusunnya laporan keuangan capaian kinerja dan keuangan secara akurat	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
			a.	penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	274,450,000	269,105,000	98.05
6	Penyediaan sarana dan prasarana wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Terlaksananya rehabilitasi gedung sekolah	6	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun			
			a.	rehabilitasi sedang atau berat bangunan sekolah	33,531,792,450	31,204,801,861	93.06
7	Penyediaan sarana dan prasarana untuk	Teranggunya gedung	7	Program pendidikan menengah			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan		Anggaran		Capian Program (%)
					Nilai Pagu	Realisasi	
	membantu peningkatan kualitas pendidikan	sekolah		a. pembangunan gedung sekolah	13,445,173,407	12,510,644,313	93.05
8	Penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan kesehatan	Terbangunnya gedung puskesmas atau puskesmas pembantu	8	Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas atau puskesmas pembantu dan jaringannya			
			a. rehabilitasi sedang atau berat puskesmas atau puskesmas pembantu	11,398,233,600	10,610,570,136	93.09	
9	Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan	Terbangunnya penataan lingkungan permukiman penduduk pedesaan	9	Program pembangunan infrastruktur pedesaan			
			a. penataan lingkungan permukiman penduduk pedesaan	251,888,750	187,047,492	74.26	
10	Penyediaan sarana dan prasarana perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Terbangunnya sarana dan prasarana rusunawa	10	Program pengembangan perumahan			
			a. pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	4,715,822,980	3,653,066,000	77.46	
			b. monitoring, evaluasi dan pelaporan	601,175,000	-	-	
			c. penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan rusunawa	912,339,317	729,429,117	79.95	
			d. pembangunan sarana dan prasarana rumah sehat sederhana (DAK)	6,986,080,025	658,873,000	9.43	
11	Daerah-daerah yang rawan air bersih, masyarakat miskin di pedesaan mauun di perkotaan yang tidak terdistribusi air PDAM Penyediaan akses yang memadai dan tertata serta membangun jalan dengan membuka keterisolasian suatu daerah Pengendalian banjir di daerah rawan banjir khususnya perumahan dan permukiman	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi dasar, jalan lingkungan serta buzem, rumah pompa dan drainase	11	Program lingkungan sehat perumahan			
			a. penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	2,383,567,100	1,845,504,000	77.43	
			b. pembangunan jalan lingkungan	26,352,876,639	22,509,550,900	85.42	
			c. pembangunan saluran drainase, plengsengan dan busem lingkungan perumahan	13,446,799,997	11,285,953,618	83.93	
			d. penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK)	5,165,123,097	4,606,300,600	89.18	
12	Terwujudnya peningkatan akses jalan di kawasan pesisir	Terbangunnya jalan lingkungan di kawasan pesisir	12	Program pengembangan kawasan			
			a. pembangunan jalan usaha produksi	5,000,000,000	4,550,430,000	91.01	
13	Terwujudnya penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Tersusunnya rencana teknis ruang kawasan serta tertatatnya ruang kawasan	13	Program perencanaan tata ruang			
			a. penyusunan rencana teknis ruang kawasan	756,800,000	710,755,000	93.92	
14	Tersediannya data pemanfaatan ruang	Tertatanya pemanfaatan ruang	14	Program pemanfaatan ruang			
			a. survei dan pemetaan	100,000,000	99,250,000	99.25	
15	Meningkatnya jangkauan dan frekuensi	Terlaksananya kegiatan	15	Program pengendalian pemanfaatan ruang			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan		Anggaran		Capaian Program (%)
					Nilai Pagu	Realisasi	
	pengawasan dan penertiban bangunan	operasional	a.	pengawasan pemanfaatan ruang	1,060,800,000	1,019,970,700	96.15
16	Bertambahnya fasilitas kebudayaan	Terwujudnya pembangunan gedung serba guna	16	Program pengelolaan kekayaan budaya			
			a.	pembangunan gedung serba guna	1,960,700,000	1,116,735,560	56.96
17	Penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan prestasi olah raga	Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga dengan terbangunnya rehabilitasi gedung olahraga	17	Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga			
			a.	peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	8,133,383,800	8,090,643,800	99.47
TOTAL					164,379,363,112	137,546,574,045	83.68

Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2013.

5.2. Permasalahan yang Dihadapi Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

Identifikasi permasalahan secara umum dalam pembangunan sarana dan prasarana bidang Cipta Karya di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Tingkat urbanisasi yang relative tinggi dan belum disertai oleh tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang diakibatkan oleh pertumbuhan urbanisasi tersebut maupun oleh “backlog” yang sudah ada sebelumnya.
2. Adanya disparitas regional secara ekonomi dan hal ini sangat terkait dengan tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.
3. Ketersediaan infrastruktur dan layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang belum merata ke semua golongan masyarakat (ummnya golongan masyarakat berpenghasilan rendah belum mendapat layanan yang setara dengan layanan bagi golongan masyarakat berpenghasilan menengah dan atas).
4. Degradasi lingkungan perkotaan pada umumnya dan belum berperannya secara maksimal Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dalam turut menciptakan Kabupaten Sidoarjo yang asri dan lestari.
5. Wajah fisik perkotaan yang semakin “semrawut” akibat belum maksimalnya fungsi perencanaan dan penerapan tata-bangunan khususnya di lingkungan perkotaan dan umumnya di pedesaan.
6. Keterbatasan kapasitas daerah dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

Identifikasi permasalahan persektor di Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

1. Pengembangan Pemukiman
 - a. Masih luasnya kawasan kumuh
 - b. Masih terbatasnya prasarana sarana dasar
 - c. Masih belum berkembang kawasan pedesaan potensial
2. Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - a. Penataan Lingkungan Pemukiman
 - ✚ Masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana sistem proteksi kebakaran.
 - ✚ Belum siapnya landasan hukum dan landasan operasional berupa RTBL untuk lebih melibatkan pemerintah daerah dan swasta dalam penyiapan infrastruktur guna pengembangan lingkungan pemukiman.
 - ✚ Menurunnya fungsi kawasan dan terjadi degradasi kawasan kegiatan ekonomi utama kota, kawasan tradisional bersejarah serta heritage.
 - ✚ Masih rendahnya dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan lingkungan pemukiman yang diindikasikan dengan masih kecilnya alokasi anggaran daerah untuk peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - b. Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara
 - ✚ Masih adanya kelembagaan bangunan gedung yang belum berfungsi efektif dan efisien dalam pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara.
 - ✚ Masih kurang lengkapnya peraturan daerah bangunan gedung untuk kawasan kota.
 - ✚ Belum berfungsinya Standar Pelayanan Minimum bi bidang pelayananan pembangunan lantai 3 lebih, rekomendasi pendirian menara telephon seluler, rekomendasi pembangunan reklame;

- ✚ Meningkatnya kebutuhan NSPM terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan).
- c. Penyelenggaraan Sistem Terpadu Ruang Terbuka Hijau
 - ✚ Masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana lingkungan hijau/terbuka, sarana olah raga.
- d. Kapasitas Kelembagaan Daerah
 - ✚ Masih terbatasnya kesadaran aparatur dan SDM pelaksana dalam pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung termasuk pengawasan.
 - ✚ Masih adanya tuntutan reformasi peraturan perundang-undangan dan peningkatan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi.
 - ✚ Masih perlu peningkatan dan pemantaban kelembagaan bangunan gedung di Kabupaten Sidoarjo dalam fasilitasi penyediaan perangkat pengaturan.
- 3. Penyehatan Lingkungan Pemukiman
 - a. Sektor Air Limbah
 - ✚ Belum optimalnya penanganan air limbah.
 - ✚ Tercemarnya badan air khususnya air baku oleh limbah.
 - ✚ Belum optimalnya manajemen air limbah.
 - b. Sektor Drainase
 - ✚ Kapasitas sistem drainase tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
 - ✚ Belum memadainya penyelenggaraan sistem drainase.
 - c. Sektor Persampahan
 - ✚ Peningkatan timbunan sampah akibat aktifitas produksi manusia.
 - ✚ Kapasitas tampung pengelolaan persampahan yang terbatas.
 - ✚ Belum optimalnya manajemen pengelolaan persampahan.
- 4. Pengembangan Kebutuhan Air Minum
 - a. Belum tersusunnya kebijakan strategi penyediaan air bersih (Jakstrada)
 - b. Terbatasnya pendanaan

- c. Menurunnya kualitas air baku.
 - d. Masih rendahnya cakupan dan kualitas layanan.
 - e. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan air minum.
5. Pengembangan Kelembagaan
- a. Belum optimalnya perencanaan pengembangan sumber daya manusia.
 - b. Belum memadainya struktur organisasi yang responsive terhadap tantangan pembangunan Bidang Cipta Karya.
 - c. Belum tersusunnya tata laksana organisasi yang sesuai dengan prinsip good governance untuk meningkatkan daya saing kota/kabupaten.
 - d. Belum efektifnya pengembangan tim koordinasi pembangunan kota/kabupaten/provinsi dalam pengembangan prasarana Bidang Cipta Karya.

5.3. Inovasi: Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

Arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo 2015 – 2019 berdasar arah pembangunan Kabupaten Sidoarjo dan isu strategis yang dihadapi, antara lain:

1. Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
 - a. Mendorong pemenuhan hak dasar masyarakat miskin atas perumahan yang layak huni di perkotaan dan pedesaan.
 -  Meningkatkan keterjangkauan masyarakat miskin terhadap perumahan yang layak dan sehat, serta meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat, serta meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin dan golongan rentan.
 -  Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat miskin dalam pembangunan rumah yang layak huni dan sehat.
 - b. Mendorong pemenuhan hak dasar masyarakat miskin terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan dan pedesaan.

- ✚ Meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah akan pentingnya penyediaan air bersih dan aman, dan sanitasi bagi masyarakat miskin.
 - ✚ Menyediakan sarana air bersih dan sarana sanitasi dasar bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah sulit air.
 - ✚ Meningkatkan ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin.
 - ✚ Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin mengenai pengelolaan sumber daya air dan pentingnya air minum yang bersih dan aman, serta sarana sanitasi dasar.
 - ✚ Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama dalam hal penyediaan air bersih dan aman, serta sanitasi bagi masyarakat termasuk masyarakat miskin.
 - ✚ Meningkatkan perlindungan terhadap jaminan akses masyarakat miskin ke air minum yang bersih dan aman serta sanitasi.
2. Arah Kebijakan Pembangunan, Perbaikan dan Pemeliharaan Infrastruktur
- a. Meningkatkan penyediaan hunian rumah sederhana sehat, rumah susun sederhana sewa dengan melibatkan kelompok masyarakat.
 - b. Mendorong pembangunan perumahan yang bertumpu pada kemandirian (swadaya) kelompok masyarakat.
 - c. Menyusun dan mengembangkan pola subsidi baru pembangunan perumahan yang tepat sasaran.
 - d. Mengembangkan teknologi pembangunan bidang perumahan dan pemukiman yang tepat guna.
 - e. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mencapai sasaran cakupan pelayanan air minum di perkotaan dan pedesaan, serta pengendalian kebocoran penyaluran air minum.

- f. Mendorong tersusunan regionalisasi pengelolaan air minum melalui kebijakan dan strategi daerah (JAKSTRADA).
 - g. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perkotaan dan pedesaan.
 - h. Mendorong terwujudnya sistem pembuangan air limbah terpusat di perkotaan.
 - i. Meningkatkan cakupan layanan sarana sanitasi dasar pedesaan.
 - j. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sampah melalui kerjasama antar daerah dengan mitra swasta.
 - k. Meningkatkan peranserta dan seluruh potensi masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana persampahan dan drainase, termasuk mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan persampahan.
 - l. Percepatan pembangunan kawasan pedesaan terpencil maupun menengah agar menjadi motor penggerak pembangunan wilayah sekitarnya.
3. Arah Kebijakan Tata Ruang
- a. Mengoptimalkan peran rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.
 - b. Mendorong peningkatan pemerataan pembangunan dengan percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah melalui pembentukan sentra-sentra baru.
 - c. Pemantaban sistem perkotaan PKN di Kabupaten Sidoarjo.
 - d. Peningkatkan sistem keterkaitan antara kantong produksi utama di Sidoarjo dengan pusat pengelolaan dan pemasaran sebagai inti pengembangan agropolitan.

Tabel 5.9. Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Dalam Meningkatkan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo 2015 - 2019

No.	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2015	2016	2017	2018	2019
Bidang Kesekretariatan								
1.	Admistrasi perkantoran yang memadai untuk menunjang pelayanan	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran yang dapat meningkatkan kinerja aparatur	Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI	Menyediakan sarana prasarana aparatur	95%	98%	100%	100%	100%
3.	Peningkatan disiplin pegawai	Peningkatan ketertiban aparatur	Mengganti dan mengadakan kebutuhan pakaian dinas	95%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatkan kinerja disiplin pegawai	95%	100%	100%	100%	100%
			Mengefisienkan perjalanan dinas pegawai	95%	100%	100%	100%	100%
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pemenuhan sumber daya aparatur yang kompeten	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) aparatur dan meningkatkan kinerja pegawai	60%	70%	80%	90%	100%
5.	Pelaporan capaian kinerja	Penataan laporan capaian kinerja baik sebagai arsip maupun informasi	Menyusun laporan capaian kinerja dan keuangan secara akurat	100%	100%	100%	100%	100%
Bidang Tata Bangunan								
1.	Peningkatan sarana dan pemeliharaan gedung perkantoran pemerintah	Pemeliharaan gedung bangunan pemerintah	Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung perkantoran pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Penataan bangunan di lingkungan pemerintah daerah	Penyusunan Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	Menyusun pedoman HSBGN di kabupaten Sidoarjo	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2015	2016	2017	2018	2019
3.	Peningkatan aksestabilitas layanan perekonomian masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan pusat pengelolaan dan pemasaran sebagai inti pengembangan agropolitan	Meingkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi dan pasar dalam menunjang pengelolaan dan pemasaran sebagai inti pengembangan agropolitan	60%	70%	80%	90%	100%
Bidang Pengawasan Pembangunan								
1.	Meningkatkan kualitas dan mobilisasi lingkungan pedesaan	Penyediaan akses memadai dan tertata dengan membangun jalan lingkungan dengan membuka keterisolasian untuk daerah	Membangun jalan tembus (pavingisasi) di setiap desa dab lingkungan	95%	100%	100%	100%	100%
			Membangun akses transportasi dan distribusi barang dan jasa menuju usat-pusat pertumbuhan ekonomi pedesaan dan lingkungan	95%	100%	100%	100%	100%
2.	Peningkatan layanan dalam upaya pengawasan dan penertiban pembangunan	Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perijinan	Meningkatkan kinerja dan Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatkan kinerja dan Penerbitan layanan Non Perijinan: Klarifikasi Konstruksi Bangunan Berlantai 3 (tiga) atau Lebih	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatkan kinerja dan Penerbitan layanan Non Perijinan: Klarifikasi Konstruksi Bangunan Menara Telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatkan kinerja dan Penerbitan layanan Non Perijinan: Klarifikasi Konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Bangunan Menyelenggara-kan Reklame					
3.	Penertiban bangunan sesuai dengan kebijakan yang ada	Penertiban bangunan berijin	Meningkatkan jumlah bangunan ber-IMB	34,80%	36,30%	37.80%	39,30%	40.80%
4.	Pelayanan terhadap pelayanan penanggulangan bencana kebakaran	Pemenuhan capaian pelayanan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Sidoarjo	Meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran	95%	100%	100%	100%	100%
5.	Meminimalisir terjadinya bencana keakaran	Peminimalisiran bencana kebakaran	Meminimkan jumlah kejadian kebakaran	65%	60%	55%	50%	40%
6.	Penanggulangan resiko banjir (flood risk management)	Pengendalian banjir di daerah rawan banjir	Membangun buzem dan rumah pompa	3	4	4	5	5
7.	Upaya minimalisasi bencana banjir	Pengurangan daerah banjir di Sidoarjo khususnya perumahan dan permukiman	Mengurangi luas daerah genangan banjir	1.060 Ha	990 Ha	890 Ha	790 Ha	600 Ha
Bidang Tata Ruang								
1.	Penataan dan pengendalian tata ruang	Penertiban dan pemanfaatan tata ruang	Menertibkan pemanfaatan tata ruang	98%	100%	100%	100%	100%
2.	Penetapan kebijakan tata ruang	Perumusan kebijakan rencana tata bangunan dan lingkungan	Menyusun dan atau merevisi RTBL	100%	100%	100%	100%	100%
		Perumusan kebijakan dan strategi penataan lingkungan sosial dan kebutuhan air minum	Menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA)					
3.	Penataan Ruang	Pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang	Melaksanakan tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang waktu 5 (lima) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	Membangunan luasan RTH untuk kepentingan masyarakat dan publik	10%	20%	20%	30%	30%
		Pelayanan verifikasi siteplan	Meningkatkan kinerja pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2015	2016	2017	2018	2019
			permohonan verifikasi siteplan					
Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan								
1.	Penanganan pemukiman kumuh perkotaan	Penanganan pemukiman kumuh perkotaan	Mengurangi luasan pemukiman kumuh di perkotaan	55%	60%	70%	85%	100%
2.	Sarana prasarana perumahan	Penyediaan sarana prasarana perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Membangun rusunawa sesuai kebutuhan masyarakat	2	3	3	4	4
3.	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi dasar, serta memenuhi kebutuhan baku (raw water) yang akan diolah sebagai air minum	Pemenuhan daerah-daerah yang kekurangan air serta pada masyarakat miskin di pedesaan maupun perkotaan yang tidak terdistribusi air PDAM	Membangunan jaringan sarana air bersih yang dibangun (unit)	2	2	3	3	2
			Membangun dan menyediakan layanan air bersih di pedesaan	25%	30%	35%	40%	50%
4.	Penyehatan lingkungan pemukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan)	Penataan air limbah pemukiman	Membangunan sistem air limbah setempat	79%	95%	100%	100%	100%
			Membangun sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	48%	60%	75%	90%	100%
		Pengelolaan persampahan	Menyediakan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan (perumahan dan pemukiman)	26%	36%	50%	65%	85%
		Penyediaan Drainase	Membangun sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	52%	65%	80%	95%	100%

Sumber: Hasil Analisa

BAB 6 PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Kinerja kelembagaan dalam rangka menjalankan tugas, pokok dan fungsi dinas tahun 2013, terbagi menjadi 5 bidang: kesekretariatan, tata bangunan, pengawasan bangunan, tata ruang, dan penyehatan lingkungan permukiman dan perumahan. Program kerja dan dukungan anggaran lebih diprioritaskan pada 3 (tiga) program dari 17 program yang dirumuskan, yaitu: (1). Ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat dengan alokasi mencapai 16,14 persen; (2). Penyediaan sarana dan prasarana wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan alokasi mencapai 20,40 persen; dan (3). Terwujudnya sarana air bersih dan sanitasi dasar, jalan lingkungan serta buzem, rumah pompa dan drainase dengan alokasi mencapai 28,80 persen. Kendati anggaran lebih banyak dialokasikan untuk pemenuhan Sarana dan Prasarana di Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan serta pemenuhan Sarana dan Prasarana di Bidang Tata Bangunan, namun demikian kinerja program, masih perlu ditingkatkan karena masih banyak wilayah yang genangan air hujan masih lama dan banjir, misalnya di wilayah porong sebelah lapindo, wilayah perkotaan, dan wilayah sawotratap.
2. Kualitas Sumberdaya Aparatur Dinas dapat dijelaskan dengan tingkat pendidikan. Dari keseluruhan sumberdaya aparatur dinas, yakni 67 orang, pendidikannya didiskripsikan sebagai berikut: Sumberdaya Aparatur Dinas dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 27 orang dan

Sumberdaya Aparatur Dinas dengan tingkat pendidikan SLTA dengan jumlah mencapai 29 orang terdiri dari 17 orang PNS dan 12 orang Non-PNS. Menurut analisis kami bahwa sumberdaya aparatur dinas, masih perlu untuk ditingkatkan kualitasnya. Tidak ada pilihan lagi bahwa untuk meningkatkan kinerja PU Cipta Kaya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, harus didukung oleh Sumberdaya aparatur Dinas yang memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang diembankan kepadanya. Karena sumberdaya aparatur dinas merupakan salah satu sumberdaya (*resources*) yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Grindle: 1980). Begitu juga Edward III (1980, 53) menegaskan bahwa *probably the most essential resources in implementing policy is staff*. Kendatipun program kerja dinas telah dirumuskan secara jelas dan ditransformasikan dengan tepat, manakala sumberdaya aparatur dinas masih kurang mendukung kompetensinya, maka pelaksanaan program tidak akan mencapai performa yang efektif.

3. Kinerja layanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sidoarjo dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu layanan, yakni 1) layanan perijinan dalam bentuk Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), dan 2) layanan dalam bentuk non-perijinan: a) klarifikasi konstruksi bangunan yang berlantai 3 (tiga) atau lebih; b) klarifikasi konstruksi bangunan menara telekomunikasi; c) klarifikasi konstruksi bangunan reklame. Semua layanan perijinan dan non-perijinan pada periode terakhir menunjukkan kuantitas yang tinggi. Namun demikian kinerja layanan oleh peneliti belum disertai SPM dan SOP layanan, sehingga sulit untuk mengukur baik tidaknya kinerja layanan.
4. Kinerja program dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo pada 2 tahun terakhir dirumuskan

bahwa: 1) Pada tahun 2012 dengan alokasi anggaran mencapai Rp. Rp. 54.662.242.350,- dapat direalisasikan mencapai Rp. 49.395.990.093,- atau capaian kinerja mencapai 90,37 persen; dan 2) Pada tahun 2013 dengan alokasi anggaran mencapai Rp. Rp. 164.379.363.112,- dapat direalisasikan mencaapai Rp. 137.546.574.045,- atau capaian kinerja mencapai 83,68 persen. Analisis yang dapat diberikan bahwa meski pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah alokasi anggaran dan peningkatan jumlah program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, tetapi justru **capaian kinerja menunjukkan penurunan** jika dibandingkan kondisi tahun 2012.

5. Tantangan bagi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tupoksinya adalah 1) tingginya tingkat urbanisasi; 2) ketersediaan infrastruktur dan layanan yang belum merata; 3) menciptakan Sidoarjo yang asri dan lestari ditengah terjadinya degradasi lingkungan diperkotaan; 4) wajah fisik perkotaan yang semakin “semrawut” akibat belum maksimalnya fungsi perencanaan dan penerapan tata-bangunan; 5) keterbatasan kapasitas daerah dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
6. Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam peningkatan kinerja dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi dan pencapaian visi-misi dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, dirumuskan 4 (empat) startegi kebijakan: 1) pemenuhan hak dasar masyarakat miskin, 2) pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur, 3) optimalisasi kinerja penataan ruang, 4) pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

6.2. Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan kinerja bidang kelembagaan, bidang pelayananan perijinan dan non perijinan dan bidang anggaran perlu dukungan sumberdaya aparatur dinas yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Karena itu diperlukan peningkatan pendidikan bagi sumberdaya aparatur dinas bagi yang berpendidikan D3 dan SLTA untuk mengikuti pendidikan S-1 sesuai dengan bidang kerjanya; dan pelatihan – pelatihan dalam penyusunan program dan anggaran serta pelayanan sehingga kinerja dinas menjadi meningkat;
2. Dalam upaya untuk menciptakan Kabupaten Sidoarjo yang asri dan lestari ditengah terjadinya degradasi lingkungan diperkotaan, diperlukan 1) penyusunan kebijakan dan strategi untuk lingkungan sosial yang sehat; 2 penyusunan kebijakan dan strategi pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat (JAKSTRADA); dan penerapan tata rencana tata-bangunan yang ketat sesuai dengan peraturan perundangan.
3. Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo ke depan menurut hasil kajian ini lebih diarahkan pada 4 aspek, yakni: 1) pemenuhan hak dasar masyarakat miskin, 2) pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur, 3) optimalisasi kinerja penataan ruang, 4) pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiandono, D. 1986. *Perencanaan dan Penyelenggaraan Latihan Tenaga Kerja*. Jakarta. Penerbit Bhatara Karya Aksara.
- Denhardt and Denhardt. 2007. *The New Public Service*. New York: M.E. Sharpe, Inc.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2003. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung. Refika Diantama.
- Moekijat. 1991. *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung. Mandar Maju.
- Mcleod Jr, Raymond, George P. Schell. 2008. *Management Information Systems : Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuning Akhmadi (ed). 2004. *Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-Bukti Awal Desentralisasi di Indonesia*.
- Loina Lalolo Krina P. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.
- Samudi. Good Governance di Indonesia: Sebuah Telaah Kritis. *Jurnal Semai*. Komunikasi. Vol. I No. 2, Juni 2011: 110-119.
- Saydam, Gouzali. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Djambatan.
- Winarsih, dkk. 2005. *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Yeni Widyastuti. Remunerasi dan Pembinaan Kinerja Birokrasi. *Jurnal Admistrasi Publik*. Volume 3 Nomor 1, Juni 2012: 71-85.
- Alamsyah. Karakteristik Universal Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik. *Jurnal Borneo Administrator* Vol. 7 No. 3 Tahun 2011: 353-371.
- Grindle, M.S., (editor), 1997, *Getting Good Government : CapacityBuilding in the Public Sector of Developing Countries*, Boston,MA: Harvard Institue for International Development.
- Soeprapto, Riyadi. 2000. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang. UM Press.

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Rumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta PT. Elex Media Komputindo.